



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
KABUPATEN PANGANDARAN

2 0 2 1



Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021 dapat selesai dengan baik dan lancar sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Teknis Kinerja Instansi Pemerintah penyusunan Laporan Kabupaten Pangandaran berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah. Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan kinerja yang dicapai, sehingga dapat digunakan sebagai perbaikan demi peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif segenap jajaran aparat pemerintah daerah dalam penyusunan LKjIP ini, dan dukungan instansi lain serta masyarakat atas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2021. Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai parameter pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2021 serta dijadikan sebagai bahan masukkan untuk penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna mewujudkan Kabupaten Pangandaran yang lebih sejahtera.

Pangandaran, Maret 2022
BUPATI PANGANDARAN,
H. JEJE WIRADINATA





DAFTAR ISI

Kata	a Pengantar	i
DAF	TAR GAMBAR	. iv
DAF	TAR TABEL	v
BAB	I PENDAHULUAN	8
1.1	Latar Belakang	8
1.2	Maksud dan Tujuan	.11
1.3	Gambaran Umum Kabupaten Pangandaran	12
1.	3.1 Letak Geografis Wilayah	12
1.	3.2 Kondisi Demografi	.26
1.4	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten	
	Pangandaran	.31
1.	4.1 Kewenangan Perangkat Daerah dalam Menyelenggarakan	
	Urusan Pemerintahan	.34
1.	4.2 Sumberdaya Aparatur Sipil Negara (ASN)	36
1.	4.3 Sumberdaya Keuangan	38
1.5	Isu Strategis	.48
1.6	Landasan Hukum	.54
1.7	Sistematika Penyusunan LKJiP	.55
BAB	II PERENCANAAN KINERJA	. 58
2.1	Perencanaan Strategis	58
2.	1.1 Visi	59
2.	1.2 Misi	.62
2.	1.3 Tujuan dan Sasaran	.67
2.	1.4 Strategi dan Arah Kebijakan	.81
2.2 1	Indikator Kinerja Utama	.95
2.3	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	100
2.4	Perjanjian Kinerja	101
BAB	III AKUNTABILITAS KINERJA	105
3.1	Pengukuran Kinerja 2022	106
3.2	Capaian Kinerja 2022	108





3.2.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	.114
3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021	.185
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir	
RPJMD	. 192
3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar	
Provinsi dan Standar Nasional	. 198
3.2.5 Realisasi Anggaran	.202
3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tujuan dan Sasaran	.207
BAB IV PENUTUP	211
4 1 DENITTID	211





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Orientasi Kabupaten Pangandaran di Jawa Barat 12
Gambar 1. 2 Peta Batas Administratif Kabupaten Pangandaran . 15
Gambar 1. 3 Peta Topografi Kabupaten Pangandaran 18
Gambar 1. 4 Kelas Lereng Kabupaten Pangandaran
Gambar 1. 5 Peta Geologi Kabupaten Pangandaran 22
Gambar 1. 6 Peta Hidrologi Kabupaten Pangandaran 24
Gambar 1. 7 Peta Curah Hujan Kabupaten Pangandaran 26
Gambar 1. 8 Proyeksi Komponen Pendapatan APBD
Gambar 1. 9 Proyeksi Pengeluaran Kabupaten Pangandaran 41
Gambar 3 .1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 116
Gambar 3. 2 Capaian Kinerja Sasaran Startegis 2 120
Gambar 3. 3 CapaianKinerja Sasaran Strategis 3 124
Gambar 3. 4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4
Gambar 3 .5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 134
Gambar 3. 6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6
Gambar 3. 7 Capaian Kinerja Sasaran strategis 7 143
Gambar 3 .8 Capaian Kinerja Sasaran strategis 8 146
Gambar 3 .9 capaian kinerja sasaran strategis 9 150
Gambar 3 .10 capaian kinerja sasaran strategis 10 154
Gambar 3 .11 Capaian kinerja sasaran strategis 13 161
Gambar 3 .12 capaian kinerja sasaran strategis 14 164
Gambar 3 13 capaian kinerja sasaran strategis 16 170
Gambar 3 .14 capaian Indeks Gini
Gambar 3 .15 capaian Indeks Desa membangun
Gambar 3 16 Capaian sasaran strategis 18 178
Gambar 3 17Capaian kinerja sasaran strategis 19 181
Gambar 3 .18 persentase kunjungan wisatawan 182





DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Luas Administratif Kecamatan
Tabel 1. 2 Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran
Tabel 1. 3 Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran . 17
Tabel 1. 4 Jenis Batuan di Kabupaten Pangndaran 21
Tabel 1. 5 DAS di Kabupaten Pangandaran
Tabel 1. 6 Kondisi Curah Hujan Kabupaten Pangandaran 25
Tabel 1. 7Jumlah Penduduk per Kecamatan
Tabel 1. 8 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 29
Tabel 1. 9 Perkembangan Jumlah Penduduk 30
Tabel 1. 10 Data Pegawai Pemerintah Kabupaten Pangandaran 36
Tabel 1. 11 Proyeksi Komponen Pendapatan APBD 38
Tabel 1. 12 Kontribusi Komponen Penerimaan APBD 2016-2021 40
Tabel 1. 13 Proyeksi Kebutuhan Anggaran
Tabel 1. 14 Detil Proyeksi Kebutuhan Anggaran
Tabel 1. 15 Proyeksi Anggaran untuk Belanja Periodik
Tabel 2.1 Pokok-Pokok Visi dan Penjelasannya 59
Tabel 2.2 Matriks Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 70
Tabel 2.4 Strategi Pembangunan Daerah
Tabel 2.5 Arah Kebijakan Kabupaten Pangandaran
Tabel 2.6 Indikator Kinerja Utama
Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja Kabupaten Pangandaran
Tabel 3 .1 Pengkategorian capaian Kinerja 108
Tabel 3 .2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pangandaran tahun 2021
Tabel 3 .3 Capaian Kinerja Tujuan 1





Tabel 3 .8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	123
Tabel 3 .9 Penyerapan program penunjang sasaran 3	124
Tabel 3 .10 Capaian Kinerja Tujuan 2	129
Tabel 3 .11 capaian Kinerja Sasaran Strategis 4	129
Tabel 3 .12 Penyerapan Program Penunjang Sasaran 4	
Tabel 3 .13 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5	133
Tabel 3 .14 Penyerapan Program Penunjang sasaran 5	135
Tabel 3 .15 Capaian Kinerja Tujuan 3	137
Tabel 3 .16 Capaian kinerja sasaran strategis 6	137
Tabel 3 .17 Penyerapan Program Penunjang Sasaran 6	139
Tabel 3 .18 Capaian Kinerja Tujuan 4	142
Tabel 3 .19 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7	142
Tabel 3 .20 Penyerapan Program Penunjang Sasaran 7	143
Tabel 3 .21 Capaian Kinerja Tujuan 5	145
Tabel 3 .22 Capaian Kinerja Sasaran strategis 8	145
Tabel 3 .23 Penyerapan Program Penunjang Sasaran 8	147
Tabel 3 .24 Capaian Kinerja Tujuan 6	
Tabel 3 .25 Capaian Kinerja Sasaraan strategis 9	149
Tabel 3 .26 Penyerapan Program Penunjang sasaran 9	151
Tabel 3 .27 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10	
Tabel 3 .28 Penyerapan Program Penunjang Sasaran 10	154
Tabel 3 .29 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11	156
Tabel 3 .30 Penyerapan Program Penunjang Sasaran 11	
Tabel 3 .31Capaian Kinerja Tujuan 7	
Tabel 3 .32 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12	
Tabel 3 .33 Penyerapan Program Penunjang Sasaran 12	
Tabel 3 .34 Capaian Kinerja Tujuan 8	
Tabel 3 .35 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13	
Tabel 3 .36 Penyerapan Program Penunjang Sasaran 13	
Tabel 3 .37 Capaian Kinerja Tujuan 9	163
Tabel 3 .38 Capaian Kinerja Sasaran strategis 14	
Tabel 3 .39 Penyerapan Program Penunjang Sasaran 14	
Tabel 3 .40 Capaian Kinerja Tujuan 10	
Tabel 3 .41 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15	
Tabel 3 .42 Penyerapan Program Penunjang Sasaran 15	
Tabel 3 .43 Capaian Kinerja Tujuan 11	
Tabel 3 .44 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16	
Tabel 3 .45 Penyerapan Program Penunjang Sasaran 16	
Tabel 3 .46 Capaian Kinerja Tujuan 12	
Tabel 3 .47 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17	174





Tabel 3 .48 Penyerapan Program Penunjang Sasaran 17	. 176
Tabel 3 49 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18	. 177
Tabel 3 .50 Penyerapan Penunjang Sasaran Strategis 18	. 178
Tabel 3 .51 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 19	. 180
Tabel 3 .52 Penyerapan Program Penunjang Sasaran 19	. 182
Tabel 3 .53 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2020	189
Tabel 3 .54 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja	. 194
Tabel 3 .55 Perbandingan dengan Standar Provinsi & Nasional	198
Tabel 3 .56 Capaian Anggaran	. 202
Tabel 3 .57 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	207





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diterbitkan sebagai upaya dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, dan bertanggungjawab. Kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk melanjutkan pelaksanaan SAKIP. Pemerintah wajib melaksanakan penyelenggaraan yang efektif, efisien, dan akuntabel baik skala pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, di satu sisi mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang baik. Upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang terintegrasi dan dapat menunjang pelaksanaanya. Sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kandungan SAKIP mencangkup Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Tujuannya adalah Pemerintah yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, dan pelayanan public yang baik serta berkualitas.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sebagai upaya mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Pemerintah Kabupaten Pangandaran





dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah seseorang atau untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang berupa laporan akuntabilitas. Laporan akuntabilitas tersebut disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjPI).

Laporan Kinerja Merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kineria tahunan ini berisi pemerintah daerah. Laporan mengenai pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (RPJMD) dan Perjanjian Kinerja dengan





fokus pada pertanggungjawaban capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Penyusunan LKJiP Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 merupakan gambaran terkait pencapaian kinerja dalam tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten Pangandaran yang telah





ditetapkan dan diperjanjikan pada dokumen perjanjian kinerja. LKjIP Kabupaten Pangandaran disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKjIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, Rencana Kinerja Tahun 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2021.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjP) Kabupaten Pangandaran tahun 2021 mencakup hal-hal berikut ini:

- 1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2021 sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Pangandaran atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama satu tahun. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2021.
- 2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen pemerintah Kabupaten Pangandaran dapat merumuskan strategi pemecahan masalah sehingga capaian





kinerja pemerintah Kabupaten Pangandaran dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.3 Gambaran Umum Kabupaten Pangandaran

1.3.1 Letak Geografis Wilayah

Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat yang baru ditetapkan pada tahun 2012 berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2012. Kabupaten Pangandaran terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat, dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah tepatnya dengan Kabupaten Cilacap.



Gambar 1. 1 Orientasi Kabupaten Pangandaran di Jawa Barat

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029, tahun 2010





Kabupaten Pangandaran memiliki ibukota kabupaten di Kecamatan Parigi, dengan cakupan wilayah terdiri atas 10 kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Parigi
- b. Kecamatan Cijulang
- c. Kecamatan Cimerak
- d. Kecamatan Cigugur
- e. Kecamatan Langkaplancar
- f. Kecamatan Mangunjaya;
- g. Kecamatan Padaherang;
- h. Kecamatan Kalipucang;
- i. Kecamatan Pangandaran; dan
- j. Kecamatan Sidamulih

Luas Kabupaten Pangandaran kurang lebih 1.010.92 km², dengan distribusi luasan untuk masing-masing kecamatan seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 1 Luas Administratif Kecamatan di Kabupaten
Pangandaran

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	
1	Cimerak	118,35	
2	Cijulang	88,04	
3	Cigugur	102,24	
4	Langkaplancar	177,19	
5	Parigi	98,04	
6	Sidamulih	77,98	
7	Pangandaran	60,77	
8	Kalipucang	136,78	
9	Padaherang	118,73	
10	Mangunjaya	32,80	
Jumlah		1.010,92	

Sumber: Profil Daerah Kabupaten Pangandaran, tahun 2017





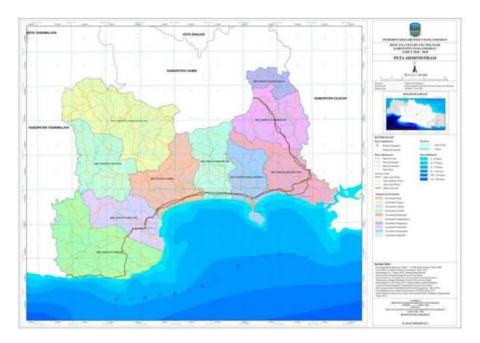
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, batas administratif wilayah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ciulu, Desa Pasawahan, Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari, Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi, Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya, Desa Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambaksari, Desa Sidanegara, Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja, Desa Sidamukti, Desa Patimuan, Desa Rawaapu, Desa Cinyawang, Desa Purwodadi Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pasangrahan Kecamatan Cikatomas, Desa Neglasari, Desa Tawang, Desa Panca Wangi, Desa Mekarsari Kecamatan Pancatengah, Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong, Desa Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.

Secara lebih detail, berikut adalah peta batas administratif Kabupaten Pangandaran yang menunjukkan batas kabupaten dan batas kecamatan.







Gambar 1. 2 Peta Batas Administratif Kabupaten Pangandaran

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran 2018 – 2038, tahun 2018

1.3.1.1 Kondisi Topografi

Kabupaten Pangandaran berada pada ketinggian antara 0 - 700 mdpl. Elevasi Kabupaten Pangandaran cenderung semakin tinggi di dari selatan ke utara kecuali bagian barat pesisir yang wilayahnya perbukitan karst. Kondisi masingmasing kecamatan tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. 2 Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran

No	Kecamatan	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran		
1	Cimerak	 Kondisi geografis: bagian selatan dominan pesisir bertebingcuram dan ke bagian utara merupakan perbukitan kapur. Ketinggian: 3-80 mdpl dengan daerah dataran rendah ataupantai. 		
2	Cijulang	 Merupakan kecamatan yang berada di daerah pesisir pantai. Ketinggian: 2-185 mdpl dengan daerah d 		





No	Kecamatan	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran
3	Cigugur	 Wilayah ini merupakan daerah bukan pesisir melainkanperbukitan dan dataran tinggi. Ketinggian wilayah di Kecamatan Cigugur relatif samaantara 200-500 mdpl.
4	Langkaplancar	 Wilayah ini bukan pesisir melainkan dataran tinggi. Ketinggian wilayah di Kecamatan Langkaplancar relatifsama antara 400-1.000 mdpl.
5	Parigi	 Ketinggian wilayah bervariasi antara 5-500 mdpl Desa yang berada di dataran rendah yakni Desa Parigi, Karangjaladri, Cibenda, Karangbenda dan Ciliang.
6	Sidamulih	 Merupakan kecamatan yang berada di daerah pesisir pantai. Ketinggian: 3-250 mdpl dengan daerah dataran tingginyayakni desa Kersaratu dan Kalijati.
7	Pangandaran	Merupakan daerah pesisir pantai,merupakan 0Ketinggian: 3-500 mdpl.
8	Kalipucang	 Ketinggian wilayah bervariasi antara 2-400 mdpl, dengan desa yang berada di dataran tinggi yakni Desa Ciparakan (400 mdpl) dan Emplak (160 mdpl). Daerah lainnya merupakan dataran rendah berkisan antara? 8 mdpl
9	Padaherang	 berkisar antara2-8 mdpl. Wilayah ini bukan pesisir. Ketinggian wilayah di Kecamatan Padaherang bervariasiantara 13-600 mdpl. Daerah yang berada di dataran tinggi yakni DesaPanyutran (600 mdpl) dan Bojongsari (245 mdpl). Sedangkan daerah lainnya merupakan dataran yang realtifsama berkisar antara 13-24 mdpl.
10	Mangunjaya	 Wilayah ini merupakan daerah bukan pesisir. Ketinggian wilayah di Kecamatan Mangunjaya relatif samaantara 13-17 mdpl.

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran 2018 – 2038,

tahun 2018

Jika dilihat dari kondisi kemiringan lerengnya, Kabupaten Pangandaran memiliki kemiringan lereng yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%. Kemiringan lereng yang besar terdapat di daerah perbukitan dan terdapat gawir





sesar di bagian tengah timur Kabupaten Pangandaran yang memanjang arah tenggara-barat laut sehingga kemiringan lerengnya sangat curam. Kondisi masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 3 Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran

No	Kecamatan	Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran
1	Cimerak	• Kemiringan lereng merata pada hampir semua desa dengan Kemiringan lereng sekitar 5 % - 15 %.
2	Cijulang	 Kemiringan lereng merata pada hampir semua desa dengan Kemiringan lereng sekitar 5 % - 15 %. Sebagian kecil wilayah di Desa Kertayasa dan Margacintamemiliki kemiringan lereng 15 % - 25 %.
3	Cigugur	 Kemiringan lereng bervariasi antara 5% - lebih dari 40%. Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40 % terdapat di sebagian kecil Desa Harumandala dan Pagerbumi.
4	Langkaplancar	 Kemiringan lereng bervariasi antara 5% - lebih dari 40%. Wilayah dengan Kemiringan lereng lebih dari 40 % terdapat di sebagian besar Desa Jayasari, Pangkalan, Bojongkondang, Bangunjaya, Langkaplancar, dan Cimanggu.
5	Parigi	 Kemiringan lereng bervariasi antara 2% - lebih dari 40%. Wilayah dengan Kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil Desa Selasari.
6	Sidamulih	 Kemiringan lereng bervariasi antara 2% - lebih dari 40%. Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40 % terdapat di sebagian kecil Desa Kalijati, Sidamulih, dan Kersaratu.
7	Pangandaran	 Kemiringan lereng bervariasi antara 2% - lebih dari 40%. Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil Desa Pagergunung dan Sukahurip.
8	Kalipucang	 Kemiringan lereng bervariasi antara 5% - lebih dari 40%. Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil wilayah Desa Putrapinggan.
9	Padaherang	 Kemiringan lereng bervariasi antara 0 % - 40%. Wilayah pada bagian timur jalan provinsi hampir meratamemiliki kemiringan lereng 0% - 8%. Wilayah pada bagian barat jalan provinsi memiliki

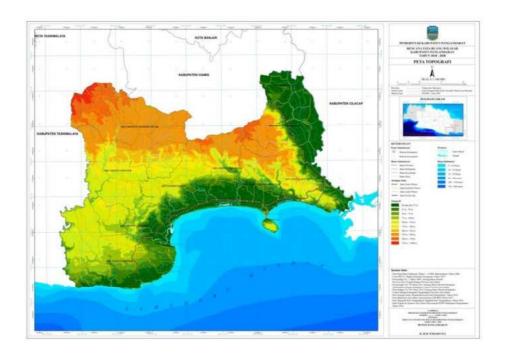




No	Kecamatan	Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran	
		• Kemiringan lereng yang bervariasi antara 8% - lebih dari 40%.	
10	Mangunjaya	• Kemiringan lereng merata hampir pada seluruh desa dengan kisaran kemiringan lereng antara 0 % - 5 %.	

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran 2018 – 2038, tahun 2018

Wilayah dengan kemiringan lereng >40% perlu dijaga karena berpotensi menimbulkan becana apabila tidak dikelola dengan baik. Gambaran sebaran topografi dan kemiringan lereng pada Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

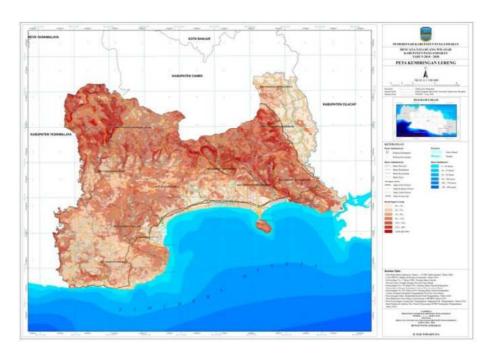


Gambar 1. 3 Peta Topografi Kabupaten Pangandaran

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran 2018 – 2038, tahun 2018







Gambar 1. 4 Kelas Lereng Kabupaten Pangandaran

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran 2018-2038, Tahun 2018

1.3.1.2 Geologi

Menurut kondisi geologinya, Kabupaten Pangandaran merupakan daratan yang terbentuk pada periode tersier kecuali pada pantai yang landai merupakan daratan baru yang terbentuk akibat endapan laut yang berumur holosen. Kontrol struktur geologi sangat kuat di daerah ini. Di bagian tengahtimur terdapat patahan yang memanjang sepanjang perbukitan dengan arah tenggara-barat laut. Di daerah ini juga banyak dijumpai adanya lipatan-lipatan batuan sehingga kontrol geologi sangat berperan besar di Kabupaten Pangandaran yang mengakibatkan daerah ini rawan gempa.

Satuan geologi yang terdapat di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dalam lingkungan tertentu, diantaranya:

a. Satuan Geologi Lingkungan Dataran: Satuan
19





berupa dataran dengan kemiringan lereng <5%. Ketinggian antara 0-50 m diatas permukaan air laut. Melampar di pesisir pantai antara Pangandaran-Parigi-Cijulang dan Kalipucang.

b. Satuan Geologi Lingkungan Perbukitan Terjal: Kemiringan lereng >25%, ketinggian antara 100-700 m di atas permukaan laut, tersusun oleh breksi, batu pasir, batuan beku, batu gamping, dan tufa. Melampar dibagian tengah memanjang kearah Barat Daya-Tenggara dan sebagian kecil di Bukit Pananjung membagi dua bagian zona pemisah air.

1. Perbukitan Terjal Padaherang-Kalicupang

- Tanah lapukan berupa lempung pasirankerikilan, pasir lempungan, tebal berkisar antara 10-50 cm, daya dukung sedang-tinggi, agak kompak-kompak, permeabilitas sedang, porositas sedang. Muka air tanah berkisar antara 3-10 m, debit sumur gali <5 l/detik. Mata air debit <10 l/detik. Kualitas air tanah baik, jernih, tidak bau, warna air agak kekuningan.
- Longsoran mudah terjadi pada bukit terjal daya dukung tinggi kompak dan keras. Peruntukan ruang sebaiknya hutan dan hutan lindung sebagai daerah resapan air dan sebagian baik untuk perkebunan tanaman keras per tahunan sebagai penguat tanah yang akan mengurangi gerakan tanah. Jalur jalan Kalipucang-Pangandaran bertumpu pada batuan yang kurang stabil. Sumber bahan galian terdiri atas batu belah lempung sebagai bahan bata merah,





tras, dan tanah urug serta batu kapur.

2. Perbukiitan Terjal Pananjung

- Saat ini merupakan cagar alam dan hutan lindung untuk kepentingan pelestarian alam sekaligus sebagai objek wisata. Fungsi kawasan lindung sangat baik yang berfungsi sebagai daerah resapan.
- c. Satuan Geologi Lingkungan Perbukitan Karst (Batu Gamping): Merupakan morfologi yang khas batu gamping, batu gamping pasiran, permukaan kasar dan kemiringan lereng curam. Morfologi ini melampar cukup luas di sekitar Pangandaran-Cijulang-Parigi hingga Cimerak dan meluas ke Utara yaitu Padaherang-Kalipucang, dan penting sebagai daerah resapan. Debit air mata air >50 1/detik.

Tanah lapukan umumnya berupa lempung kerikilan yang sangat subur untuk pertanian lahan kering. Ketebalan umumnya <1 m daya dukung sedang- tinggi. Badan jalan yang bertumpu pada batuan ini sering terjadi amblesan. Adapun jenis batuan di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 4 Jenis Batuan di Kabupaten Pangandaran

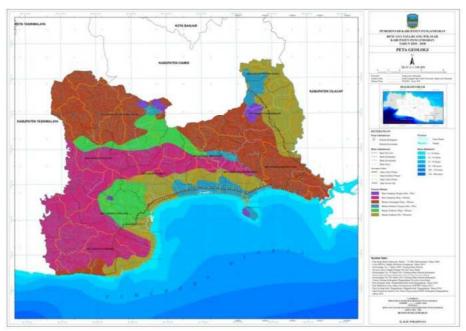
No	Jenis Batuan	Luas (Ha)
1	Batu Gamping Neogen (Mio - Plio)	1.591,68
2	Batu Gamping Oligo - Miosen	35.752,65
3	Batuan Gunungapi Oligo - Miosen	37.048,80
4	Batuan Sedimen Neogen (Mio - Plio)	6.520,38
5	Batuan Sedimen Oligo - Miosen	12.021,43
6	Batuan Sedimen Plio - Plistosen	19.888,43
	Grand Total	112.823,37

Sumber : Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran 2018 – 2038, tahun 2018





Peta sebaran geologi di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat padagambar di bawah ini.



Gambar 1. 5 Peta Geologi Kabupaten Pangandaran

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran 2018 – 2038, tahun 2018

1.3.1.3 Hidrologi

Kabupaten Pangandaran dilalui oleh satu sungai besar, yaitu sungai Citanduy yang merupakan muara bagi beberapa sungai kecil dengan muara terakhir sungai Citanduy ini adalah Sagara Anakan. Sungai Citanduy ini mengalir dari Panumbangan sampai Kalipucang.

Kabupaten Pangandaran berada dalam 2 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Ciwulan - Cilaki dan DAS Citanduy. Luasan masing-masing DAS yang tercakup dalam wilayah Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :





Tabel 1. 5 DAS di Kabupaten Pangandaran

No	Nama DAS	Luas (Ha)
1	DAS Ciwulan – Cilaki	90.935,87
2	DAS Citanduy	21.887,50
	Grand Total	112.823,37

Sumber : Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran 2018 – 2038

Tahun 2018

Hidrologi di Kabupaten Pangandaran dibedakan dalam 2 estimasi produktivitas air tanah, yaitu:

- Akuifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir. Akuifer dengan produktivitas air sangat tinggi dengan kedalaman 10 meter terdapat pada fisiografi perbukitan bergelombang (lereng 15-40%). Komposisi litologi merupakan vulkan yang terdiri dari breksi gunung berapi, laba dan tufa, batu pasir, pasir tufaan, batu lanau, batu lempung sisipan lignit dan konglomerat. Akuifer ini terdapat di Kecamatan Pangandaran dan Parigi.
- Akuifer dengan aliran melalui celahan, rekahan dan saluran. Akuifer ini terdapat dengan produktivitas sangat besar mencapai 10 ¡V100 liter/detik. Terdapat pada fisiografi datar bergelombang dengan komposisi litologi alivium terdiri dari lempung, lanau, pasir dan kerikil. Penyebarannya terdapat di Kecamatan Cijulang dan Cimerak.

Air tanah dangkal di Kabupaten Pangandaran di kawasan pantai berasal langsung dari peresapan air hujan. Muka air tanah sangat bervariasi berkisar antara 2-9 m, pH berkisar antara 6-9 setempat menunjukkan angka yang cukup tinggi. Mata air banyak dijumpai di daerah kaki bukit di daerah batu gamping dan breksi vulkanik. Debit mata air bervariasi diantara 0,2

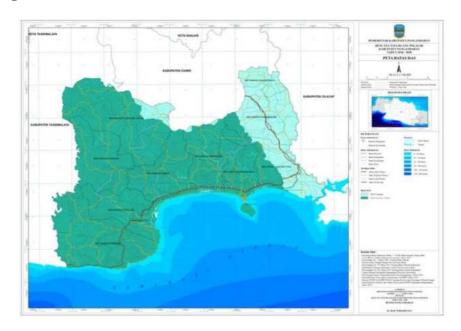




l/detik hingga 20 l/detik bahkan ada juga yang mencapai 100 l/detik. Mata air di sekitar Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Parigi sudah dimanfaatkan oleh PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekitar. Kabupaten Pangandaran memiliki sumber air baku (mata air) yang merupakan milik Pemda yaitu:

- Mata air Kalisodong Desa Selasari Kecamatan Parigi, Debit 105,0
 C/det;
- 2. Mata air Guhahawu Desa Selasari Kecamatan Parigi, Debit 7,5 C/det;
- 3. Mata air Madasari Desa Masawah Kecamatan Cimerak, Debit 7,5 C/det;
- 4. Mata air Cijumleng Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih, Debit 32,5 C/det.

Peta sebaran DAS di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada gambardi bawah ini.



Gambar 1. 6 Peta Hidrologi Kabupaten Pangandaran

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran 2018 – 2038, Tahun 2018





1.3.1.4 Klimatologi

Di Kabupaten Pangandaran, suhu udara rata-rata pada tahun 2010 berkisar antara 20°C sampai dengan 30°C. Tempattempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata tinggi karena terletak di dataran rendah. Kabupaten Pangandaran sendiri terletak pada lahan dengan keadaan morfologi datar-bergelombang sampai bergunung, dengan kemiringan lereng berkisar antara 0-40 % dengan sebaran 0-2 % terdapat di bagian tengah-timur laut ke selatan dan 2-40 % tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan.

Data curah hujan dan jumlah hari hujan pada masingmasing kecamatandi Kabupaten Pangandaran sebagai berikut:

Tabel 1. 6 Kondisi Curah Hujan Kabupaten Pangandaran Tahun
2015

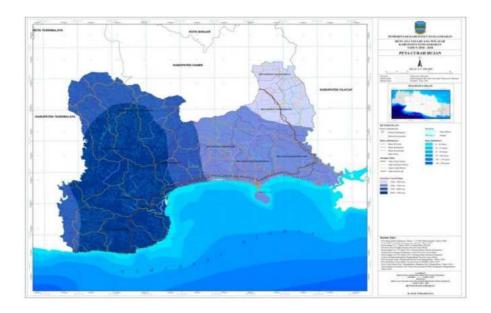
No	Kecamatan	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)
1	Cimerak	82	997
2	Cijulang	120	2611
3	Cigugur	100	1634
4	Langkaplancar	156	2576
5	Parigi	170	3163
6	Sidamulih	149	1604
7	Pangandaran	122	1480
8	Kalipucang	123	3161
9	Padaherang	60	651
10	Mangunjaya	100	2206
I	Rata – Rata	118	2049

Sumber: Profil Daerah Kabupaten Pangandaran, tahun 2017

Adapun Gambaran sebaran curah hujan dapat dilihat pada peta dibawah ini.







Gambar 1. 7 Peta Curah Hujan Kabupaten Pangandaran

Sumber: RTRW Kabupaten Pangandaran 2018 - 2038, Tahun 2018

1.3.2 Kondisi Demografi

Aspek kependudukan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam perencanaan dan realisasi pembangunan. Penduduk memegang peranan yang sangat vital yaitu sebagai Kondisi subjek dari objek maupun pembangunan. kependudukan dapat dilihat dari tingkat kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Sedangkan untuk menentukan sasaran pembangunan, maka data kependudukan sangat diperlukan mengenai jumlah, jenis kelamin, struktur, dan komposisi maupun penyebaran/kepadatan penduduk suatu wilayah. Kondisi kependudukan ini akan menjadi modal pembangunan yang sangat berharga apabila diiringi dengan kualitas SDM yang baik.

a. Perkembangan Kependudukan

Berdasarkan hasil pengolahan data kependudukan





yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, penduduk Kabupaten Pangandaran pada Semester 2 Tahun 2017 tercatat sebanyak 409.016 orang. Dari segi komposisi jumlah penduduk, laki-laki sebanyak 205,032 orang dan perempuan sebanyak 203,984 orang, dengan demikian maka jumlah penduduk laki- laki relatif lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan hal ini pun jelas tergambar dari nilai sex ratio sebesar 100.51%.

Luas wilayah Kabupaten Pangandaran adalah 1.010,92 km² dengan jumlah penduduk sebesar 409.016 orang menyebabkan kepadatan penduduk pada Tahun 2017 mencapai 404.54 orang per km². Kepadatan tertinggi terjadi di Kecamatan Mangunjaya sebesar 995.69 orang per km², sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Cigugur dengan kepadatan penduduk sebesar 224.19 orang per km².

penyebarannya, 16.45% segi penduduk Kabupaten Pangandaran bertempat tinggal di Kecamatan Padaherang. Kepadatan tertinggi di Kecamatan Mangunjaya dimengerti karena Kecamatan dapat Mangunjaya mempunyai luas wilayah yang relatif luas. Sex ratio Kabupaten pangandaran adalah 100.51% yang berarti penduduk berjenis kelamin laki-laki jumlahnya lebih banyak dengan penduduk yang berkelamin perempuan. Angka sex ratio di atas seratus atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki lebih banyak di banding perempuan terdapat di Kecamatan Cimerak, Cigugur, Langkaplancar, Mangunjaya, Padaherang, Kalipucang, Pangandaran.

Dilihat dari jumlah keluarga Kecamatan Padaherang berada urutan paling teratas dengan jumlah keluarga





sebesar 22.693 keluarga. Sementara itu, dilihat dari ratarata anggota keluarga tertinggi terdapat di Kecamatan Langkaplancar sebesar 3,07 dan rata-rata anggota keluarga terendah terdapat di Kecamatan Cijulang sebesar 2,66. Angka beban tanggungan tertinggi terdapat di Kecamatan Cijulang yang mencapai 44. Dengan asumsi tidak ada yang cacat, setiap 10 orang yang bekerja (produktif) menanggung beban 40 orang yang tidak produktif (anak-anak) dan manula.

Gambaran secara lebih detail mengenai keadaan kependudukan di Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 7Jumlah Penduduk Menurut Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2017

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	KEPADATAN PENDUDUK	
МО		n	(KM²)	PER (KM ²)	
1	PARIGI	43.448	98,04	443.16	
2	CIJULANG	26.996	88,04	289.78	
3	CIMERAK	46.849	118,35	396.42	
4	CIGUGUR	21.812	102,24	224.19	
5	LANGKAPLANCAR	50.494	177,19	284.97	
6	MANGUNJAYA	32.632	32,80	995.69	
7	PADAHERANG	67.264	118,73	565.861	
8	KALIPUCANG	37.418	136,78	273.53	
9	PANGANDARAN	54.429	60,77	895.65	
10	SIDAMULIH	27.674	77,98	354.88	
		409.016	1.010,92 km ²	404.54	

Sumber: Database Hasil Data Kependudukan Bersih Kabupaten PangandaranSemester 2 Tahun 2017 Disdukcapil.

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Pangandaran (Tabel 2.9) secara umum menggambarkan bahwa Kabupaten Pangandaran memiliki modal pembangunan berupa SDM produktif yang





menjanjikan. Hal ini diindikasikan oleh persentase penduduk baik laki-laki maupun perempuan yang sangat tinggi di struktur penduduk usia produktif (15- 64 tahun) yang mencapai 71,2 persen dari total penduduk, sementara jumlah penduduk usia belum produktif adalah sebesar 19,7 persen yang pada saatnya akan tumbuh menjadi penduduk usia produktif.

Tabel 1. 8 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pangandaran Tahun 2017

	JUMLAH PENDUDUK					
UMUR	L	%	P	%	JUMLAH	%
00-04	9,510	2.3	8,936	2.2	18,446	4.5
05-09	15,914	3.9	14,800	3.6	30,714	7.5
10-14	16,297	4.0	15,199	3.7	31,496	7.7
15-19	17,302	4.2	16,603	4.1	33,905	8.3
20-24	17,109	4.2	16,118	3.9	33,227	8.1
25-29	15,267	3.7	14,593	3.6	29,860	7.3
30-34	14,155	3.5	14,090	3.4	28,245	6.9
35-39	14,414	3.5	14,794	3.6	29,208	7.1
40-44	14,036	3.4	15,355	3.8	29,391	7.2
45-49	15,414	3.8	16,462	4.0	31,876	7.8
50-54	13,912	3.4	15,144	3.7	29,056	7.1
55-59	12,961	3.2	13,404	3.3	26,365	6.5
60-64	10,280	2.5	9,840	2.4	20,120	4.9
65-69	7,781	1.9	7,308	1.8	15,089	3.7
70-74	4,535	1.1	4,745	1.2	9,280	2.3
> 75	6,145	1.5	6,593	1.6	12,738	3.1
JUMLAH	205,032	50.1	203,984	49.9	409,016	100

Sumber: Database Hasil Data Kependudukan Bersih Kabupaten Pangandaran Semester 2 Tahun 2017 Disdukcapil.

b. Proyeksi Penduduk

Proyeksi jumlah penduduk dilakukan untuk mengestimasi jumlah penduduk di Kabupaten Pangandaran





sampai akhir tahun rencana. Data dasar adalah menggunakan data tahun 2012-2014. Data kemudian diproyeksi untuk tahun 2015-2021. Berikut adalah tabel data jumlah penduduk dan proyeksi penduduk di Kabupaten Pangandaran.

Tabel 1. 9 Perkembangan Jumlah Penduduk 2012-2014 dan Proyeksi Penduduk di Kabupaten Pangandaran Tahun 2015-2021 (Ribuan Orang)

		Tahun					
No	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016	2021
1	Cimerak	50.14	50.90	51.67	51.92	52.17	53.46
2	Cijulang	28.43	28.87	29.30	29.44	29.59	30.32
3	Cigugur	23.52	23.88	24.24	24.36	24.48	25.09
4	Langkaplanca r	52.63	53.43	54.24	54.50	54.77	56.12
5	Parigi	46.44	47.15	47.86	48.09	48.33	49.52
6	Sidamulih	30.27	30.73	31.20	31.35	31.50	32.28
7	Pangandaran	58.70	59.59	60.49	60.78	61.08	62.59
8	Kalipucang	42.06	42.70	43.34	43.55	43.77	44.85
9	Padaherang	75.81	76.97	78.13	78.51	78.89	80.85
10	Mangunjaya	34.98	35.52	36.05	36.23	36.40	37.30
Kab	. Pangandaran	442.99	449.74	456.50	458.74	460.98	472.39

Sumber: Buku Fakta Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Untuk Tahun 2013, jumlah penduduk diinterpolasi menggunakan data jumlah penduduk tahun 2012 dan 2014. Untuk proyeksi jumlah penduduk periode 2015-2021, jumlah penduduk tahunan diprediksi dan diproyeksi dengan menggunakan asumsi laju pertumbuhan penduduk nasional sebesar 0.49%. Komposisi jumlah penduduk per kecamatan pada tahun 2012 menjadi dasar untuk menghitung komposisi jumlah pendudukan pada tahun selanjutnya.





Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Pangandaran mengalami pertambahan jumlah penduduk secara cukup signifikan. Padaherang merupakan kecamatan Kecamatan memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2021 yaitu 80.850 jiwa. Di urutan kedua jumlah penduduk terbanyak di tahun 2021 yaitu Kecamatan Pangandaran dengan jumlah penduduk 62.590 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah pada tahun 2021 yaitu adalah Kecamatan Cigugur dengan jumlah penduduk sekitar 25.090 jiwa, Kecamatan Sidamulih dengan jumlah penduduk sekitar 32.280 jiwa dan Kecamatan Cijulang dengan jumlah penduduk sekitar 30.320 jiwa.

Pertambahan jumlah penduduk yang signifikan di Kabupaten Pangandaran akan mendorong ketersediaan sumber daya manusia untuk mendorong pengembangan industri pengolahan dan jasa pariwisata. Jumlah penduduk tersebut harus didorong kualitasnya agar meningkat sehingga bisa memberikan dorongan yang cukup besar bagi pengembangan pariwisata.

1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai wadah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ditetapkan dengan mengacu pada peraturan bupati Pangandaran tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Komposisi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran dapat dijabarkan sebegai berikut:





- a. Sekertaris Daerah merupakan Sekertariat Daerah Tipe B;
- b. Sekertaris DPRD merupakan Sekertariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas terdiri dari:
 - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Tipe A, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan, Kepemudaan, dan olah Raga;
 - 2. Dinas Kesehatan Tipe A, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan;
 - 3. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal;
 - 4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 - 5. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman;
 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 8. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - 9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;





- 10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup, Persampahan, Kawasan Permukiman, Sub Urusan Pertamanan, dan Pemakaman;
- 11. Dinas Pertanian Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian;
- 12. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kelautan, Perikanan, dan Pangan;
- 13. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan-Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Sub Urusan Kebakaran;
- 14. Dinas Perhubungan Tipe C, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan;
- 15. Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Tipe C melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik;
- 16. Dinas Ketenagakerjaan Tipe C, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
- 17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Tipe A, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian.

e. Badan terdiri dari:

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan;
- 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;





- 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
- 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan.
- 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klasifikasi A, melaksanakan Urusan Pemerintahan Sub Urusan Bencana;
- 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Kecamatan terdiri dari:

- 1. Kecamatan Parigi dengan Tipe A;
- 2. Kecamatan Cijulang dengan Tipe A;
- 3. Kecamatan Cimerak dengan Tipe A;
- 4. Kecamatan Cigugur dengan Tipe A;
- 5. Kecamatan Langkaplancar dengan Tipe A;
- 6. Kecamatan Padaherang dengan Tipe A;
- 7. Kecamatan Kalipucang dengan Tipe A;
- 8. Kecamatan Pangandaran dengan Tipe A;
- 9. Kecamatan Sidamulih dengan Tipe A;
- 10. Kecamatan Mangunjaya dengan Tipe B.

1.4.1 Kewenangan Perangkat Daerah dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Pangandaran memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang lokasinya, penggunaanya, manfaat, atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota dan penggunaan





sumber daya yang lebih efisien dilakukan oleh kabupaten/kota. Nomenklatur urusan pemerintahan konkuren meliputi:

- a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi:
 - 1) Pendidikan
 - 2) Kesehatan
 - 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 4) Perumahan
 - 5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 - 6) Sosial
- b. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan non dasar yang meliputi:
 - 1) Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 3) Pangan
 - 4) Lingkungan Hidup
 - 5) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 - 6) Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 7) Perhubungan
 - 8) Komunikasi dan Informatika
 - 9) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - 10) Penanaman Modal
 - 11) Kepemudaan dan Olahraga
 - 12) Kebudayaan dan Pariwisata
 - 13) Perpustakaan
- c. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:
 - 1) Perikanan
 - 2) Pertanian
 - 3) Perdagangan





Di samping hal tersebut juga melaksanakan urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.4.2 Sumberdaya Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dilihat dari aspek Sumber daya aparatur (PNS), Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah di Kabupaten Pangandaran pada adalah sebanyak 3.570 orang. Jumlah tersebut terdiri atas Golongan I sebanyak 15 orang, golongan II sebanyak 403 orang, golongan III sebanyak 1.353 orang dan golongan IV sebanyak 1.799 orang. Jumlah tersebut tersebar di 34 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Untuk lebih jelasnya jumlah PNS Daerah di Kabupaten Pangandaran berdasarkan golongan dan Eselon dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 10 Data Pegawai Pemerintah Kabupaten Pangandaran Berdasarkan Tingkat Eselon

No	Dinas/Instansi	Jumlah			Esc	elon T	erisi			Jumlah	Belum
NO	Dinas/instansi	Eselon	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.A	IV.B	V.A	Terisi	Terisi
1	Sekretariat Daerah	43	1	5	9	-	22	-	-	37	6
2	Sekretariat DPRD	13	-	1	3	-	9	-	-	13	-
3	Inspektorat	7	1	1	4	-	2	-	-	7	-
4	BPKD	24	-	1	1	5	16	-	-	23	1
5	Disdukcapil	16	-	1	1	3	10	-	-	15	1
6	Disub	10	-	1	1	2	6	-	-	10	-
7	Disparibud	21	-	1	1	4	13	1	-	20	1
8	DKPKP	12	-	1	1	2	8	-	-	12	-
9	Dinas Kesehatan	55	-	11	1	4	32	15	-	53	2
10	Disdikpora	39	-	1	1	3	23	10	-	38	1





NT -	Dina a /I mata mai	Jumlah			Es	elon T	erisi			Jumlah	Belum
No	Dinas/Instansi	Eselon	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.A	IV.B	V.A	Terisi	Terisi
11	BAPPEDA	17	1	1	1	4	11	-	-	13	-
12	DPMPTSPK UMKM & Perdagangan	17	-	1	1	4	10	-	_	16	1
13	DKBP3A	23	ı	1	1	3	8	9	-	22	1
14	DLHK	14	-	1	1	3	9	-	-	14	-
15	DPKPB	10	-	1	-	2	6	-	-	9	1
16	DISPUTRPRKP	18	-	1	1	4	9	1	-	16	2
17	DISKOMINSTA	10	-	1	1	2	6	-	-	10	-
18	DISNAKERTRANS	10	-	1	1	2	6	-	-	10	-
19	DISPUSIP	13	-	1	1	3	8	-	-	13	-
20	Dinas Pertanian	20	-	1	1	5	12	-	-	19	1
21	DINSOSPEMDES	13	-	1	1	3	8	-	-	13	-
22	BKPSDM	11	-	1	1	2	7	-	-	11	-
23	Kesbangpol	4	-	-	1	-	3	-	-	4	-
24	Satpol PP	10	-	1	1	2	6	-	-	10	-
25	Kecamatan CIgugur	4	-	-	1	1	3	2	-	7	1
26	Kecamatan Cijulang	10	-	-	1	1	3	2	-	7	-
27	Kecamatan Cimerak	7	-	-	1	1	3	2	-	7	-
28	Kecamatan Kalipucang	7	-	-	1	1	3	2	-	7	-
29	Kecamatan Langkaplancar	7	-	-	1	1	3	2	-	7	-
30	Kecamatan Mangunjaya	7	1	-	1	-	3	2	_	7	-
31	Kecamatan Padaherang	7	-	-	1	1	3	2	_	7	-





No	Dinas/Instansi	Jumlah			Es	elon T	erisi			Jumlah	Belum
140	Dinas/instansi	Eselon	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.A	IV.B	V.A	Terisi	Terisi
32	Kecamatan Pangandaran	7	-	-	1	1	3	2	-	7	1
33	Kecamatan Parigi	7	-	-	1	1	3	2	-	7	-
34	Kecamatan Sidamulih	7	-	-	1	1	3	2	-	7	-
	Jumlah	500	1	27	46	71	281	56	-	482	18

Sumber: RPJMD Perubahan Kabupaten Pangandaran 2016-2021

1.4.3 Sumberdaya Keuangan

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, yang meliputi: anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan untuk masa satu tahun anggaran. Berdasarkan hasil dari model-model proyeksi pendapatan yang dikembangkan pada dokumen RPJMD, maka didapatkan hasil proyeksi komponen pendapatan APBD Kabupaten Pangandaran periode 2016 – 2021 seperti pada tabel di bawah ini. Proyeksi komponen APBD ini berasumsi bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran selama periode proyeksi adalah sebesar 4,59% yang didapat dari kecenderungan rata-rata pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2011.

Tabel 1. 11 Proyeksi Komponen Pendapatan APBD Kabupaten
Pangandaran 2016-2021

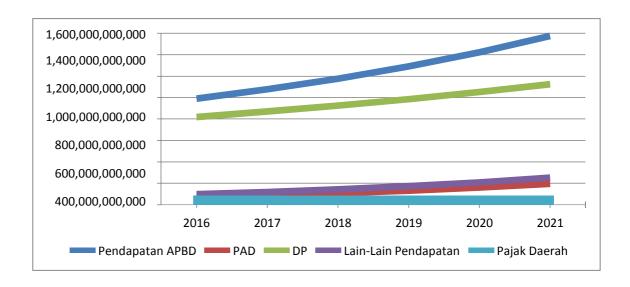
Tahun	Pendapatan APBD	PAD	DP	Lain-Lain	Pajak Daerah
				Pendapatan	
2016	990,617,174,143	72,590,179,990	819,460,016,040	98,566,978,113	31,851,650,185
2017	1,077,647,884,635	88,664,108,167	869,929,728,452	119,054,048,016	35,577,519,706
2018	1,177,191,870,903	108,297,349,285	925,095,182,119	143,799,339,499	39,739,225,474





2019	1,291,462,891,843	132,278,055,964	985,496,915,267	173,687,920,612	44,387,749,745
2020	1,423,106,520,432	161,568,904,551	1,051,748,795,769	209,788,820,113	49,580,038,462
2021	1,575,288,394,030	197,345,740,587	1,124,549,389,886	253,393,263,557	55,379,698,858

Gambar 1. 8 Proyeksi Komponen Pendapatan APBD Kabupaten
Pangandaran 2016-2021



Berdasarkan nilai proyeksi yang didapat, diketahui bahwa jika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran adalah sebesar 4,59% maka laju pertumbuhan pendapatan PAD Kabupaten Pangandaran akan sebesar 22,14% per tahun (yang didapat dari perkalian antara pertumbuhan ekonomi dengan koefisien regresi model pendapatan PAD, sebesar 4,81). Nilai proyeksi pendapatan PAD yang didapat adalah sebesar Rp. 197,34 Milyar di tahun 2021.

Pendapatan PAD akan mempengaruhi besarnya pendapatan Dana Perimbangan yang didapatkan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dari pemerintah pusat. Berdasarkan model regresi Dana Perimbangan didapatkan nilai pendapatan Dana Perimbangan di tahun 2017 sebesar Rp. 869,9 Milyar dan pendapatan Dana Perimbangan di tahun 2021 sebesar Rp. 1.124 Milyar dengan tingkat pertumbuhan pendapatan Dana





Perimbangan sebesar 6,1 % hingga 6,7%.

Dengan menjumlahkan semua komponen PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, maka didapatkan total pendapatan APBD di tahun 2017 sebesar Rp. 1.077 Milyar dengan peningkatan pendapatan yang konsisten, sehingga diperkirakan total pendapatan APBD Kabupaten Pangandaran di tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.575 Milyar.

Struktur APBD Kabupaten Pangandaran diperkirakan terus mengalami perbaikan, terutama jika dilihat dari sisi kemandirian daerah. Kontribusi PAD terhadap pendapatan APBD terus meningkat hampir tiga kali lipatnya, dari sebesar 7,33% di tahun 2016 menjadi sebesar 12,53% di tahun 2021. Sejalan dengan peningkatan kontribusi pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri, ketergantungan terhadap dana dari pusat juga terus dapat dikurangi. Jika di tahun 2016 besaran Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Pangandaran adalah sebesar 82,72% maka di tahun 2021 besaran komponen Dana Perimbangan menurun menjadi sebesar 71,39% saja. Dengan kata lain diperkirakan penetapan Kabupaten Pangandaran sebagai DOB di tahun 2012 merupakan langkah kebijakan pemerintah yang tepat.

Tabel 1. 12 Kontribusi Masing-masing Komponen Penerimaan APBD 2016-2021

Tahun	Pendapatan APBD	PAD	DP	Lain-Lain Pendapatan	Pajak Daerah
2016	100	7.33	82.72	9.95	3.22
2017	100	8.23	80.72	11.05	3.30
2018	100	9.20	78.58	12.22	3.38
2019	100	10.24	76.31	13.45	3.44
2020	100	11.35	73.91	14.74	3.48
2021	100	12.53	71.39	16.09	3.52

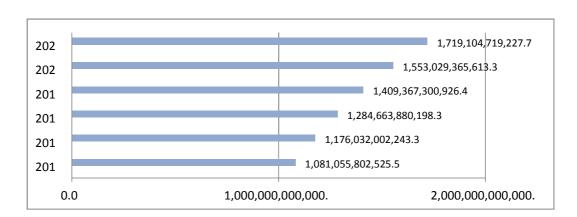
Sumber: Hasil pengolahan





Sementara itu Proyeksi Pengeluaran Daerah pada tahun 2016-2021 menggunakan asumsi bahwa rasio anggaran belanja terhadap penerimaan anggaran dan realisasi belanja terhadap anggaran memiliki kinerja sebagaimana tahun 2014 hingga 2015, maka proyeksi anggaran belanja Kabupaten Pangandaran selama 6 tahun ke depan adalah sebagaimana disajikan dalam Gambar 1.9:

Gambar 1. 9 Proyeksi Pengeluaran Kabupaten Pangandaran 2016-2021







Dengan membagi klasifikasi belanja berdasarkan jenis Belanja Langsung dan Tidak Langsung, maka proyeksi belanja secara detil dapat diilustrasikan dengan Tabel 1.13 berikut ini. Berdasarkan Tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2020, Belanja Pegawai akan menembus angka lebih dari 1 trilyun rupiah atau sekitar 67% dari total belanja Kabupaten Pangandaran pada tahun yang sama. Kebutuhan belanja yang juga tinggi adalah untuk alokasi belanja modal, yang besarnya sekitar 12% dari total anggaran belanja.





Tabel 1. 13 Proyeksi Kebutuhan Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021

	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bel	Belanja	1.221.636.070.935,00	1.248.504.961.682,13	1,275,991,779,077	1,304,111,589,877	1,332,879,857,778	1,362,312,454,938
Bela	Belanja Tidak Langsung	679.318.348.675,00	693.288.230.920,23	707,556,480,023	722,129,924,152	737,015,568,230	752,220,599,374
1.1.	. Belanja Pegawai	508.972.725.768,00	519.152.180,283,36	529,535,223,889	540,125,928,366	550,928,446,934	561,947,015,872
1.2.	. Belanja Subsidi	7.100.000.000,00	7.313.000.000,00	7,532,390,000	7,758,361,700	7,991,112,551	8,230,845,927
1.3.	. Belanja Bunga	1	1	1	1	ı	
1.4.	. Belanja Hibah	5.718.000.000,00	5.918.130.000,00	6,125,264,550	6,339,648,809	6,561,536,517	6,791,190,295
1.5.	. Belanja Bantuan Sosial	3.000.000.000,00	3.150.000.000,00	3,307,500,000	3,472,875,000	3,646,518,750	3,828,844,687
1.6.	. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/	6.224.842.391,00	6.536.084.510,55	6,862,888,736	7,206,033,172	7,566,334,831	7,944,651,573
	Kabupaten/ Kota dan Pemerintah						
	Desa						
1.7.	. Belanja Bantuan Keuangan Kepada	145.802.780.516,00	148.718.836.126,32	151,693,212,848	154,727,077,105	157,821,618,647	160,978,051,020
	Provinsi/Kabupaten/ Kota dan						
	Pemerintahan Desa						
1.8.	. BelanjaTidakTerduga	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000
Bela	Belanja Langsung	542.317.722.260,00	555.216.730.761,90	568,435,299,054	581,981,665,725	595,864,289,548	610,091,855,564
2.1.	. BelanjaPegawai	27.642.596.150,00	28.471.874.034,50	29,326,030,255	30,205,811,163	31,111,985,498	32,045,345,063
2.2.	. BelanjaBarang dan Jasa	177.622.809.519,76	182.951.493.805,35	188,440,038,619	194,093,239,778	199,916,036,971	205,913,518,080
2.3.	. BelanjaModal	337.052.316.590,24	343.793.362.922,05	350,669,230,180	357,682,614,784	364,836,267,079	372,132,992,421





belanja tak terduga dan belanja transfer diperoleh gambaran bahwa secara umum proyeksi belanja operasi akan memiliki kisaran porsi 88%. Di dalam belanja operasi tersebut, porsi belanja pegawai masih merupakan yang terbesar, yaitu sekitar 79% dari keseluruhan belanja operasi. Detail mengenai alokasi anggaran belanja tersebut Dengan membagi anggaran belanja ke dalam empat pos utama, yaitu belanja operasi, belanja modal, ditampilkan pada Tabel 1.14:

Tabel 1. 14 Detil Proyeksi Kebutuhan Anggaran untuk Belanja Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total Belanja	1,221,636,070,934	1,248,504,961,680	1,275,991,779,077	1,304,111,589,87	1,332,879,857,77	1,221,636,070,934 1,248,504,961,680 1,275,991,779,077 1,304,111,589,87 1,332,879,857,77 1,362,312,454,938.0
	00.	00.	00.	7.00	8.00	0
Belanja Operasi	875,858,911,953	895,675,514,248	915,959,660,161	936,722,941,921	957,977,255,868	979,734,810,944
Belanja Pegawai	536,615,321,918	547,624,054,317	558,861,254,144	570,331,739,529	582,040,432,432	593,992,360,935
Belanja Barang dan Jasa	177,622,809,519	182,951,493,805	188,440,038,619	194,093,239,778	199,916,036,971	205,913,518,080
Belanja Bunga	1	1	1	-	1	1
Belanja Subsidi	7,100,000,000	7,313,000,000	7,532,390,000	7,758,361,700	7,991,112,551	8,230,845,927
Belanja Hibah	5,718,000,000	5,918,130,000	6,125,264,550	6,339,648,809	6,561,536,517	6,791,190,295
Belanja Bantuan Sosial	3,000,000,000	3,150,000,000	3,307,500,000	3,472,875,000	3,646,518,750	3,828,844,687
Belanja Bantuan Keuangan	145,802,780,516	148,718,836,126	151,693,212,848	154,727,077,105	157,821,618,647	160,978,051,020
Belanja Modal	337,052,316,590	343,793,362,922	350,669,230,180	357,682,614,784	364,836,267,079	372, 132, 992, 421
Belanja Tanah	1	-	-	_	1	1





Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Peralatan dan Mesin	-	1	1	-	ı	1
Belanja Gedung dan			1	1	1	1
Bangunan						
Belanja Jalan, Irigasi dan	-	1	1	-	-	1
Jaringan						
Belanja Aset Lainnya	1	1	ı	1	1	1
Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000
Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000
Belanja Transfer	6,224,842,391	6,536,084,510	6,862,888,736	7,206,033,172	7,566,334,831	7,944,651,573
Belanja Bagi Hasil	6,224,842,391	6,536,084,510	6,862,888,736	7,206,033,172	7,566,334,831	7,944,651,573

trilyun rupiah, atau hampir 2 kali lipat dari anggaran saat ini. Diantara belanja tersebut, belanja tidak langsung Sehubungan dengan belanja yang bersifat periodik mengikat serta prioritas daerah, Tabel 1.15 berikut ini memberikan gambaran proyeksi, dimana pada tahun 2021, anggaran dimaksud akan menembus angka di atas 1 mengalami peningkatan yang progresif, dengan pertambahan anggaran minimal 9 persen per tahun.





Tabel 1. 15 Proyeksi Anggaran untuk Belanja Periodik Wajib Mengikat dan Prioritas Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021

No.	Uraia	201	201	201	201	202	202	
	u	ø	7	œ	6	0	1	
A. B	A. Belanja Tidak Langsung	480,905,197,86	523,155,142,78	571,479,784,90	626,953,816,01	690,861,556,46	764,739,797,16	
		4.06	9.17	3.12	1.88	2.60	69.9	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	444,279,302,729	483,311,478,208	527,955,699,976	579,204,810,965	638,245,317,273 706,496,967,309	706,496,967,309	
		.26	.01	.42	.55	.01	.91	
2	Belanja Penerimaan Pimpinan	3,531,698,845.8	3,841,976,385.7	4,196,865,631.1	4,604,258,964.6	5,073,588,250.7	5,616,139,461.6	
	& DPRD serta Operasional	9	8	6	9	7	IJ	
	KDh/WkDh							
3	Belanja Bunga							
4	Belanja Subsidi							
5	Belanja Hibah	24,387,473,767.	26,530,036,227.	28,980,656,322.	31,793,833,398.	35,034,697,400.	38,781,181,457.	
		09	15	28	92	20	26	
9	Bantuan Sosial	8,689,816,053	9,453,260,182	10,326,472,309	11,328,871,801	12,483,665,950	13,818,624,119	
7	Bantuan Keuangan kepada							
	Parpol							
8	Belanja Tidak Terduga	16,906,468	18,391,786	20,090,664	22,040,882	24,287,591	26,884,819	
B. B	Belanja Langsung	138,691,090,88	150,875,802,08	164,812,431,09	180,810,914,63	199,241,645,42	220,547,827,68	



		ဧ	D	4	0	4	4
П	Belanja Hononarium PNS	18,543,082,446	20,172,185,678	22,035,521,377	24,174,528,268	26,638,728,084	29,487,377,495
	khusus Gurudan Tengah Medis						
7	Belanja Honorarium Non-PNS	1,959,555,831	2,131,712,685	2,328,622,252	2,554,663,604	2,815,069,992	3,116,103,414
	Lainnya						
3	Belanja Barang Dana BOS	75,805,446,857	82,465,337,349	90,082,786,913	98,827,200,023	108,901,025,060	120,546,507,526
4	Belanja Makanan dan Minuman	11,604,807,699	12,624,348,532	13,790,478,949	15,129,132,526	16,671,301,423	18,454,070,210
വ	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS						
9	Belanja Jasa Kantor (tagihan	5,120,178,325	5,570,011,792	6,084,522,316	6,675,152,097	7,355,575,242	8,142,153,904
	listrik, air, telepon dan						
	sejenisnya)						
7	Belanja jasa Tenaga Kerja	22,291,093,177	24,249,478,038	26,489,439,479	29,060,792,007	32,023,066,908	35,447,498,073
∞	Belanja sewa gedung kantor	2,097,324,575	2,281,585,107	2,492,338,619	2,734,272,059	3,012,986,606	3,335,184,516
6	Belanja sewa peralatan kantor	1,269,601,974	1,381,142,905	1,508,721,191	1,655,174,046	1,823,892,109	2,018,932,547
ပ	C. Biaya Pengeluaran	1	ı	1	1	1	
Н	Pembentukan Dana Cadangan	1	ı	1	1	1	
7	Pembayaran Pokok Utang dst	1	ı	1	ı	1	
3	Penyertaan Modal	1	ı	ı	1	1	
Ţ	TOTAL	619,596,288,74	674,030,944,87	736,292,215,99	807,764,730,64	890,103,201,89	985,287,624,85
		7	4	∞	61	0	1





1.5 Isu Strategis

strategis adalah kondisi atau hal harus yang diperhatikan dikedepankan atau dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Beberapa isu strategis yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021 menggunakan analisis SWOT adalah

1. Kekuatan

- a. Kabupaten Pangandaran memiliki Daerah Tujuan Wisata
 (DTW) yang bervariasi.
- b. Garis pantai yang panjang yang bisa melihat terbit dan tenggelamnya matahari dari tempat yang sama.
- c. Aktivitas pariwisata tersebar merata di seluruh kecamatan dan bisa menjadi *leading sector* karena memiliki keterkaitan ekonomi kebelakang maupun kedepan yang besar.
- d. Sector Pariwisata dipercaya bisa *sustainable* karena bisa diterima oleh kondisi masyarakat dan sesuai dengan kondisi lingkungan.

2. Kelemahan

- a. Kebijakan pembangunan di daerah belum terakomodasi dengan sempurna.
- b. RTRW kabupaten Pangandaran belum disahkan, sehingga berbagai regulasi yang terkait dengan proses penataan ruang belum terimplementasikan.
- c. Masih terdapat kondisi infrastruktur dasar yang belum baik, terutama jalan, yang menyebabkan aksesibilitas ke





- Sebagian wilayah dirasakan sulit serta menghambat konektivitas dan pengembangan pembangunan secara inklusif.
- d. SDM Kabupaten Pangandaran perlu ditingkatkan agar mampu menciptakan manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing sehingga mampu mendorong pembangunan yang efisien dan efektif serta berkelanjutan.
- e. Program kemitraan dengan masyarakat local masih kurang dilaksanakan dalam industry pariwisata.

3. Peluang

- a. Dalam RTRW Jabar, Pangandaran sebagai Kawasan Andalan Nasional dengan pertanian, industry, perkebunan, pariwisata dan perikanan, pariwisata sebagai sector unggulan.
- b. Pangandaran sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Pusat Pertumbuhan jabar.
- c. Implementasi MEA memberikan peluang pasar di regional dan internasional yang tinggi terhadap DTW pangandaran.
- d. Adanya Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mendorong aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Pangandaran.
- e. Rencana Pembangunan Infrastruktur dalam RPJMN 2015-2019 dan Kerjasama Perguruan Tinggi membuka peluang perubahan dari DTW menjadi Pusat Pariwisata.

4. Ancaman

- a. Globalisasi membuat produk impor mudah masuk, sementara aktivitas perekonomian masyarakat dirasa belum mampu untuk bersaing.
- b. Kemudahan akses teknologi informasi, komunikasi dan modernisasi bisa menyebabkan berubahnya nilai-nilai social budaya dan kearifan local masyarakat di Kabupaten Pangandaran.





- c. Kondisi geografi Kabupaten Pangandaran secara alamiah berada pada daerah rawan akan bencana.
- d. DTW yang aktivitas pariwisatanya sudah berkembang berkorelasi dengan penurunan kualitas lingkungan di DTW tersebut, yang tidak menjamin keberlangsungan pembangunan wisata yang berkelanjutan.
- e. Ketidakstabilan perekonomian dunia memengaruhi kedatangan wisatawan mancanegara maupun domestic di Kabupaten Pangandaran.

Strategi SO ditujukan untuk memanfaatkan kekuatan internal daerah agar dapat menarik keuntungan dari peluang eksternal yang mampu diambil oleh daerah. Strategi SO yang diusulkan dari analisis internal dan eksternal diantaranya adalah:

- 1. Pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran mampu mewujudkan tingkat pelayanan yang lebih baik terkait dengan pengembangan sektor –sektor yang merupakan aktivitas kegiatan masyarakat terbesar, yaitu sektor pertanian, industri, perkebunan, pariwisata dan perikanan
- 2. Kondisi DTW yang ada, mampu menjadikan Kabupaten Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata yang berskala internasional sejajar dengan daerah tujuan wisata internasional lain di Indonesia.
- 3. Mendorong kedewasaan dan kreatifitas ekonomi yang lebih besar, yang bisa dijadikan dasar untuk tumbuh dan berkembangnya perekonomian kabupaten secara berkesinambungan dimasa yang akan datang, karena memiliki keterkaitan yang erat baik keterkaitan ke depan maupun keterkaitan kebelakang.
- 4. Pembangunan parisiwata berkelanjutan di Kabupaten Pangandaran akan tercipta dengan adanya dukungan





dan kerjasama yang lebih baik tidak hanya dengan masyarakat pangandaran akan tetapi dengan pemerintah regional maupun nasional, maupun kerjasama dengan kementrian dan perguruan tinggi – bahkan kerjasama dengan luar negeri.

Strategi WO, bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal daerah dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal yang dapat diraihnya. . Strategi WO yang diusulkan dari analisis internal dan eksternal diantaranya adalah:

- 1. Agar dapat menangkap peluang sebagai daerah kawasan strategis pariwisata nasional dan juga sebagai daerah tujuan pariwisata skala internasional maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran harus mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani.
- 2. Kemajuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan membutuhkan kepastian regulasi pengelolaan ruang dan lingkungan yang baik hingga ke tingkat yang lebih detail (zonasi). Oleh karenanya Pemerintah Daerah kabupaten Pangandaran harus segera membuat rencana ruang hingga ketingkat detail, agar mampu mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan
- 3. Implementasi MEA bisa meningkatkan peluang Kabupaten Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata kelas dunia. Kondisi ini hanya akan mampu diwujudkan dengan adanya dukungan pembangunan sarana dan prasarana pendukung parawisata yang memadai dan juga pembangunan sumberdaya manusia yang sesuai dengan persyaratan daerah tujuanwisata kelas dunia.





4. Peningkatan perekonomian daerah yang inklusif melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan industri untuk mendorong aktivitas pariwisata dilakukan dengan meningkatkan kemitraan antara industri pariwisata dengan masyarakat local

Strategi ST, bertujuan untuk menggunakan kekuatan yang ada di daerah untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal yang akan dihadapinya. Strategi ST yang diusulkan dari analisis internal dan eksternal yang telah dilakukan diantaranya adalah:

- 1. Semangat untuk melayani masyarakat akan bisa mewujudkan kabupaten Pangandaran sebagai tempat pariwisata yang responsif terhadap potensi bencana yang mungkin terjadi dan mampu menjaga lingkunganan agar dapat mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.
- 2. Keistimewaan DTW Kabupaten Pangandaran, baik dari variasinya sebaran lokasi, maupun dukungan masyarakat nya, mampu dijadikan dasar untuk menjadi daya tarik wisatawan - baik asing maupun domestik datang ke daerah ini meskipun pada kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil.
- 3. Sektor Pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Pangandaran didukung tidak saja oleh keindahan alam tetapi juga oleh keistimewaan budaya masyarakatnya diyakini bisa mencegah degradasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokas masyarakat.
- 4. Keterkaitan yang besar antara aktivitas pariwisata dengan sektor- sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Pangandaran menjadi ciri khas perekonomian Kabupaten Pangandaran yang mampu bersaing dengan produkproduk impor yang masuk akibat meningkatnya





globalisasi ekonomi di kawasan ASEAN.

Strategi WT, merupakan bentuk dari strategi defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal yang ada dan akan dihadapi oleh daerah. Strategi WT yang diusulkan dari analisis internal dan eksternal yang telah dilakukan diantaranya adalah

- 1. Hal yang perlu dihindari oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah terhambatnya upaya untuk melakukan proses reformasi birokrasi pemerintah. Kondisi ini akan berdampak pada aktivitas andalan daerah yaitu pariwisata berupa penanganan yang lambat terhadap potensi bencana sehingga memperkecil terwujudnya sustainable tourism, hilangnya dukungan masyarakat terhadap pemerintah, serta terkikisnya budaya dan kearifan lokal. Apabila hal ini terjadi maka pariwisata di Kabupaten Pangandaran akan ditinggalkan oleh para wisatawan baik dari domestik maupun wisatawan mancanegara.
- 2. Sustainable tourism hanya akan bisa terwujud jika Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran mampu meningkatkan penegakkan regulasi (law enforcement) di bidang tata ruang.
- Peningkatan infrastruktur secara umum dan inftrastruktur pariwisata secara khusus dan juga peningkatan sumberdaya manusia akan meningkatkan daya saing pariwisata Kabupaten Pangandaran, sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan – baik domestik maupun mancanegara.
- 4. Social acceptabel dari aktivitas pariwisata menjadi prasyarat bagi terwujudnya pariwisata yang berkelanjutan akan tercipta apabila ada kemitraan





antara masyarakat dengan para pelaku di industri pariwisata

1.6 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembanguan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;





- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 34A Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021
- 17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

1.7 Sistematika Penyusunan LKJiP

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 mengkomunikasikan pencapaian kinerja selama tahun 2021. pemerintah Capaian kineria (Performance Result) 2021 tersebut diperoleh dari perbandingan atas hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah setiap tahun terhadap rencana kinerja





(*Performance Plan*) 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini menguraikan keberhasilan, hambatan, dan permasalahan sehingga memungkinkan diidentifikasikan sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Berdasarkan pola pikir tersebut, sistematika penyajuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum Kabupaten Pangandaran, maksud dan tujuan penyusunan LKJIP, Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Dasar Hukum Penyusunan LKJIP dan dan Sistematika Penyajian LKJIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan muatan RPJMD untuk periode Tahun 2016-2021, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, program prioritas pembangunan daerah dan indikator target sasaran prioritas pembangunan tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan kerangka pengukuran dan evaluasi kinerja, pengukuran capaian hasil kinerja pemerintah tahun 2021, evaluasi dan analisis capaian kinerja Kabupaten Pangandaran serta penjabaran akuntabilitas keungan.





BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kabupaten Kinerja Instansi Pemerintah Pangandaran Tahun 2021, capaian kinerja serta permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya-upaya penyelesaianya dan langkah dalam solusi perbaikan kinerja serta penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.





BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan akan dan program yang disampaikan oleh kepala daerah (Bupati). Perencanaan strategis Kabupaten Pangandaran dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021. RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, dan kebijakan, program, serta kebijakan pembangunan daerah. RPJMD dalam substansinya memuat berbagai macam isu-isu strategis baik nasional maupun internasional, namun secara sistematis lebih berfokus memuat isu-isu lokal yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang efektif, fokus, dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan daerah.

Pada kurun waktu perencanaan tahun 2016-2021, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disahkan sehingga membawa konsekuensi adanya peralihan beberapa urusan pemerintahan di daerah menjadi urusan pemerintahan di provinsi, antara lain pengelolaan pendidikan menengah dan urusan kehutanan. Selain itu, terjadi pula perubahan kebijakan di tingkat nasional dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat





Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan pemerintah tersebut memberikan konsekuensi terhadap harus dilakukannya perubahan kelembagaan perangkat daerah di semua daerah. Sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah. Demikian pula di Kabupaten Pangadaran telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran. Sehingga Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran mengalami perubahan.

2.1.1 Visi

Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran telah membuat visi Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021berdasarkan pada kondisi Kabupaten Pangandaran yang dapat dilihat dari peluang, tantangan, serta isu strategis yang akan dihadapi selama 5 (lima) tahun, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.A Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Adapun visi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021adalah:

"Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia"

Guna mengimplementasikan visi tersebut secara operasional, maka diperlukan penjabaran pada pokok-pokok visi berdasarkan penjelasannya. Adapun pokok-pokok visi Pemerintah Kabupaten Pangandaran berdasarkan penjelasannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Pokok-Pokok Visi dan Penjelasannya





Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan
"Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan	Kabupaten Pangandaran	Mencakup wilayah Kabupaten Pangandaran sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, beserta segenap isinya. Artinya Kabupaten Pangandaran dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 2012 hingga sekarang
Wisata Berkelas Dunia"	Tujuan Wisata	Adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas wisata, aksesibilitas dan masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Simpul-simpul kegiatan pariwisata eksisting maupun simpul-simpul baru yang berpotensi untuk dikembangkan akan ditata secara terpadu membentuk suatu kawasan pariwisata





Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan
		dengan menonjolkan kekhasan
		potensinya masing-masing.





Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjelasan
VISI	Visi Berkelas Dunia	Terpenuhinya standar kualitas yang tinggi dalam penyediaan infrastruktur, fasilitas dan penataan lingkungan alami. Standar kualitas yang tinggi juga diterapkan dalam pembinaan pelaku wisata dan masyarakat sehingga mewujudkan pelayanan wisata yang berkualitas (merujuk standar UNWTO dan GSTC).

Sumber: RPJMD Perubahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021

2.1.2 Misi

Rumusan misi merupakan penggambaran arah menuju visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten





Pangandaran Tahun 2021-2026, maka ditetapkan 6 (lima) misi yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani. Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang profesional dan sistem modern berbasis IPTEK menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

2. Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan

Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan berwawasan ruang yang lingkungan. Dimaksudkan untuk menciptakan keharmonisan dalam penataan lingkungan melalui pembangunan dengan mempertimbangkan kelestarian alam serta memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Pembudidayaan kawasan diarahkan untuk tetap menjaga kesetimbangan ekologis guna terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

3. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas

Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga Kabupaten Pangandaran melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas. Infrastruktur mencakup jaringan jalan, drainase, sewerage, dan lain lain yang memenuhi standar tinggi sebagai dukungan langsung terhadap terciptanya kawasan wisata yang berkelas dunia.





Pembangunan insfrastruktur juga diarahkan untuk membuka wilayah-wilayah baru, untuk menghubungkan antar objek wisata serta untuk menyediakan jalan alternatif bagi jalan yang sudah ada. Untuk memenuhi standar kualitas yang mampu mewujudkan kepariwisataan berkelas dunia, sudah diperlukan barang tentu juga dukungan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna membentuk sistem infrastruktur yang cerdas. Terciptanya sistem infrastruktur cerdas, sistem pemerintahan cerdas, sistem ekonomi cerdas, sistem masyarakat cerdas, sistem hidup cerdas serta sistem lingkungan cerdas diharapkan bersama-sama akan mewujudkan Pangandaran Kabupaten Cerdas.

4. Memperkuat katahanan nilai-nilai kearifan lokal

kearifan lokal. Memperkuat katahanan nilai-nilai Dimaksudkan untuk melestarikan tradisi dan budaya lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Nilai nilai kearifan lokal merupakan warisan budaya yang terbentuk melalui proses interaksi antar manusia dan manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan yang dipengaruhi oleh pandangan, sikap dan perilaku. Nilai nilai kearifan lokal berorientasi pada keseimbangan, kelestarian dan harmoni manusia, alam, dan budaya. Dalam era globalisasi saat ini, banyak ditemui ancaman global yang akan berdampak terhadap krisis nilai nilai kearifan lokal, sehingga upaya-upaya penguatan ketahanannya perlu dilakukan.

Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing

Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. Dimaksudkan untuk mewujudkan warga Kabupaten Pangandaran yang sehat, cerdas, dan berbudaya yang bercirikan meningkatnya ketahanan keluarga,





menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga dan lain-lain. Melalui misi ini Kabupaten Pangandaran juga dibangun mempunyai keahlian, profesional, produktif dan mandiri serta meningkatkan keunggulan kompetitifnya dapat sehingga mampu menangkap kesempatan kerja dan atau mengembangkan kewirausahan sehingga dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran dan juga diarahkan untuk terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia dan mampu bersaing di era globalisasi.

6. Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan

Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan, mengembangkan sistem pembiayaan daerah terpadu. Misi dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 tersebut mengacu pada RPJPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025, sehingga terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJPD dengan Misi dalam RPJMD sebagaimana tabel berikut ini.





Tabel 5.2 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 dengan Misi RPJPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025

MISI RPJMD 2016 - 2021	MISI RPJPD 2016 – 2025
Misi 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani	Misi 1: Menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan bersih
Misi 2: Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan	Misi 4: Mewujudkan pemanfaatan ruang dan penyediaan infrastruktur fasilitas yang berwawasan lingkungan
Misi 3: Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas	Misi 4: Mewujudkan pemanfaatan ruang dan penyediaan infrastruktur fasilitas yang berwawasan lingkungan Misi 3: Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing
Misi 4: Memperkuat katahanan nilai-nilai kearifan lokal	Misi 2: Membangun SDM yang berkualitas, mandiri dan religius Misi 5: Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang bertumpu pada nilai religius dan kearifan lokal
Misi 5: Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dn berdaya saing	Misi 2: Membangun SDM yang berkualitas, mandiri dan religius Misi 5: Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang bertumpu pada nilai religius dan kearifan lokal
Misi 6: Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan	Misi 3: Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing Misi 6: Menciptakan pembiayaan pembangunan daerah yang kolaboratif

Sumber: RPJMD Perubahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021





2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Visi misi yang telah tersusun diuraikan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun. Tujuan dan sasaran merupakan tahapan perumusan pada sasaran yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi. Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 Tujuan yang telah diuraikan yaitu sebagai berikut:

2.1.3.1. Tujuan dan sasaran Misi-1

Dalam rangka pencapaian misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Reformasi Birokrasi, dengan sasaran pembangunan adalah Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel, dengan sasaran pembangunan adalah:
- 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- 2) Birokrasi yang efektif dan efisien;
- 3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas;

2.1.3.2. Tujuan dan sasaran Misi-2

Dalam rangka pencapaian misi Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Terciptanya Ruang Wilayah Kabupaten yang harmonis dan berwawasan lingkungan, dengan sasaran pembangunan adalah :
- 1) Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah;
- 2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

2.1.3.3 Tujuan dan sasaran Misi-3

Dalam rangka pencapaian misi Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas, maka tujuan





pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur yang berkualitas, dengan sasaran pembangunan adalah :
 - Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas;
- b. Meningkatnya Mitigasi bencana dalam pembangunan, dengan sasaranpembangunan adalah :
 - Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
- c. Terwujudnya sarana dan prasarana pusat pemerintahan, dengan sasaranpembangunan adalah :
 - Mewujudkan pemenuhan bangunan pusat pemerintahan.

2.1.3.3. Tujuan dan sasaran Misi-4

Dalam rangka pencapaian misi Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pelestarian seni budaya dan pengamalan nilainilai keagamaan adalah :
- Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan;
- 2) Meningkatnya Kesatuan Bangsa;
- 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi.

2.1.3.4. Tujuan dan sasaran Misi-5

Dalam rangka pencapaian misi Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan daya beli masyarakat secara berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan adalah:
- 1) Meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli





masyarakat.

- b. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk, dengan sasaran pembangunan adalah :
- 1) Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk.
- c. Meningkatnya pengarusutamaan Gender, dengan sasaran pembangunan adalah :
- 1) Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender.
- d. Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga, dengan sasaran pembangunan adalah :
- 1) Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga
- e. Menurunnya tingkat kemiskinan, dengan sasaran pembangunan adalah :
- 1) Menurunnya angka kemiskinan

2.1.3.5. Tujuan dan sasaran Misi-6

Dalam rangka pencapaian misi Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan adalah :
- 1) Menurunnya kesenjangan antar wilayah;
- 2) Menurunnya tingkat pengangguran;
- 3) Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan;





Tabel 2.2 Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pangandaran

Target Kinerja pada Akhir Periode	AFOIM D	13		WTP	3	3	BB
	2021	12		WTP	3	8	BB
Target Kinerja	2020	11		WTP	3	3	В
Та	2019	01		МТР	2	2	В
Kinerja pada Awal Periode RPJMD Perubahan	2018	6	ni	WTP	2	7	CC
Satuan		ល	ih dan melaya	Status Laporan	Skor	Skor	Nilai
Indikator Sasaran		4	g akuntabel, bers	Opini BPK terhadap LKPD	Tingkat Kapabilitas APIP (1 s/d 5)	Tingkat Kematangan implementasi SPIP (1 s/d 5)	Nilai AKIP
Sasaran		ε	emerintahan yang		1. Birokrasi	akuntabel	
Indikator Tujuan		2	an tata kelola p		Indeks Reformasi Birolznasi	Target kinerja = Indeks 60	
Tujuan		1	Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani		Terwujudnya Peformogi	Birokrasi	



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja pada Awal Periode RPJMD Perubahan	Та	Target Kinerja	егја	Target Kinerja pada Akhir Periode
					2018	2019	2020	2021	NF OIME
			Persentase Penggunaan E-Procurement thd Belanja Pengadaan	Persen	85	87	88	90	06
			Indeks Profesionalitas ASN (1 s/d 100)	Skor	55	09	65	02	70
		2. Birokrasi yang efektif dan efisien	Tingkat Kematangan E-Government (0 s/d 5)	Indeks	1	2	2,25	3	8
			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	40	45	55	09	09
		3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang	Cakupan Zona Integritas Daerah (0 s/d 10)	Persen	0	30	50	80	80
		berkualitas	Survey	Predikat	Cukup	Baik	Baik	Sangat	Sangat





Target Kinerja pada Akhir Periode		Baik	ıgan	40	63,36	
ırja	2021	Baik	n lingkun	40	63,36	
Target Kinerja	2020		rwawasa	30	62,91	
Ta	2019		yang be	20	62,46	as
Kinerja pada Awal Periode RPJMD Perubahan	2018		aatan ruang	10	61,5	ng berkualit
Satuan			dalian pemanf	persen	Indeks	lan fasilitas ya
Indikator Sasaran		Kepuasan Masyarakat	onis dan pengen	Ketaatan terhadap RTRW	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	n infrastruktur d
Sasaran			Misi 2 :Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan	1.Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah	2.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Misi 3: Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas
Indikator Tujuan			udkan penataan	Ketaatan terhadap RTRW Target kinerja : 40%	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Target kinerja: Indeks 63,36	Mis
Tujuan			Misi 2 :Mewuj	Terciptanya Ruang Wilayah Kabupaten vang	harmonis dan berwawasan lingkungan	





Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja pada Awal Periode RPJMD Perubahan	Ta	Target Kinerja	erja	Target Kinerja pada Akhir Periode
					2018	2019	2020	2021	KFJMD
			Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	60	65	75	85	85
		, – –	Tingkat kecelakaan lalu lintas	Orang/Sejuta Km Kendaraan per Tahun	0,033	0,032	0,031	0,029	0,029
Persentase 1.Meningkatnya infrastruktur ketersediaan dalam kondisi Infrastruktur imantap = 95% yang berkualias	1.Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur yang berkualias	7 7 7	Rasio jaringan rigasi teknis 1alam kondisi 2aik	Rasio	55	09	65	70	70
			Persentase Rumah Tangga Dengan Akses air minum	Persen	50	55	65	75	75





Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja pada Awal Periode RPJMD	T,	Target Kinerja	erja	Target Kinerja pada Akhir Periode
					2018	2019	2020	2021	KFJMD
			Indeks Resiko Sanitasi	Indeks	40	38	36	34	34
2. Meningkatnya Mitigasi bencana dalam pembangunan.	Indeks Risiko Bencana Target kinerja = Indeks 140	2. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	155	150,6	145	140	140
3. Terwujudnya sarana dan prasarana pusat pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi Target kinerja = 80	3. Mewujudkan pemenuhan bangunan pusat pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuh	Persen	ιν	18	22	80	80
		Misi 4 : Mempe	Misi 4 : Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal	nilai-nilai kea	rifan lokal				



Target Kinerja pada Akhir Periode	NFO WID	80	06	∞
erja	2021	80	06	8
Target Kinerja	2020	02	85	10
Ta	2019	35	22	11
Kinerja pada Awal Periode RPJMD Perubahan	2018	25	70	12
Satuan		Persen	Persen	Angka
Indikator Sasaran		Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal	Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik	Angka Konfilk Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan
Sasaran		1. Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam	kebudayaan dan keagamaan	2.Meningkatnya Kesatuan Bangsa
Indikator Tujuan		Angka Konfilk Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan Target kinerja = 8		
Tujuan		Terwujudnya	pelestarian seni budaya, pengamalan nilai- nilai kebangsaan dan keagamaan	



Target Kinerja pada Akhir Periode	RFJMD	82%		67,42
iți	2021	82%		67,42
Target Kinerja	2020	81,50%	saing	67,12
Та	2019	81%	erdaya	66,82
Kinerja pada Awal Periode RPJMD Perubahan	2018	%0;20%	ıalitas dan b	66.42
Satuan		Persen	mandiri, berkı	Indeks
Indikator Sasaran		Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	a manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sasaran		3Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi	Misi 5: Membangun sumberdaya	1.Meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat
Indikator Tujuan			Misi 5: Memb	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Target kinerja = indeks 67,42
Tujuan				1. Meningkatnya kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan daya beli masyarakat secara berkelanjutan



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja pada Awal Periode RPJMD Perubahan	Ta	Target Kinerja	ərja	Target Kinerja pada Akhir Periode
					2018	2019	2020	2021	KFJMD
2. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Target kinerja = 0,57%	2.Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
3. Meningkatnya pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Target kinerja = indeks 66,55	3. Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Indeks	65,67	65,67	66,55	66,55	66,55
4. Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga	Indeks Pembangunan Keolahragaan Target kinerja	4. Meningkatnya Daya Saing Pemuda &	Indeks Pembangunan Kepemudaan	Indeks	0,24	0,25	0,26	0,27	0,27





Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja pada Awal Periode RPJMD Perubahan	Та	Target Kinerja	ırja	Target Kinerja pada Akhir Periode
					2018	2019	2020	2021	RFJIMD
	= indeks 85	Olahraga	Indeks Pembangunan Keolahragaan	Indeks	2,0	0,75	0,8	0,85	0,85
5. Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase penurunan angka miskin Target kinerja = 0,75%	5. Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penurunan angka kemiskinan	Persen	0,25	0,25	0,25	0,25	0,75
	Misi 6 : Memb	Misi 6 : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan	nian Yang Tanggu	ıh, Maju, Berk	eadilan dan E	3erkela 1	ıjutan		
Meningkatnya pertumbuhan	Persentase pertumbuhan	1. Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Indek Gini	Indeks	0,345	0,337	0,32	0,309	0,309
ekononn yang berkualitas dan berkelanjutan.	PDRB Target kinerja = 11	2. Menurunnya tingkat pengangguran	Persentase Tingkat pengangguran terbuka	persen	3,58	3,46	3,34	3,22	3,22



Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	4,4			
Target Kinerja	4,34	4,34	4,34	4,34 2 94
T _č	4,28	4,28	4,28	4,28
Kinerja pada Awal Periode RPJMD Perubahan	4,22	4,22	4,22	4,22 85 85
Satuan	persen	persen	persen	persen persen Jumlah
Indikator Sasaran	Persentase pertumbuhan PDRB			
Sasaran		3.Meningkatnya Laju	3.Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	3.Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
Indikator Tujuan				
Tujuan				





Target Kinerja pada Akhir Periode	KFJMD	1
erja	2021	1
Target Kinerja	2020	0
Ta	2019	0
Kinerja pada Awal Periode RPJMD Perubahan	2018	0
Satuan		Jumlah
Indikator Sasaran		Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari Global Sustainable Tourist Council (GSTC)
Sasaran		
Indikator Tujuan		
Tujuan		

Sumber: RPJMD Perubahan Kabupaten Pangandaran 2021-2026





2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan

2.1.4.1 Strategi Pembangunan Kabupaten Pangandaran

Visi Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 yang telah dirumuskan serta diuraikan dalam tujuan dan sasaran, selanjutnya akan dicapai menggunakan strategi yang dianggap sesuai dengan upaya pencapaian masing-masing sasaran. Strategi untuk setiap sasaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Strategi Pembangunan Daerah Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 : Mewujudkan ta	Misi 1: Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel be	kuntabel bersih dan melayani	
		Meningkatkan kinerja keuangan daerah, pengelolaan aset daerah	Peningkatan pelayanan, pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah Peningkatan pengetahuan aparatur berbasis komputer
Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan kinerja dan kapabilitas aparatur pengawasan intern pemerintah (APIP)	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan audit berbasis risiko dan berbasis kinerja terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan
			Peningkatan sinergitas pengawasan antar aparat pengawasan Penanganan pengaduan masyarakat
		Meningkatkan kematangan implementasisistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Sosialisasi, dan <i>assessment</i> pendampingan kematangan implementasi SPIP





Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kinerja akuntabilitas instansi pemerintah (AKIP)	Desk akuntabilitas dan penguatan evaluasi atasakuntabilitas kinerja instansi pemerintah
		Meningkatkan penggunaan e- rocurement terhadap belanja daerah	Meningkatkan cakupan layanan e- procurement terhadap belanja daerah
			Peningkatan kapasitas ULP
		Meningkatkan angka Indeks Persepsi Korupsi	Implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan korupsi (RADPPK)
			Peningkatan SDM aparatur pemerintahan melalui Diklat dan Bimtek
			Pengembangan analisis jabatan
			Pengembangan analisis beban kerja dan sistempenilaian kinerja individu pegawai
			Pengembangan evaluasi jabatan dalam rangka remunerasi pegawai
			Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
	Birokrassi vana efektif dan efisien	Meningkatkan angka indeks	Open bidding bagi pejabat tinggi pratama
	Dioxidos yang etem dan ensten	(ASN)	Pemetaan Jabatan Pelaksana dan Pengadaan CPNS berbasis CAT
			Pengembangan sistem pemantauan kehadiran pegawai berbasis teknologi
			Pengembangan sistem informasi kepegawaian
			Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Perencanaan dan penyelenggaraan rotasi dan promosi jabatan berbasis kompetensi dan kinerja
			Mengembangkan dan penguatan sistem dan infrastruktur e-government serta kelembagaannya
		o salabai cabasa acalbaala	Penguatan kebijakan dan tata kelola penyelenggaraan e-government
		government	Publikasi Informasi Publik ke dalam website masing-masing OPD
			Pengintegrasian sistem informasi di seluruh SKPD
			Penataan kelembagaan yang proporsional
			Penguatan kapasitas kelembagaan daerah dan Penguatan Tim Reformasi Birokrasi
			Peningkatan kerjasama antar kelembagaan dan daerah
		Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi	Penataan produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum
			Diterbitkannya standar operasional prosedur (SOP) Pelayanan Publik
			Meningkatnya standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan tupoksi
			Meningkatkan dukungan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan dukungan kegiatan pelayanan keagamaan
			Pengembangan Perencanaan Pembangunan yang baik dan terintegrasi
			Penataan tapal batas wilayah administrasi
			antaraKabupaten Pangandaran dengan
			kabupaten sekitarnya serta tapal batas wilayah administrasi desa.
		Meningkatkan cakupan zona	Pembangunan Zona Integritas
		ıntegritas daerah	Penanganan gratifikasi
			Pengembangan whistle-blowing system
			Penanganan benturan kepentingan
		Meningkatkan angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Pembudayaan pelayanan prima dalam pelayanan publik
		publik	Penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayananpublik Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas /kinerja DPRD
	Birolzrosi wona memilili nelowonon		Meningkatkan kualitas standar pelayanan SKPD
			Penataan administrasi kependudukan (Dokumen identitas penduduk, pelayanan akta kelahiran, pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan)
			Peningkatan evaluasi atas efektivitas dan efisiensi kegiatan pembangunan
			Meningkatkan sistem pengelolaan kearsipan
			Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
			Penegakan Peraturan Daerah
			Pembinaan Perlindungan Masyarakat (Linmas)





Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 2 : Mewujudkan pe	Misi 2 : Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan penger	dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan	wasan lingkungan
	Meningkatnya kesesuaian nembangunan terbadan rencana tata	Meningkatkan kualitas perencanaan danpengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan	Penyusunan instrumen pengawasan dan pengendalian yang mengacu kepada rencana tata ruang
	ruang wilayah	Penguatan pengendalian pemanfaatanruang	Membatasi perkembangan kawasan terbangun pada daerah sempadan pantai, sungai, situ/waduk, danmata air
Terciptanya ruang		Meningkatkan kualitas pemetaan	Penyusunan database peta tematik
wilayah kabupaten		Mengendalikan pencemaran	Peningkatan kualitas udara, air dan tanah
yang harmonis dan		ınığkunganınelaluı penerapan herbagai instrumen nengendalian	metatu penguatan pengendanan, survey baku mutu dan neneoakan hukum terhadan
lingkungan		pencemaran dan kerusakan	pencemaran lingkungan
0		lingkungan	Penguatan kebijakan konservasi
	Meningkatnya kualitas lingkungan	Membudayakan kebersihan lingkungan	Penguatan manajemen persampahan
	madh	Peningkatan perencanaan dan	Meningkatkan akses lavanan untuk
		penyelenggaraan pembangunan IPAL Komunal	an limbah terpusat da stik dan non domestik
		Penataan ruang terbukan hijau publikdan privat	Penataan taman daerah dan ruang terbuka hijau
Misi 3 : Menyediakan in	Misi 3: Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas		
		Meningkatkan infrastruktur jalan danjembatan dalam kondisi mantap	Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan
Meningkatnya cakupan layanan infrastrukturyang	Meningkatnya ketersediaan infrastrukturyang berkualitas		Meningkatkan konektivitas dengan pembangunan jalan yang menghubungkan antar lokasi wisata
berkualitas		Menurunkan tingkat kecelakaan	Meningkatkan ketersediaan sarana dan
		sarana danprasarana perhubungan	
			9





Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan Menyediakan fasilitas dan layanan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Menyediakan fasilitas kelengkapan jalan (rambu,marka, traffic light, paku jalan, marka parkir, dll)
		Meningkatkan infrastruktur sumber dayaair dan irigasi	Pengembangan infrastruktur sumberdaya air Konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air Pengendalian banjir dan daya rusak air Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya air
		Meningkatkan kondisi sarana danprasarana dasar permukiman	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunanperdesaan dan kawasan permukiman Peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunanperdesaan dan kawasan permukiman Penataan rumah tidak layak huni melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagiseluruh lapisan masyarakat
		Peningkatan rumah tangga dengan aksesair minum	Mengembangkan dan memelihara sumber air baku untuk penyediaan air bersih dalam rangka pemenuhan akses air minum
		Peningkatan rumah tangga dengan akses bersanitasi	Peningkatan cakupan layanan bersanitasi
Meningkatnya mitigasibencana dalam pembangunan	Menurunnya risiko bencana di daerahrawan bencana	Peningkatan layanan penanggulanganbencana	Pencegahan dini dan penanggulangan bencana Peningkatan sarana dan prasarana pencegahan dinidan penanggulangan kebencanaan





Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya sarana danprasarana pusat pemerintahan	Terwujudnya pemenuhan bangunan pusat pemerintahan	Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana pusat pemerintahan	Pembangunan dan pengembangan pusat pemerintahan
Misi 4 : Memperkuat ke	Misi 4 : Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal		
		Perlindungan dan kelestarian kebudayaan lokal	Inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan danpublikasi kebudayaan lokal
		Pengembangan kebudayaan lokal	Menghidupkan ekosistem kebudayaan sertameningkatkan, memperkaya dan menyebarluaskan kebudayaan lokal
	Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan	Pemanfaatan kebudayaan lokal	Pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untukmenguatkan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan
Terwujudnya pelestarian seni budaya, pengamalan			Pengembangan atraksi seni dan budaya dalammendukung Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata berkelas dunia
nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan		Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan	Mengambangkan sistem pembelajaran keagamaan di sekolah dan di masyarakat
			Mendorong pelaksanaan kegiatan keagamaan dimasyarakat
	Meningkatnya kesatuan bangsa	Peningkatan kualitas kehidupan beragama Penghayatan kehidupan berbangsa dan bernegara	Meningkatkan toleransi antar suku, agama, ras dan antar golongan
	Meningkatnya partisipasi masyarakat	Meningkatkan pemahaman dan peranserta masyarakat dalam	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik
	dalam berpolitik dan berorganisasi	pembangunan politik	Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pemilu





Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatkan fungsi partai politik dalam pendidikan politik
Misi 5 : Membangun Su	Misi 5: Membangun Sumber Daya Manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing	alitas dan berdaya saing	
Meningkatnya kualitaspendidikan, derajatkesehatan dan daya belimasyarakat secaraberkelanjutan	Meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat	Peningkatan cakupan layanan pendidikan masyarakat	Mengembangkan pendidikan formal 9 tahun Mengembangkan pendidikan non formal dan informal Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan melalui pendidikan gratis sampai dengan tingkat menengah dalam rangka penuntasan program pendidikan 12 tahun Memperkuat kemitraan dalam dunia
			Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan TIK Mengembangkan ekstrakurikuler Meningkatkan akses masyarakat terhadap perpustakaan
		Peningkatan cakupan layanan kesehatan masyarakat	Peningkatan dan optimalisasi peranan Puskesmasdalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat di setiap wilayah kecamatan Pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
			Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanankesehatan melalui layanan kesehatan gratis bagi masyarakat Pangandaran





Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan pelayanan Puskesmas dengan fasilitas ambulans 24 jam
			Meningkatan gizi anak dan layanan kesehatan terhadap ibu dan anak
			Meningkatkan mutu dan standarisasi
			Mengembangkan kemitraan pelayanan kesehatan
			Menjamin ketersediaan obat dan barang medis habis pakai
			Membudayakan perilaku hidup bersih dan
			Meningkatkan nengawasan dan
			Sa
		Peningkatan daya beli masyarakat	Meningkatkan infrastruktur desa dalam mendukung kegiatan perekonomian
		Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB
Terkendalinya laju	Terkendalinya laiu pertumbuhan		Capacity Building terhadap pengelola program KBdi lini lapangan
pertumbunan penduduk	penduduk		Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR)
Meninokatuva		Peningkatan pemberdayaan dan kesetaraan gender	Penguatan peran perempuan dalam pembangunan
pengarusutamaan gender	Meningkatnya pemberdayaan dan kesetaraan gender		Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan
1			Meningkatkan peran organisasi perempuan
Meningkatnya daya saing pemuda dan	Meningkatnya daya saing pemuda dan olahraga	Peningkatan daya saing pemuda	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan





T. i.i.T	\$ 000	Strotoni	And Kohiinbon
olahraga		1950	Pembangunan sarana dan prasarana
			aktivitas kepemudaan
			Peningkatan peran serta organisasi kepemudaandalam pembangunan serta pembinaan karakter pemuda yang mandiri
		Peningkatan daya saing olahraga	uan Arcaun Pembangunan sarana dan prasarana olah raga
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan
		Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pangandaran	Meningkatkan pemberdayaan sosial, budaya serta ekonomi masyarakat Kabupaten Pangandaran
Menurunnya angka kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan		Meningkatkan pemantauan jumlah masyarakat miskin secara akurat, komprehensif dan integral.
		Meningkatkan akses perlindungan sosialbagi rumah tangga miskin	Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi terhadap upaya Penanggulangan Kemiskinan
			Optimalisasi Tim penanggulangan kemiskinan daerah
Misi 6 : Membangun per	Misi 6 : Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan	dilan dan berkelanjutan	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Pemberdayaan aparatur dan kelembagaan desa Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok Mendorong sektor keuangan dan pelaku usaha besar untuk membantupengembangan produk-	Pembinaan aparatur dan kelembagaan desa Menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang melalui peran TPPID dalam peningkatan penataan usaha dan system distribusi barang dan jasa Pembinaan dan fasilitasi untuk mendorong potensi ekspor dan optimalisasi pangsa pasar lokal sentra - sentra industri potensial melalui pengenalan produk dan promosi offline dan online





Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Mendorong peningkatan produktivitassektor usaha jasa dan industri kreatif	Meningkatkan ketersediaan tenaga kerja terampilyang dibutuhkan sektor usaha jasa dan industri kreatif
		Mendorong pertumbuhan ekonomi sektor jasa dan perdagangan dalam dan luar negeri	Meningkatkan pendapatan sektor perdagangan
		Peningkatan kompetensi kerja danperluasan kesempatan kerja	Perluasan kesempatan kerja yang didukungpeningkatan kompetensi, kemandirian dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja
	Menurunnya tingkat pengangguran		Memeratakan kesempatan kerja dan mengupayakan hubungan industrial harmonis, dinamis dan berkeadilan,kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja, terciptanya perluasan kerja
		Peningkatan kualitas sumber daya manusiatenaga kerja	Meningkatkan ketersediaan tenaga kerja terampilyang dibutuhkan sektor usaha jasa dan industri kreatif
			Peningkatan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja
		Menciptakan Wirausaha baru	Memperluas kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan Meningkatkan jumlah komunitas/ pelaku usahakreatif dan klaster industri kecil dan menengah berbasis industri kreatif
	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomisektor unggulan	Mengembangkan sistem agribisnis yangberdaya saing dan berkelanjutan	Meningkatkan usaha pertanian melalui pemilihan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, produktivitas tinggi, dan mempunyai peluang pasar dengan memperhatikan kelestarian lahan





Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan penerapan teknologi di bidang pertanian
		Penyederhanaan prosedur perijinanserta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pelayanan perijinan	Optimalisasi kinerja pelayanan perijinan investasi
		Penguatan Usaha Mikro melalui peningkatan kompetensi dan kualitas SDM, jaringan usaha, perluasan aspek permodalan dan Daya saing produk KUMKM.	Meningkatkan peran Usaha Mikro dalamperekonomian
		Fasilitasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikasi halal, dan standarisasi internasional dalam produksi	Memberikan dukungan pembiayaan usaha dan formalisasi usaha bagi wirausaha atau komunitas kreatif baru
		Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar stakeholder penanaman modal diKabupaten Pangandaran	Fasilitasi dan mediasi antara pelaku usaha Kabupaten Pangandaran dengan Investor. Promosi produk unggulan daerah
		Meningkatkan jumlah komunitas dan klaster industri kecil dan menengah berbasisindustri kreatif dan pelaku usaha kreatif	Peningkatan peran industri kecil menengah, sentra industri potensial dan industri kreatif yang berwawasan lingkungan
		Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya	Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
			Peningkatan sarana dan prasarana perikanan Perbedayaan kelompok nelayan, masyarakat pembudidaya, dan pengawas masyarakat
		Peningkatan produksi pangan pokok	Penmungan masyarakat merayan Penguatan kapasitas produksi yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, gula, dan cabai.





Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan pendapatan masyarakat	Mendorong kewirausahaan bagi para petani Memudahkan akses permodalan bagi nelayan dan petani ikan Meningkatkan sarana dan prasarana nelayan dan petani ikan Meningkatkan peran serta nelayan dan petani ikan dalam perekonomian Peningkatan perlindungan dan jaminan keselamatan nelayan dan petani ikan
		Memanfaatkan dukungan teknologibaru Meningkatnya kontribusi dan	Meningkatkan akses nelayan dan petani ikan terhadap pemanfaatan teknologi Inventarisasi potensi unggulan daerah Peningkatan kualitas kelembagaan dan
		berkembangnya Koperasi dan Usaha Mikro	kuantas, kotembagaan si dan Usaha Mikro, serta t dan dukungan usaha bag Usaha Mikro
		Peningkatan kualitas konsumsi pangandan gizi masyarakat	Pencapaian diversifikasi pangan dengan perbaikanpola konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) Peningkatan penyediaan bahan pokok, stabilitas hargapangan pokok, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nlai gizi yang meningkat
		Penyediaan pangan melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penyediaan pangan	Memfasilitasi ketersediaan dan kemudahan pangan bagi masyarakat Pemberdayaan kelompok wanita tani melalui pemanfaatan pekarangan
		Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan	Penanganan daerah-daerah yang terindikasi rawan pangan





ı ujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Pemasaran Wisata	Optimalisasi daya dukung potensi pariwisata yang berdaya saing serta pengembangan promosi pariwisata yang efektif, kreatif, terarah, terpadu dan berkelanjutan
		Penguatan dan pengembangan destinasipariwisata	Meningkatkan penyelenggaraan event kreatif serta optimalisasi daya dukung potensi pariwisata yang berdaya saing serta pengembangan promosi pariwisata yang efektif, kreatif, terpadu dan berkelanjutan
		Meningkatkan pengelolaan dan kualitaspariwisata	Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Membangun kemitraan dengan seluruh stakeholder pariwisata
			Pengembangan sumberdaya manusia pariwisata Pengembangan regulasi yang mendukung pariwisata Pemenuhan standar destinasi wisata baik seraca regional maupun secara global

Sumber: RPJMD Perubahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021





2.1.4.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi implementasi lebih dan pembangunan agar sinergi dan berkesinambungan. Berdasarkan hal tersebut, Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 beserta keterkaitannya dengan rumusan misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dipilih sebagaimana yang tercantum pada RPJMD Perubahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Arah Kebijakan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021

		Arah Kebi	jakan Pembang	gunan	
Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pembangunan	Pemenuhan	Penataan	Pengembangan	Pemantapan
	Infrastruktur jalan	Pelayanan	Destinasi	Ekonomi	Fasilitas
	Dan Sarana	dasar dengan	Wisata	Kerakya-	Wilayah
	Pemerintahan	dukungan		tan Berbasis	
		TIK menuju		Desa Wisata	
		Kabupaten			
		Pangandaran			
		Cerdas			

Sumber: RPJMD Perubahan Kabupaten Pangandaran 2016-2021.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2021 yaitu "Pemantapan Fasilitas Wilayah."

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama, berdasarkan PERMENPANRB No. 53 Tahun 2014, merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta





business) diemban. mandat (core yang Penetapan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021 Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten
Pangandaran

	Uraian		Kondisi Kinerja Awal	Targe	_	an Setiap ahun	Kondisi Kinerja padaakhir
NO		Satuan	2018	2019	2020	2021	periode 2021
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	66,95	67,00	67,1 2	67,22	67,2 2
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,12	7,87	7,62	7,37	7,37
3	Indeks Gini	Indeks	0,35	0,3	0,28	0,27	0,27
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,58	3,46	3,34	3,22	3,22
5	Persentase pertumbuhan PDRB	persen	4,22	4,28	4,34	4,40	4,40
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skala	61,50	62,46	62,9 1	63,36	63,36
7	Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari Global Sustainable Tourist Council (GSTC)	Jumlah	n.a	0	0	1	1

Sumber: RPJMD Perubahan Kabupaten Pangandaran 2016-2021.





Tabel 2.7 Indikator Sasaran (*Impact*) Tahun 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Pangandaran

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kinerja pada Awal Periode RPJMD Perubahan	da val TARGET KINERJA iode SASARAN		Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
			2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Misi 1 : Mewujudk		la pemerinta	ahan ya	ng akunt	abel, ber	sih dan mela	yani
1.1	Opini BPK terhadap LKPD	Status Laporan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKD
1.2	Tingkat Kapabilitas APIP (1 s/d 5)	Skor	2	2	3	3	3	Inspektorat
1.3	Tingkat Kematangan implementasi SPIP (1 s/d 5)	Skor	2	2	3	3	3	Inspektorat
1.4	Nilai AKIP	Nilai	CC	В	В	BB	BB	Setda/Bagian Organisasi
1.5	Persentase Penggunaan E- Procurement Belanja Pengadaan	Persen	85	87	88	90	90	Setda/Bagian Barang/Jasa
1.6	Indeks Profesionalitas ASN(1 s/d 100)	Skor	55	60	65	70	70	BKPSDM
1.7	Indeks E- Goverment Nasional (0 s/d 4)	Indeks	1	2	2,25	3	3	Dinas Kominfo SP
1.8	Indeks Reformasi Birokrasi (1 s/d 100)	Indeks	40	45	55	60	60	Setda/Bagian Organisasi
1.9	Cakupan Zona Integritas Daerah (0 s/d 10)	Persen	0	30	50	80	80	Inspektorat
1.10	Masyarakat	Predikat	Cukup	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Setda/Bagian Organisasi
2		tan penataai anlingkung:		g harmo	onis dan	pengend	lalian peman	faatan ruang yang
2.1	Ketaatan terhadap RTRW	persen	10	20	30	40	40	DPUTRPRKP
2.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,50	62,46	62,91	63,36	63,36	DLHK





			Kinerja pada	TARC	ET KINE	ED IA	Target Kinerja	CUDD
NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Awal Periode RPJMD Perubahan	SASARAN			pada Akhir Periode RPJMD	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2018	2019	2020	2021	ICI ONID	
3	Misi 3 : Menyedia	kan infrastru	ktur dan fas	silitas y	ang berk	ualitas		
3.1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	60	65	75	85	85	DPUTRPRKP
3.2	Tingkat kecelakaan lalu lintas	Orang/ Sejuta Km Kendaraan per Tahun	0,033	0,032	0,031	0,029	0,029	Dishub
3.3	Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik	Rasio	55	60	65	70	70	DPUTRPRKP
3.4	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses air minum	Persen	50	55	65	75	75	DPUTRPRKP
3.5	Indeks Resiko Sanitasi	Indeks	40	38	36	34	34	DPUTRPRKP
3.6	Indeks Risiko Bencana	Indeks	155	150,6	145	140	140	BPBD
3.7	Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi	Persen	5	18	22	80	80	DPUTRPRKP
4	Misi 4: Memperk	uat ketahan:	an nilai-nila	i kearif	an lokal			
4.1	Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal	Persen	25	35	70	80	80	Diparbud
4.2	Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik	Persen	70	75	85	90	90	Disdikpora
4.3	Angka Konfilk Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	Angka	12	11	10	8	8	Kesbangpol
4.4	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	80,5%	81%	81,5%	82%	82%	Kesbangpol
5	Misi 5: Membangu	ın sumberda	ıya manusia	yang n	nandiri, 1	berkualit	tas dan berda	aya saing
5.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	66.42	66,82	67,12	67,42	67,42	Dinkes, Disdik, Gabungan SKPD
5.2	Persentase Laju Pertumbuhan	Persen	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	DKBPPPA





NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kinerja pada Awal Periode RPJMD Perubahan	pada Awal Periode RPJMD TARGET KINERJA SASARAN			Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2018	2019	2020	2021		
	Penduduk (LPP)							
5.3	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Indeks	65,67	65,67	66,55	66,55	66,55	DKBPPPA
5.4	Indeks Pembangunan Kepemudaan	Indeks	0,24	0,25	0,26	0,27	0,27	Disdikpora
5.5	Indeks Pembangunan Keolahragaan	Indeks	0,70	0,75	0,80	0,85	0,85	Disdikpora
5.6	Persentase penurunan angka kemiskinan	Persen	0,25	0,25	0,25	0,25	0,75	Dinsospmd
6	Misi 6 : Membang	un Perekono	omian Yang	Tanggul	ı, Maju,	Berkead	ilan dan Ber	kelanjutan
6.1	Indek Gini	Indeks	0,345	0,337	0,320	0,309	0,309	Dinsospmd
6.2	Persentase Tingkat pengangguran terbuka	persen	3,58	3,46	3,34	3,22	3,22	Disnakerintrans
6.3	Persentase pertumbuhan PDRB	persen	4,22	4,28	4,34	4,40	4,40	Gabungan
6.4	Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM	persen	85	87	89	90	90	Dinas Perdagangan KUKM
6.5	Jumlah Koperasi yang sehat	persen	0	1	2	2	2	Dinas Perdagangan KUKM
6.6	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	82	91	94	97	97	DKPKP
6.7	Jumlah kunjungan wisata	Jumlah	4,5 Juta	5 Juta	5,5 Juta	6 Juta	6 juta	Disparbud
6.8	Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari Global Sustainable Tourist Council (GSTC)	Jumlah	0	0	0	1	1	Disparbud

Sumber: RKPD Kabupaten Pangandaran 2021





2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yaitu dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa outcome dan output yang ingin di wujdukan oleh suatu organisasi pada suatu tahun tertentu. RKT diperlukan agar dalam penyusunan RKPD fokus dan diarahkan pada rencana kinerja yang telah direncanakan pada RPJMD sesuai dengan tahun berkenaan. Sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya diorientasikan pada terlaksananya kegiatan (output), akan tetapi perencanaan program dan kegiatan harus direncanakan untuk menghasilkan manfaat (outcome) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Rencana Kinerja Tahunan diturunkan dari Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang ada pada RKPD Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

Rencana Kinerja Tahunan, perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat menyusun prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak





2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen Bupati yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:

- 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun 2021 adalah sebagai berikut:





Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Kabupaten Pangandaran Tahun

		Target					
Sasaran	Indikator Kinerja	2021					
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang AKuntabel, Bersih Dan Melayani							
	Opini BPK terhadap LKPD	WTP					
	Tingkat Kapabilitas APIP (1s/d5)	3					
Birokarasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Kematangan implementasi SPIP (1s/d5)	3					
	Nilai AKIP	BB					
	Persentase Penggunaan E- procurement terhadap Belanja Pengadaan	90					
	Indeks Profesionalitas ASN (1s/d100)	70					
Birokrasi yang efektif dan efisien	Tingkat Kematangan E- Government (0s/d5)	3					
	Indeks Reformasi Birokrasi	60					
_	kan Penataan Ruang Yang Harmo faatan Ruang Yang Berwawasan I						
Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah	Ketaatan terhadap RTRW	40					
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	kualitas lingkungan lingkungan hidun						
Misi 3 : Menyediakan Infrastruktur Dan Fasilitas Yang Berkualitas							
Meningkatnya	Persentase jalan dalam kondisi mantap	79,88					
ketersediaan infrastruktur yang	Tingkat kecelakaan lalu lintas	0,029					
berkualitas	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18,56					
Menurunnya risiko	140						





Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
Sasaran	indikator Kinerja	2021	
bencana di daerah rawan bencana			
Mewujudkan pemenuhan bangunan pusat pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi	80	
Misi 4 : Memperl	ruat Ketahanan Nilai-Nilai Kearif	an Lokal	
Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan	Persentase pemajuan kebudayaan lokal	80	
	Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik	90	
Meningkatnya Kesatuan Bangsa	Angka konflik suku, agama, ras dan antar golongan	8	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi	persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	82%	
	gun Sumberdaya Manusia Yang N kualitas Dan Berdaya Saing	Mandiri,	
Meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat	Meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat	68,78	
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju penduduk (LPP)	0,57	
Meningkatnya Pemberdayaann dan Kesetaraan Gender	Meningkatnya Pemberdayaann dan Kesetaraan Gender	66,55	
Meningkatnya daya saing pemuda &	Indeks Pembangunan Kepemudaan	0,27	
olahraga	Indeks Pembangunan Keolahragaan	0,85	
Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penurunan angka kemiskinan	0,25	





Sasaran	Indikator Kinerja	Target					
	Ju	2021					
Misi 6 : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan Dan Berkelanjutan							
Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Indeks Gini	0,33					
Menurunnya tingkat pengangguran							
Meningkatnya Laju	Persentase pertumbuhan PDRB	4,40					
Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM	98					
Oliggulali	Jumlah koperasi yang sehat	2					
	Pola Pangan Harapan	97					
	Jumlah Kunjungan wisata	6 juta					
	Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari Global Sustainable Tourism Council (GSTC)	1					

Sumber: Perjanjian Kinerja Kabupaten Pangandaran, Tahun 2021





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sudah menjadi kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan yang merupakan bentuk dari akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari badan hukum atau pimpinan kolektif secara perorangan, transparan mengenai keberhasilan/percepatan atau kegagalan/perlambatan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Akuntabilitas Kinerja dapat diwujudkan dalam bentuk pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja dan realisasi kinerja, sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya. Capaian atas kinerja instansi pemerintah perlu menjelaskan pula terkait sumber daya yang mendukung keberhasilan ataupun ketidakberhasilan, dan juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Komitmen pemerintah pusat terhadap kinerja dirumuskan dalam bentuk penerapan anggaran dan sekaligus manajemen berbasis kinerja. Hal tersebut mengandung makna bahwa capaian kinerja pemerintahan diukur dengan indikator dan target yang sudah ditetapkan sebelumnya dan tertuang pada dokumen perencanaan. Pada konteks perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, maka manajemen kinerja yang dimaksud adalah membandingkan antara capaian kinerja dengan perencanaan kinerja yang telah dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).





Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, secara tegas dinyatakan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah membandingkan antara indikator dan target strategis yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasi kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

3.1 Pengukuran Kinerja 2021

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan dating (performance improvement). Adapun dalam





memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1 Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (realisasi positif), maka digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Capaian
$$=\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Rumus 2 Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (realiasi negatif), maka digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Capaian
$$=$$
 $\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan % (persentase) capaian kinerja. Sedangkan penilaian capaian kinerja sasaran untuk kelompok indikator (lebih dari satu indikator). maka kesimpulan capaian kinerja menggunakan metode composite (rata-rata capaian kinerja seluruh kelompok indikator). Hasil nilai composite ini dihitung dengan menambahkan hasil persentase (%) capaian kinerja setiap indikator (dalam kelompok indikator sasaran) dan dibagi dengan jumlah indikator yang ada di dalam kelompok tersebut. Maka, disimpulkan nilai capaian kinerja sasaran strategis yang diukur dengan kelompok indikator adalah sebagai berikut:





Capaian rata – rata kinerja

= Jumlah Persentase (%) Capaian seluruh Indikator Jumlah Indikator Setiap Sasaran

Hasil dari perhitungan diatas dapat ditarik kesimpulan atas tingkat efisiensi kinerja setiap sasaran strategis dengan skala interval sebagai berikut :

Tabel 3 .1 Pengkategorian capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

3.2 Capaian Kinerja 2021

Pengukuran capaian kinerja Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 tercantum pada tabel di bawah ini :





Tabel 3 .2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pangandaran tahun 2021

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI
1.	T.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	60	Belum ada hasil Penilaian menpan	-	-
2.	S1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	Belum ada hasil penilaian Menpan	-	-
3		Tingkat Kapabilitas APIP	3	2	67%	Sedang
4		Tingkat Kematangan implementasi SPIP	3	2	67%	Sedang
5		Nilai AKIP	BB	Belum ada hasil penilaian Menpan	-	-
6		Persentase Penggunaan E- Procurement thd Belanja Pengadaan	90	95,08%	106%	Sangat tinggi
7	S2. Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Indeks Profesionalitas ASN	70	53	76%	Tinggi
8		Tingkat Kematangan E-Goverment	3	2,38	79%	Tinggi
9		Indeks Reformasi Birokrasi	60	Belum ada hasil Penilaian menpan	-	-
10	S3. Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Daerah	29,6	14,81	50%	rendah
11		Survey Kepuasan Masyarakat	80 (sangat baik)	84,92	106%	Sangat tinggi
12	T2. Terciptanya Ruang Wilayah Kabupaten yang harmonis dan berwawasan lingkungan	Ketaatan terhadap RTRW	40%	12%	30%	Sangat rendah
13		Indeks Kualitas	63,36%	67,58%	107%	Sangat





NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI
		Lingkungan Hidup				tinggi
14	S4. Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap rencana Tata Ruang Wilayah	Ketaatan terhadap RTRW	40%	12%	30%	Sangat rendah
15	S5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,36	67,58	107%	Sangat tinggi
16	T3. Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur yang berkualitas	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	95%	89%	94%	Sangat tinggi
17	S6. Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas	Persentase jalan dalam kondisi mantap	85%	89%	105%	Sangat tinggi
18		Tingkat kecelakaan lalu lintas	0,029	0,001	3%	Sangat rendah
19		Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik	70%	72%	104%	Sangat tinggi
20		Persentase Rumah Tangga Dengan Akses air minum	75	88%	117%	Sangat tinggi
21		Indeks Resiko Sanitasi	34	48	141%	Sangat tinggi
22	T4. Meningkatnya Mitigasi bencana dalam pembangunan.	Indeks Risiko Bencana	140	145,44	104%	Sangat tinggi
23	S7. Menurunnya Resiko Bencana di daerah Rawan Bencana	Indeks Risiko Bencana	140	145,44	104%	Sangat tinggi
24	T5. Terwujudnya sarana dan prasarana pusat pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi	80	43%	54%	rendah
25	S8. Mewujudkan pemenuhan bangunan pusat pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi	80	43%	54%	rendah
26	T6. Terwujudnya pelestarian seni budaya,	Angka Konfilk Suku, Agama, Ras dan Antar	8	3	38%	Sangat rendah





NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI
	pengamalan nilai- nilai kebangsaan dan keagamaan	Golongan				
27	S9. Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan	Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal	80	60	75%	tinggi
28		Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik	90%	98%	109%	Sangat Tinggi
29	S10. Meningkatnya Kesatuan Bangsa	Angka Konfilk Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	8	3	38%	rendah
30	S11. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	82%	Tidak ada pemilu	-	-
31	T7. Meningkatnya kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan daya beli masyarakat secara berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,78	68,28	99%	Sangat Tinggi
32	S12. Meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,78	68,28	99%	Sangat Tinggi
33	T8. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,57	0,55	96%	Sangat tinggi
34	S13. Terkendalinya	Persentase Laju Pertumbuhan	0,57	0,55	96%	Sangat tinggi





NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI
	Laju Pertumbuhan Penduduk	Penduduk (LPP)				
35	T9. Meningkatnya pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	74,57	74,57	100%	Sangat tinggi
36	S14. Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	74,57	74,57	100%	Sangat tinggi
37	T10. Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga	Indeks Pembangunan Keolahragaan	85	82,35	97%	Sangat Tinggi
38	S15. Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga	Indeks Pembangunan Kepemudaan	0,27	186,27	690%	Sangat Tinggi
39		Indeks Pembangunan Keolahragaan	85	82,35	97%	Sangat Tinggi
40	T11. Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase PPKS yang Mandiri	30	39,52	132%	Sangat tinggi
41	S16. Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga	Persentase PPKS yang Mandiri	30	39,52	132%	Sangat tinggi
42	T12. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Persentase pertumbuhan PDRB	4,40	-	-	-
43	S17. Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Indek Gini	0,33	0,35	101%	Sangat tinggi





NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI
44	S18. Menurunnya tingkat pengangguran	Persentase Tingkat pengangguran terbuka	3,22%	3,25%	101%	Sangat tinggi
45	S19. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Persentase pertumbuhan PDRB	4,40%	-	-	-
46		Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM	98	100	102%	Sangat tinggi
47		Jumlah Koperasi yang sehat	2	0	0%	-
48		Pola Pangan Harapan	97	93,40	96%	Sangat tinggi
49		Jumlah kunjungan wisata	6.000.000	3.604.129	60%	Rendah
50		Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari Global Sustainable Tourism Council (GSTC)	1	0	-	Sangat rendah

Sumber: Kabupaten Pangandaran





3.2.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Misi 1:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani

Tujuan 1:

Terwujudnya Reformasi Birokrasi

Tabel 3 .3 Capaian Kinerja Tujuan 1

	Cap	aian Kinerja		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Reformasi Birokrasi	60	Belum ada hasil Penilaian menpan	-	-

Sumber data:

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi indeks Reformasi Birokrasi, semakin baik pengelolaan tata pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Realisasi, capaian, dan kategori pada Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021 belum terisi karena belum ada hasil penilaian dari KemenPANRB.





Sasaran 1:

Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Tabel 3 .4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

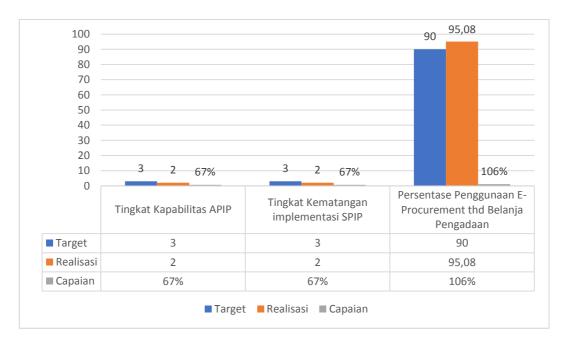
	Cap	aian Kinerja	a 2021	
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Opini BPK terhadap LKPD	WTP	Belum ada hasil penilaian Menpan	_	-
Tingkat Kapabilitas APIP	3	2	67%	Sedang
Tingkat Kematangan implementasi SPIP	3	2	67%	Sedang
Nilai AKIP	BB	Belum ada hasil penilaian Menpan	-	-
Persentase Penggunaan E- Procurement thd Belanja Pengadaan	90	95,08%	106%	Sangat Tinggi

Sumber data: BAPPEDA, Inspektorat, Sekretariat Daerah

Capaian Tingkat Kapabilitas APIP 2021 yang telah dijelaskan pada tabel diatas adalah 67% dari target yang telah ditetapkan sebesar 3 dan terealisasi sebesar 2. Hal ini sama dengan capaian tahun 2020. Selanjutnya Tingkat kematangan implementasi SPIP mempunyai nilai capaian 67% dari target 3 dan terealisasi sebesar 2. Walaupun nilai capaian kematangan implementasi SPIP tahun 2021 berkategori sedang, namun masih lebih rendah dari capaian tahun 2020 yaitu 100% dari target 3 dan terealisasi sebesar 3. Selanjutnya Persentase Penggunaan E- Procurement terhadap Belanja Pengadaan mempunyai capaian sebesar 106% dari target 90 dan terealisasi sebesar 95,08%







Gambar 3 .1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Sumber data: BAPPEDA, Inspektorat, Sekretariat Daerah

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .5 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 1

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat	Rp 362.122.500	Rp 214.514.040	59%
3	Program Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Rp 3.324.265.178	Rp 1.586.328.796	48%
4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Rp 2.676.563.250	Rp 993.460.753	37%





No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
5	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	BAPPEDA	Rp 1.004.099.101	Rp 552.783.251	55%
	Jumlah		Rp 7.367.050.029	Rp 3.347.086.840	45,43%

Sumber data : Bappeda, Inspektorat

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Tidak adanya kegiatan workshop, Bimtek dan Pembinaan terkait Kapabilitas APIP;
- Tidak membangun infrastruktur-infrastruktur yang sesuai dengan hasil benchmarking dan meningkatkan pertemuan dengan BPKP selaku instansi pembina;

Untuk meningkatkan percepatan menuju Level 3 sesuai dengan target akhir RPJMD diperlukan upaya sebagai berikut:

- Meningkatkan infrastruktur-infrastruktur yang sesuai dengan hasil benchmarking dan meningkatkan pertemuan dengan BPKP selaku intansi pembina;
- Mengupayakan peningkatan kompetensi aparaturnya melalui Diklat, Bimtek dan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS);
- 3) Mendorong manajemen pemerintah daerah untuk meningkatkan kematangan manajemen risiko dan mendorong APIP mengimplementasikan Kepabilitas APIP dengan melakukan penilaian efektivitas manajemen risiko pemerintah daerah;





- 4) Meningkatkan praktik-praktik yang baik dengan mengimplementasikan Key Process Area (KPA) secara baik dan terus menerus (Institutionalized), serta mulai mempersiapkan diri untuk menuju level kapabilitas yang lebih tinggi;
- 5) Melakukan *Self Assessment* secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP Level 3.
- 6) Memonitor penyelenggaraan SPIP dan mengkoordinasikan tindak lanjut hasil penilaian maturitas SPIP;
- 7) Meningkatkan komitmen implementasi dan dokumentasi sistem;
- 8) Memantau serta mengevaluasi secara periodik, formal dan terdokumentasi pelaksanaan kebijakan dan SOP dan menggunakan hasilnya untuk perbaikan SPIP;

Sasaran 2:

Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Tabel 3 .6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

	Сар	aian Kinerja		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN	70	53	76%	Tinggi
Tingkat Kematangan E-Goverment	3	2,38	79%	Tinggi
Indeks Reformasi Birokrasi	60	Belum ada hasil Penilaian menpan	-	-

Sumber data: BKPSDM, DIskominfo

Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan



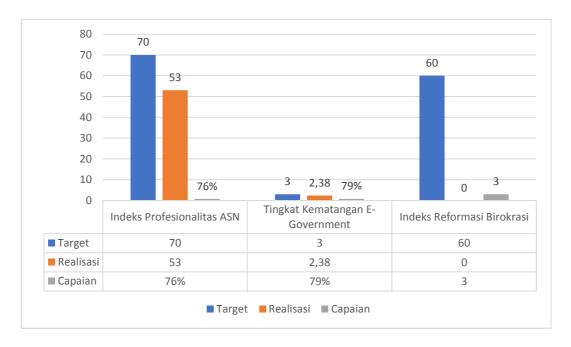


sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Kemudian Tingkat Kematangan Pelaksanaan SPBE atau yang dikenal dengan E-Government adalah hasil dari evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan tentang pedoman evaluasi SPBE digunakan sebagai panduan dalam melakukan penilaian/evaluasi SPBE untuk mengukur kemajuan pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan instansi daerah. Sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi mengambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan terhadap penataan penyelengggaraan pemerintah di mana reformasi birokrasi tidak hanya efektif & efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Capaian Indeks Profesionalitas ASN 2021 yang telah dijelaskan pada tabel diatas adalah 76% dari target yang telah ditetapkan sebesar 70 dan terealisasi sebesar 53. Hal ini merupakan sebuah kemajuan karena pada tahun 2020 capaian Indeks Profesionalitas ASN hanya sebesar 59,87% dari target 65 dan terealisasi sebesar 38,92%. Selanjutnya Tingkat kematangan *E-Government* mempunyai nilai capaian 79% atau sangat tinggi dari target 3 dan terealisasi sebesar 2,38. Walaupun nilai capaian kematangan E-Government tahun 2021 berkategori tinggi, namun masih lebih rendah dari capaian tahun 2020 yaitu 134% dari target 2,25 dan terealisasi sebesar 3,02.







Gambar 3. 2 Capaian Kinerja Sasaran Startegis 2

Sumber data: BKPSDM, DIskominfo

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran 2

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	Rp 4.302.442.743	Rp 2.901.604.365	67%
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	Rp 1.725.326.000	Rp 1.687.512.800	98%
3	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo	Rp 933.042.948	Rp 767.615.906	82.27%
4	Program Aplikasi Informatika	Diskominfo	Rp 1.420.864.354	Rp 1.383.958.529	97.4%





No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Diskominfo	Rp 35.400.000	Rp 29.400.000	83,05%
	Jumlah		Rp 8.417.076.045	Rp 6.770.091.600	80,43%

Sumber data: BKPSDM, DIskominfo

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- Gap kompetensi masih sangat tinggi dikarenakan selisih rata-rata ASN yang telah memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan dan yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan masih terbilang tinggi;
- Gap kualifikasi masih cukup tinggi dimana masih adanya selisih rata-rata ASN yang memiliki latar pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatan yang dipegangnya;
- 3) Adanya perubahan metode penilaian Indeks Profesionalitas ASN dari Badan Kepegawaian Negara, yang semula penilaian hanya dilakukan terhadap pejabat struktural saja sedangkan saat ini penilaian berlaku untuk seluruh ASN;

Solusi untuk meningkatkan pencapaian target sasaran di masa mendatang adalah:

- Menginstruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah agar melaporkan data terkait dengan kompetensi, kualifikasi, kinerja dan disiplin aparatur secara lengkap dalam aplikasi IP ASN dan SAPK.
- 2) Menghimbau kepada seluruh ASN Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi agar skor komponen kualifikasi dapat ditingkatkan





- 3) Meningkatkan koordinasi untuk membangun pemahaman bersama terkait implementasi penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Pangandaran;
- 4) Pemanfaatan aplikasi umum secara optimal;





Sasaran 3:

Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

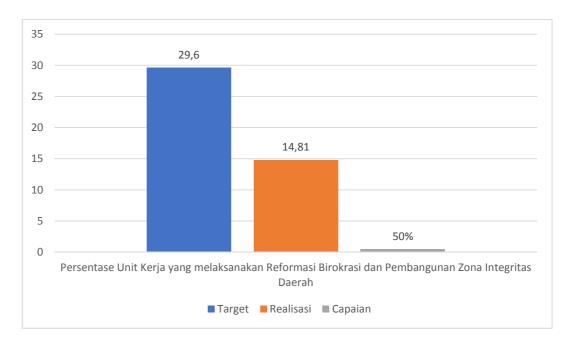
	Capa	Capaian Kinerja 2021		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase Unit Kerja yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Daerah	29,6	14,81	50%	Sangat rendah
Survey Kepuasan Masyarakat	80 (Sangat Baik)	84,92	106%	Sangat tinggi

Sumber data: Disdukcapil, DPMPTSP, Inspektorat, Kecamatan

Target Persentase Unit Kerja yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Daerah tahun 2020 adalah sebesar 18,50%. Persentase Unit Kerja yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Daerah sampai dengan tahun 2020 realisasinya sebanyak 8,57% dengan target 18,50% sehingga belum mencapai target. Sedangkan pada tahun 2021 target Persentase Unit Kerja yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Daerah adalah 29,6%, lebih tinggi dari 2020 sebesar 18,50%, dan realisasi pada tahun 2021 sebesar 14,81 sehingga tercapai sebesar 50%. Hal ini merupakan laju perbaikan dari tahun sebelumnya yang hanya tercapai 29,6%, sekarang tercapai 50% atau lebih 30,4% dari tahun 2020.







Gambar 3. 3 CapaianKinerja Sasaran Strategis 3

Sumber data: Disdukcapil, DPMPTSP, Inspektorat, Kecamatan

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.9 Penyerapan anggaran program penunjang sasaran 3

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP	0	0	-
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat	732.837.000	547.628.400	75%
3	Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil	278.400.000	256.000.000	91,95%
4	Program Pencatatan Sipil	Disdukcapil	104.400.000	96.000.000	91,95%





No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	202.200.000	48.000.000	23,74%
6	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan	Rp762.880.000	Rp400.880.000	52,55%
7	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan	Rp34.860.000	Rp34.860.000	100,00%
8	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	7.095.278.800	5.144.527.829	73%
	Jumlah		Rp 9.210.855.800	Rp 6.527.896.229	70,87%

Sumber data : Disdukcapil, DPMPTSP, Inspektorat, Kecamatan

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

DPMPTSP:

1) Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan

Inspektorat:

- Belum adanya komitmen dari seluruh OPD dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi dan membangun Zona Integritas yang berpredikat WBK/WBBM;
- 2) Sosialisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas belum optimal;





3) Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas belum memadai;

Disdukcapil:

- 1) Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) masih belum dilakukan secara periodik oleh masing-masing OPD, sehingga mengandalkan survei bagian organisasi yang terbatas sampling dan waktunya.
- 2) Survei kepuasan masih menggunakan metode yang menggabungkan antara ilmiah dan regulasi, sehingga hasil survei belum tepat dan akurat untuk mengukur nilai sesungguhnya.
- 3) Motivasi dan semangat perangkat daerah dalam melakukan inovasi pelayanan masih rendah, sehingga perubahan peningkatan kualitas pelayanan masih rendah dan berdampak terhadap nilai kepuasan masyarakat yang diperoleh

Solusi untuk meningkatkan pencapaian target sasaran di masa mendatang adalah:

DPMPTSP:

 Perlu adanya peningkatan sistem/ teknologi untuk menjamin ketersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah

Inspektorat:

- 1) Meningkatkan komitmen implementasi dan dokumentasi sistem;
- 2) Meningkatkan kompleksitas organisasi, sumber daya manusia dan perspektif pengembangannya.





- 3) Melaksanakan Sosialisasi/Asistensi/Konsultasi secara optimal terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas kepada seluruh Perangkat Daerah;
- 4) Pengembangan kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengawas Internal terkait Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penilaian Zona Integritas;
- 5) Memonitor pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas dan mengkoordinasikan tindak lanjut hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penilaian Zona Integritas dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, termasuk juga adanya pemenuhan dokumen-dokumen lainnya dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas.
- 6) Memantau serta mengevaluasi secara periodik, formal dan terdokumentasi pelaksanaan kebijakan dan SOP dan menggunakan hasilnya untuk perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas;

 Disdukcapil:
- Kebijakan setiap OPD melakukan survei kepuasan masyarakat pada setiap layanannya secara periodik dan melaporkan ke sekretaris daerah dan mempublikasikan hasil akhirnya (IKM).
- 2) Memperkuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan publik.
- 3) Meningkatkan program review dan penyesuaian standar pelayanan dengan pelibatan masyarakat (citizen charter).
- 4) Meningkatkan intensitas koordinasi antar perangkat daerah terkait dalam rangka meningkatkan inovasi pelayanan publiknya.





- 5) Menyediakan dan mengelola sarana pengaduan masyarakat.
- 6) Mendorong inovasi pelayanan setiap perangkat daerah terutama inovasi dalam pelayanan publik.
- 7) Mensosialisasikan kebijakan evaluasi pelayanan secara berkala.





Misi 2:

Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan

Tujuan 2:

Terciptanya Ruang Wilayah Kabupaten yang harmonis dan berwawasan lingkungan

Tabel 3 .10 Capaian Kinerja Tujuan 2

	Capa	Capaian Kinerja 2021			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Ketaatan terhadap RTRW	40%	12%	30%	Sangat rendah	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,36%	67,58%	107%	Sangat Tinggi	

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas

Sasaran 4:

Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap rencana Tata Ruang Wilayah

Tabel 3 .11 capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

	Cap	aian Kinerja			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Ketaatan terhadap RTRW	40%	12%	30%	Sangat Rendah	

Sumber data: Dinas PUTPRKP

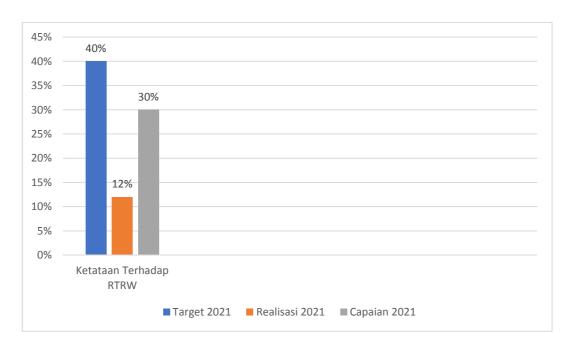
Capaian Sasaran strategis 4 yaitu Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap rencana Tata Ruang Wilayah dengan indikator Ketaatan terhadap RTRW adalah sebesar 30%. Hal tersebut masuk kedalam kategori rendah, karena target yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah sebesar 40% namun realisasi hanya sebesar 12%. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak





tercapainya target yang telah ditetapkan, diantaranya adalah pembangunan yang dilaksanakan berbeda dengan yang telah direncanakan. Selain itu tata bangunan yang ada mungkin masih tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Nilai realisasi capaian indikator Ketaatan terhadap RTRW diperoleh melalui formula (sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017) yaitu Rencana Peruntukan dihitung berdasarkan banyaknya program utama yang harus dilakukan sebagai bentuk perwujudan rencana tata ruang sesuai dengan yang tertuang dalam indikasi program RTRW. Perwujudan rencana tata ruang wilayah tersebut merupakan gabungan dari banyaknya program utama dalam perwujudan struktur ruang, perwujudan pola ruang dan perwujudan kawasan strategis kabupaten. Realisasi RTRW dihitung berdasarkan banyaknya program utama yang sudah dilakukan sebagai bentuk perwujudan rencana tata ruang sesuai dengan yang tertuang dalam indikasi program RTRW.



Gambar 3. 4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

Sumber: Dinas PUTRPRKP





Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .12 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 4

No	Nama Program	SKPD Penanggun g Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaia n (%)	
1	Program Penyelenggara an Penataan Ruang		1.845.883.850	223.558.000	12%	
	Jumlah					

Sumber data: Dinas PUTRPRKP

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Keterbatasan pendanaan dalam memenuhi Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang membutuhkan besarnya keterlibatan tenaga ahli dalam perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Keterbatasan waktu penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menyebabkan rendahnya keragaman karakteristik wilayah yang akan ditemui.
- 3) Ketidak tercapaian kinerja dan anggaran disebabkan karena ada tambahan PAK yang menyebabkan keterbatasan waktu dalam pengerjaannya.

Solusi yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kesesuaian terhadap RTRW di Kabupaten Pangandaran antara lain adalah:





- 1) Pemenuhan dana/biaya dalam penyusunan turunan RTRW dan dokumen perencanaan strategis lainnya yang dibutuhkan (Kegiatan yaang dianggarkan).
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan RTRW dengan mengoptimalkan waktu Perencanaan penyusunan dokumen RTRW lainnya.





Sasaran 5:

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Tabel 3 .13 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

	Cap	aian Kinerja		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,36	67,58	107%	Sangat Tinggi

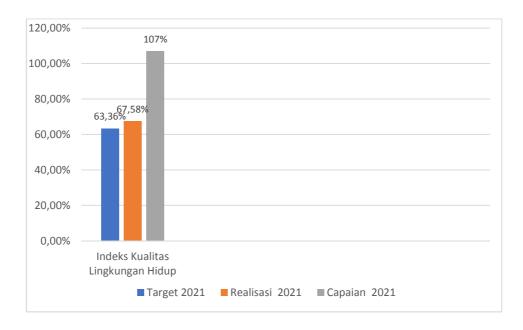
Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup

Capaian sasaran Strategis 5 berkaitan dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebesar 107% atau tercapai dengan sangat baik. Realisasi kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2021 adalah sebesar 67,58% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2021 adalah sebesar 63,36% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 107% atau tercapai dengan sangat baik. Capaian IKLH yang berada pada kisaran predikat sangat baik ini menunjukkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pangandaran terkelola dengan baik dan optimal. Beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam mendukung ketercapaian target indeks Kualitas Lingkungan Hidup hingga predikat sangat baik diantaranya adalah dilakukan pemeliharaan taman kota sehingga kualitas udara dapat terjaga dengan baik, dilaksanakan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan terhadap pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu terjaganya tutupan hutan di sempadan sungai dan pantai juga memberikan dampak positif bagi tercapainya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan sangat baik. Pada tahun 2018 maupun pada tahun 2019, realisasi indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tidak pernah mencapai target, akan tetapi Pada Tahun 2020 Realisasi Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)





mencapai Target atau melebihi Target Sebesar 103,67%. pada tahun 2020, adanya percepatan sebesar 2,31 dan capaiannya meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 0,96 dan tahun 2019 sebesar 0,85 dengan capaian hanya 96,93% pada Tahun 2018 dan 98,64% pada tahun 2019. Target akhir periode RPJMD tahun 2021 sebesar 63,36, sedangkan capaian realisasi pada tahun 2020 sebesar 65,22, sehingga untuk target capaian IKLH Pada akhir periode RPJMD tahun2021 sudah tercapai dengan percepatan sebesar 1,86.



Gambar 3 .5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup,





Tabel 3 .14 Penyerapan Anggaran Program Penunjang sasaran strategis 5

No	Nama Program	SKPD Penanggun g Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaia n (%)
1	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLHK	Rp. 570.165.000	Rp. 3.074.0000	5%
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLHK	Rp. 270.783.500	Rp. 32.228.000	12%
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DLHK	Rp. 10.461.600	Rp. 10.461.600	100%
4	Program Pengelolaan Keanekaraga man Hayati (Kehati)	DLHK	Rp. 1.186.998.299	Rp. 112.4046.306	95%
	Jumlah	,	Rp 1.767.624.899	Rp 1.197.475.906	67,74%

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup

Target sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2021 di Kabupaten Pangandaran tercapai dengan sangat baik disebabkan beberapa hal sebagai berikut:





- 1) Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sehingga penanganan timbunan sampah dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
- 2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan terhadap pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Pelaksanaan kegiatan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat dan pelaku usaha.
- 4) Dilakukan tindaklanjut pengaduan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup oleh pelaku usaha.
- 5) Pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis di area sempadan sungai.
- 6) Dilakukan pemeliharaan taman kota sehingga kualitas udara dapat terjaga dengan baik.





Misi 3:

Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas

Tujuan 3:

Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur yang berkualitas

Tabel 3 .15 Capaian Kinerja Tujuan 3

	Сар	aian Kinerja		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	95%	89%	94%	Sangat Tinggi

Sumber data: Dinas PUTRPRKP

Sasaran 6:

Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas

Tabel 3 .16 Capaian kinerja sasaran strategis 6

	Cap	aian Kinerja		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase jalan dalam kondisi mantap	85%	89%	105%	Sangat tinggi
Tingkat kecelakaan lalu lintas	0,029	0,001	3%	Sangat rendah
Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik	70%	72%	104%	Sangat Tinggi
Persentase Rumah Tangga Dengan Akses air minum	75	88%	117%	Sangat Tinggi
Indeks Resiko Sanitasi	34	48	141%	Sangat Tinggi

Sumber data: Dinas Perhubungan, Dinas PUTRPRKP

Capaian sasaran Strategis 6 berkaitan dengan meningkatnya kualitas infrastruktur dengan indikator persentase jalan dalam kondisi mantab adalah sebesar 105% tercapai dengan sangat baik. Capaian persentase jalan dalam kondisi mantab berada pada





baik menunjukkan predikat sangat bahwa pengelolaan infrastruktur jalan terkelola dengan baik dan optimal. Indikator Tingkat Kecelakaan lalu lintas sebesar 3% dinilai sangat rendah. Capaian tingkat kecelakaan lau lintas dinilai sangat rendah merupakan capaian yang baik, sebab semakin sedikit tingkat kecelakaan maka infrastruktur penunjang lalu lintas jalan dinilai baik. Indikator Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi sangat baik sebesar 102% atau tercapai dengan sangat baik. Capaian Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik dinilai sangat baik menunjukkan bahwa infrastruktur jaringan irigasi teknis terkelola dengan baik. Indikator Indeks Resiko Sanitasi sebesar 114% atau tercapai dengan sangat baik. Capaian Resiko Sanitasi yang berada pada kisaran predikat sangat baik ini menunjukkan bahwa pengelolaan sanitasi di Kabupaten Pangandaran terkelola dengan baik dan optimal.



Gambar 3. 6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

Sumber: Dinas Perhubungan, Dinas putrprkp





Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .17 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 6

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub	1.951.001.085	1.357.027.714	70%
2	Program Kawasan Permukiman	Dinas PUTRPRKP	1.762.321.000	1.545.646.000	88%
3	Program Pengelolaan Sumber daya Air (SDA)	Dinas PUTRPRKP	24.645.084.500	17.862.792.500	72%
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUTRPRKP	6.344.720.000	5.555.157.400	88%
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUTRPRKP	3.014.979.060	2.462.466.000	82%
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUTRPRKP	1.911.643.000	911.643.000	48%
7	Program Pengembangan Permukiman	Dinas PUTRPRKP	81.686.559.250	62.549.663.250	77%
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUTRPRKP	1.845.883.850	223.558.000	12%
	Jumlah		Rp 123.162.191.745	Rp 92.467.953.864	75,08%





No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	
	Jumlah					

Sumber data: Dinas PUTRPRKP

(Target Capaian sasaran Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap Tahun 2021 di Kabupaten Pangandaran disebabkan oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut :

- 1) Dukungan anggaran pada program dan kegiatan Belum optimal sesuai dengan kebutuhan anggaran ideal, sehinga Perlu adanya dukungan anggaran pada program dan kegiatan agar sesuai dengan kebutuhan anggaran ideal.
- 2) Kebutuhan anggaran yang di refokusing sehingga berdampak pada kurang optimalisasinya pembangunan fasilitas LLAJ, sehingga hal ini agar menjadi prioritas daerah hal tersebut untuk menunjang optimalisasi pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas LLAJ
- 3) Masih terbatasnya kapasitas dan struktur jaringan jalan yang mendukung pengembangan kawasan mina politan, agropolitan dan mina industri
- 4) Masih tingginya pengaduan masyarakat tentang rendahnya kualitas infrastruktur kebinamargaan dan pengairan
- 5) Kurang optimalnya ketersediaan dan kelestarian Sumber Daya Air
- 6) Belum optimalnya pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan RTRW, RTDR dan Peraturan Zonasi.
- 7) Terlaksananya Refocusing dana demi memenuhi kebijakan penanganan pandemi COVID-19
- 8) Lokasi titik sumber mata air belum dapat dan keterbatasan waktu kegiatan
- 9) Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan yang memadai





Solusi untuk meningkatkan pencapaian di masa mendatang adalah:

- 1) Penetapan jaringan jalan strategis pendukung konektivitas status jalan yang lebih tinggi dan pendukung aksesbilitas pengembangan kawasan.
- 2) Peningkatan struktur dan kapasitas jaringan jalan strategis pendukung aksesbilitas pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal, secara bertahap berkelanjutan.
- 3) Peningkatan keterlibatan pihak ketiga (konsultan) dalam perencanaan teknis dan pengawas di lapangan.
- 4) Pemberdayaan Petani Pemakai Air terutama dalam bidang pengelolaan jaringan irigasi, berupa pelatihan kepada petani untuk memberikan pemahaman tentang pemakaian air irigasi
- 5) Pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan prasarana pengendali banjir dan pengaman pantai, termasuk tanggul dan normalisasi sungai serta penanaman tanaman bakau pada daerah pantai.
- 6) Peningkatan kualitas SDM dengan diklat, workshop dan penambahan SDM yang sesuai latar belakang pendidikan baik di ketatausahaan, maupun masing-masing bidang.
- 7) Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tertib tata ruang dan memastikan bahwa proses pemanfaatan ruang telah sesuai dengan rencana tata ruang.
- 8) Perlu adanya pengadaan fasilitas perlengkapan jalan

Tujuan 4:





Meningkatnya Mitigasi bencana dalam pembangunan.

Tabel 3 .18 Capaian Kinerja Tujuan 4

	Capaian Kinerja 2021			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Risiko Bencana	140	145,44	104%	Sangat Tinggi

Sumber data: BPBD

Sasaran 7:

Menurunnya Resiko Bencana di daerah Rawan Bencana

Tabel 3 .19 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

	Capaian Kinerja 2021				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Indeks Risiko Bencana	140	145,44	104%	Sangat Tinggi	

Sumber data: BPBD

Capaian sasaran strategis 7 berkaitan dengan Meningkatnya Mitigasi bencana dalam pembangunan. Dengan indeks risiko bencana dengan capaian 104% dinilai cukup baik. Capaian persentase jalan dalam kondisi mantab berada pada predikat cukup baik menunjukkan bahwa pengelolaan ketahanan bencana terkelola dengan cukup baik dan optimal. Kondisi akhir periode RPJMD pada tahun 2018 menunjukkan angka 155, dan pada tahun 2021 turun hingga 145,44. Hal ini merupakan capaian yang sangat baik. Dengan nilai yang turun dari tahun sebelumnya yang dimana diharapkan bahwa bencana yang terjadi akan semakin sedikit.







Gambar 3. 7 Capaian Kinerja Sasaran strategis 7

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .20 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 7

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penanggulangan Bencana	BPBD	Rp 4.726.587.252	Rp 3.284.613.774	69%
2	Program Pencegahan, Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		Rp 487.200.000	Rp 448.000.000	92%
Jumlah			Rp 5.213.787.252	Rp 3.732.613.774	71,59%

Sumber data : BPBD





Target sasaran Indeks Risiko Bencana Tahun 2021 di Kabupaten Pangandaran tercapai dengan sangat baik disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1. pelaksanan kegiatan yang dilakukan tepat sasaran dan menunjang dengan kegiatan.
- 2. didukung dengan sarana prasarana yang mendukung.
- 3. kinerja pegawai yang menangani kegiatan masing-masing dilakukan dengan tepat
- 4. kinerja pegawai yang menangani kegiatan dilakukan dengan cepat dan tanggap dalam penanganan bencana.
- 5. kinerja pegawai dan pemberian bantuan logistik kepada korban bencana alam





Tujuan 5:

Terwujudnya sarana dan prasarana pusat pemerintahan.

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Tujuan 5

	Cap			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi	80	43%	54%	Rendah

Sumber data: Dinas PUTRPRKP

Sasaran 8:

Mewujudkan pemenuhan bangunan pusat pemerintahan

Tabel 3 .22 Capaian Kinerja Sasaran strategis 8

	Cap			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuh	80	43%	54%	Rendah

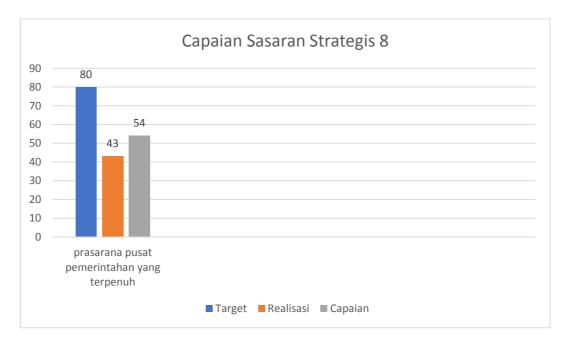
Sumber data: Dinas PUTRPRKP

Capaian sasaran strategis 8 berkaitan dengan Mewujudkan pemenuhan bangunan pusat pemerintahan. Dengan indikator Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi dengan capaian 54% dinilai rendah. Capaian Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi berada pada predikat Rendah menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi terkelola dengan kurang optimal. Kondisi akhir periode RPJMD pada tahun 2018 menunjukkan angka 5 dan pada tahun 2021 naik hingga 41. Peningkatan signifikan ini dinilai sangat baik, namun masih





belum dapat memenuhi target ditahun 2021 sebanyak 80. Pandemi Covid-19 menjadi dugaan utama dalam menghambat terpenuhinya sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi.



Gambar 3 .8 Capaian Kinerja Sasaran strategis 8

Sumber: Dinas PUTRPRKP





Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .23 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 8

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penataan Bangunan Gedung		27.985.374.425	12.148.420.921	43%

Sumber data :Dinas PUTRPRKP

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Pangandaran diperoleh data sampai dengan tahun 2018, jumlah gedung kantor yang dibangun adalah 3 gedung dan jumlah kebutuhan gedung kantor adalah 35 gedung. Selanjutnya pada tahun 2019 belum ada gedung yang dibangun, dan pada tahun 2020 baru melakukan pembangunan gedung kantor. Pada tahun 2019 telah terjadi perlambatan sebesar 18%. Namun pada tahun 2020 malah sebaliknya terjadi percepatan sebesar 11%. artinya pada tahun 2020 baru dilakukan pembangunan gedung kantor yaitu pembangunan gedung Setda dan Bappeda. Berdasarkan target akhir periode RPJMD, pada tahun 2021 memiliki target sebesar 80%. Melihat total capaian saat ini dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, capaiannya masih jauh.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2021 lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat melalui 4 (empat) bidang, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur jalan dan jembatan dan Pariwisata. Sehingga untuk pemenuhan sarana dan prasarana pusat pemerintahan dibangun bertahap dengan pembuatan *Detil Enginering Design (DED*). Namun





dikarenakan banyak refocusing yang dilakukan karena covid, maka capaian akhir RPJMD tahun 2021 belum bisa terealisasikan.





Misi 4:

Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal

Tujuan 6:

Terwujudnya pelestarian seni budaya, pengamalan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan

Tabel 3 .24 Capaian Kinerja Tujuan 6

	Сар	Capaian Kinerja 2021			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Angka Konfilk Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	8	3	38%	Sangat rendah	

Sumber data: Bakesbangpol

Sasaran 9:

Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan

Tabel 3 .25 Capaian Kinerja Sasaraan strategis 9

	Сар	Capaian Kinerja 2021			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal	80%	60%	75%	sedang	
Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik	90%	98%	108%	Sangat tinggi	

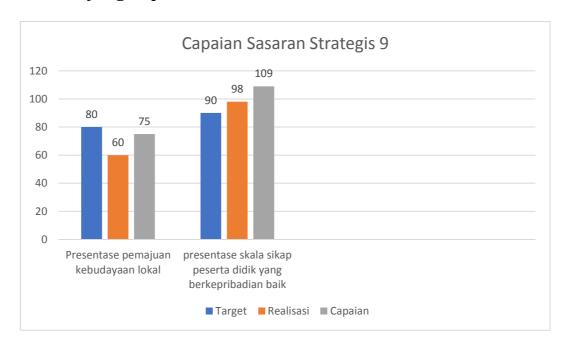
Sumber data: Bakesbangpol

Capaian sasaran strategis 9 berkaitan dengan Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan. Dengan indikator Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal dengan capaian 75% dinilai sedang. Capaian Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi berada pada predikat sedang menunjukkan bahwa Pemajuan Kebudayaan





Lokal terkelola dengan cukup baik. Kondisi akhir periode RPJMD pada tahun 2018 menunjukkan angka 25 dan pada tahun 2021 naik hingga 60. Peningkatan signifikan ini dinilai sangat baik, namun masih belum dapat memenuhi target ditahun 2021 sebanyak 80. Pandemi Covid-19 menjadi dugaan utama dalam menghambat terpenuhinya sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi.



Gambar 3 .9 capaian kinerja sasaran strategis 9

Sumber: Bakesbangpol





Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .26 Penyerapan Anggaran Program Penunjang sasaran strategis 9

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengembanga n Kebudayaan	Disparbud	1.834.400.000	-	-
2	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Disparbud	44.300.000	-	-
Jum	lah				

Sumber data : Disparbud

Target sasaran Terwujudnya pelestarian seni budaya, pengamalan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan

Beberapa faktor penghambat terhadap capaian target tahun 2021 antara lain:

- Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 yang mengharuskan semua kalangan untuk membatasi kegiatan yang dilaksanakan, begitupula kegiatan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran serta masyarakat setempat;
- 2) Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki dalam mengoptimalkan inventrisasi dan mengklasifikasikan objek pemajuan kebudayaan yang ada di Kabupaten Pangandaran sebagai bahan pengembangan objek pemajuan kebudayaan;

Solusi atau upaya untuk perbaikan kineja kedepannya antara lain:





- 1) Pemutakhiran database kebudayaan yang ada di Kabupaten Pangandaran;
- 2) Inventarisasi kebudayaan yang ada sebagai langkah awal dalam pelesatrian dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan;
- 3) Edukasi kepada generasi muda tentang kebudayaan lokal salah satunya melalui pertunjukan seni, permainan tradisional dan ritus, sehingga kedepannya generasi mudah lebih peduli dan menggali serta mau mempelajari seni dan budaya tradisional di Kabupaten Pangandaran. Mereka secara perlahan dapat mengapresiasi seni dan kreatifitas Karya Budaya yang dimiliki masyarakat Kabupaten Pangandaran.





Sasaran 10:

Meningkatnya Kesatuan Bangsa

Tabel 3 .27 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10

	Сар			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Angka Konfilk Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	8	3	38%	Sangat rendah

Sumber data: Bakesbangpol

strategis 10 berkaitan Capaian sasaran dengan Meningkatnya Kesatuan Bangsa. Dengan indikator Angka Konfilk Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan dengan capaian 38% dinilai sangat tinggi. Capaian Angka Konfilk Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan berada pada predikat rendah menunjukkan bahwa semakin sedikit angka kasus Konfilk Suku, Agama, Ras dan Antar golongan di Kabupaten Pangandaran. Kondisi akhir periode RPJMD pada tahun 2018 menunjukkan angka 25 dan pada tahun 2021 Turun hingga 3. Peningkatan signifikan ini dinilai sangat baik. Dimana upaya Pemerintah kabupaten Pangandaran dalam menjaga kententraman masyarakat dilinai berhasil. Dan diharapkan tidak ada lagi Konfilk Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan.







Gambar 3 .10 capaian kinerja sasaran strategis 10

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .28 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 10

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaia n (%)
1	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Bagkesbangp ol			
2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				
3	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Rp 70.374.000	Rp 39.062.000	56%
4	Program Pembinaan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosia,		Rp 209.381.000	Rp 204.387.000	98%





No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaia n (%)
	dan Budaya				
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Rp 1.098.195.000	Rp 1.092.145.000	99%
6	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Rp 25.900.000	Rp 25.900.000	100%
	Jumlah		Rp 1.403.850.000	Rp 1.361.494.000	96,98%

Sumber data :Bakesbangpol

Target sasaran Angka Konfilk Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan Tahun 2021 di Kabupaten Pangandaran tercapai dengan sangat baik disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1. Perencanaan dan koordinasi lintas SKPD dan stakeholder disiapkan dengan matang
- 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara pengurus organisasi dan stkeholder lainnya
- 3. Tersampaikannya informasi perencanaan, pelaksanaan dan monev tentang kewaspadaan nasional, penanganan konflik dan kerjasama intelijen
- 4. Pelaksanaan kegiatan tetap berjalan dengan membatasi peserta dan menerapkan prokes yang ketat
- pelaksanaan kegiatan tetap berjalan yakni komunikasi dan pembinaan ormas melalui perwakilan ormas serta menerapkan prokes yang ketat
- 6. Kinerja Pegawai Bakesbangpol yang baik





Sasaran 11:

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi

Tabel 3 .29 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11

	Caj			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	82%	Tidak ada pemilu	-	-

Sumber data: Bakesbangpol

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .30 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 11

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Pendidikan Politik Masyarakat				
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		Rp 2.036.709.000	Rp 1.836.709.000	90%
Jum	•		Rp 2.036.709.000	Rp 1.836.709.000	90%

Sumber data : Bakesbangpol





Misi 5:

Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing

Tujuan 7:

Meningkatnya kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan daya beli masyarakat secara berkelanjutan

Tabel 3 .31Capaian Kinerja Tujuan 7

	Сар			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,78	68,28	99%	Sangat Tinggi

Sumber data: Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan,

Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, 2021

Sasaran 12:

Meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat

Tabel 3 .32 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12

	Cap			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,78	68,28	99%	Sangat Tinggi

Sumber data: Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, 2021

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan proses pebangunan yang memiliki orientasi pada manusia dengan mengukur perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan sekaligus digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk dalam negara maju, negara





berkembang, atau negara terbelakang. Selain itu, IPM juga menjadi tolok ukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Perhitungan IPM pada seluruh negara telah menggunakan metode baru. Hal ini dikarenakan IPM metode lama mempunyai kelemahan dan perlu diperbaharui. Dampak dari perubahan perhitungan ini menyebabkan terjadi perubahan angka IPM menjadi lebih rendah dibanding dengan metode lama

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .33 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 12

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	Rp 260.711.056.410	Rp 168.669.448.436	65%
2	Program Peningkata n Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes	Rp 33.169.336.142	Rp 27.307.322.650	82%
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinkes	Rp 212.233.000	Rp 83.797.125	39%
4	Program Pemberdaya an Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes	Rp 1.961.315.000	Rp 1.773.847.996	90%





No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
5	Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikpora	Rp 159.364.603.123	Rp 83.102.016.363	52,1%
6	Program Pengemban gan Kurikulum	Disdikpora			
7	Program Pendidik dan Tenaga Kependidik an	Disdikpora	Rp 7.537.500.000	Rp 2.106.500.000	27,9%
8	Program Pengemban gan Bahasa dan Sastra	Disdikpora			
	Jumla	h	Rp 462.956.043.675	Rp 283.042.932.570	61,14%

Sumber data: Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, 2021

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Kondisi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan programprogram tidak berjalan dengan maksimal
- 2) Terbatasnya anggaran dan SDM yang tersedia
- 3) Berkurangnya minat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi
- 4) Belum maksimalnya sarana dan prasarana yang tersedia Solusi untuk meningkatkan pencapaian target sasaran di masa mendatang adalah:
- 1) Melakukan berbagai inovasi dan adaptasi sistem di tengah pandemi





- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana penunjang layanan
- 3) Meningkatkan kapasitas SDM
- 4) Meningkatkan fasilitas layanan pendidikan di sekolah
- 5) Memberikan fasilitas guna memudahkan akses melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi

Tujuan 8:

Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk

Tabel 3 .34 Capaian Kinerja Tujuan 8

	Cap			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase Laju				Sangat
Pertumbuhan	0,57	0,55	96%	Sangat tinggi
Penduduk (LPP)				unggi

Sumber data: Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan

Perempuan dan Anak Kabupaten Pangandaran, 2021

Sasaran 13:

Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk

Tabel 3 .35 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13

	Cap			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,57	0,55	96%	Sangat Tinggi

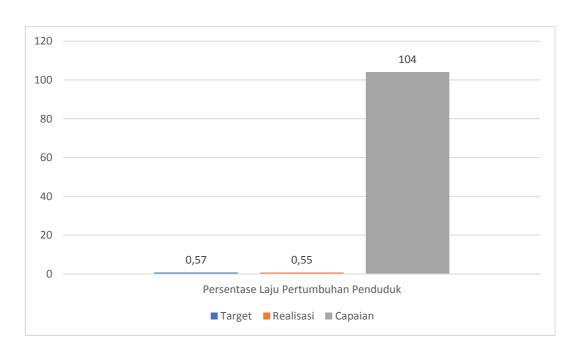
Sumber data: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Menurut Badan Pusat Statistik, Laju Pertumbuhan Penduduk merupakan angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka tersebut dinyatakan sebagai persentase dari penduduk





dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan beberapa metode yaitu, aritmatik, geometric, dan eksponensial. Pertumbuhan penduduk dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat kelahiran (Curde Birth Rate), tingkat kematian (mortalitas), dan migrasi. Biasanya beberapa indikator yang berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk yaitu Age Specific Fertility Rate yang menghitung banyaknya kelahiran tiap 1000 perempuan pada kelompok umur tertentu, dan Total Fertility Rate yang merupakan jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan perempuan selama masa suburnya. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pangandaran mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, laju pertumbuhan penduduk mencapai 0,6%. Sedangkan pada tahun 2017, mengalami penurunan sebesar 0,02%. Pada tahun 2018, nilainya menurun kembali sebesar 0,05% dan konstan sampai tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 kembali meningkat sebesar 0,02% menjadi 0,55%.



Gambar 3 .11 Capaian kinerja sasaran strategis 13

Gambar Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13





Sumber: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .36 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran strategis 13

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	DKBP3A	4.336.852.227	4.124.768.077	95,11%

Sumber data : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Target sasaran Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Tahun 2021 di Kabupaten Pangandaran tercapai dengan sangat baik disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- Terdapat upaya sosialisasi dan pendekatan pada PUS dan masyarakat luas, sehingga partisipasi masyarakat terkait KB menjadi sangat baik
- Adanya penambahan sarana dan prasarana yang mendukung terlaksanakannya program serta penyerapan anggaran yang maksimal
- Jaringan mitra mitra lintas sektoral dan institusi masyarakat untuk mensosialisasikan tentang Keluarga Berencana bekerjasama dengan baik
- 4) Upaya peningkatan kualistas dan kuantitas SDM telah dimaksimalkan.





Tujuan 9:

Meningkatnya pengarusutamaan Gender

Tabel 3 .37 Capaian Kinerja Tujuan 9

	Сар	Capaian Kinerja 2021			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	74,57	74,57	100%	Sangat Tinggi	

Sumber data: Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan

Perempuan dan Anak Kabupaten Pangandaran, 2021

Sasaran 14:

Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender

Tabel 3 .38 Capaian Kinerja Sasaran strategis 14

	Cap	Capaian Kinerja 2021			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	74,57	74,57	100%	Sangat Tinggi	

Sumber data: Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan

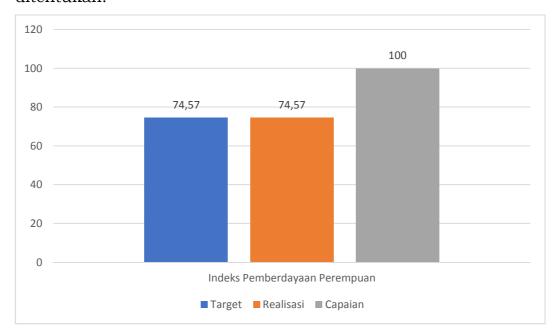
Perempuan dan Anak Kabupaten Pangandaran, 2021

Menurut Badan Pusat Statistik, IPG menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh *United Nation Development Programme* dalam menghitung *Gender Development Index* (GDI) dan *Human Development Indeks* (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia. Capaian sasaran strategis 14 terkait meningkatnya pemberdayaan dan kesetaraan gender dengan indikator kinerja





Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) pada tahun 2021 sebesar 100%. Dari target yang ditetap kan sebesar 74,57 realisasi nya juga di angka 74.57, sehingga kategori capaian dari Indeks Pemberdayaan Gender adalah sangat baik. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa kinerja dari perangkat daerah Kabupaten Pangandaran yang mengampu sasaran strategis 14 dapat dikatakan baik, karena dapat memenuhi target kinerja yang telah ditentukan.



Gambar 3 .12 capaian kinerja sasaran strategis 14

Sumber data: Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pangandaran, 2021





Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .39 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 14

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengarusutama an Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DKBP3A	Rp 157.701.505	Rp 157.701.505	100%
2	Program Perlindungan Perempuan	DKBP3A	Rp 17.400.000	Rp 17.400.000	100,00%
3	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	DKBP3A	Rp 64.796.000	Rp 57.556.000	88,83%
	Jumlah		Rp 239.897.505	Rp 232.657.505	96,98%

Sumber data : Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pangandaran, 2021

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan, diantaranya yaitu:

- Upaya peningkatan keterlibatan perempuan dalam lembaga legislatif, maupun upaya pemberdayaan perempuan dengan membangun sinergitas dengan masyarakat dan tenaga fungsional khusus
- 2) Terdapat optimalisasi dukungan anggaran untuk penyediaan fasilitasi dan pelatihan guna meningkatkan usaha dan ketrampilan perempuan.
- 3) Terdapat optimalisasi keterlibatan dan dukungan masyarakat, Organisasi Profesi, Asosiasi, dan Lembaga Swasta untuk menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak





Tujuan 10:

Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga

Tabel 3 .40 Capaian Kinerja Tujuan 10

	Сар	Capaian Kinerja 2021			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Indeks Pembangunan Keolahragaan	85	82,35	97%	Sangat Tinggi	

Sumber data: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, 2021

Sasaran 15:

Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga

Tabel 3 .41 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15

	Сар	Capaian Kinerja 2021			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Indeks Pembangunan Kepemudaan	0,27	186,27	690%	Sangat Tinggi	
Indeks Pembangunan Keolahragaan	0,85	82,35	97%	Sangat Tinggi	

Sumber data: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, 2021

Pengoptimalan peran pemuda di Kabupaten Pangandaran memiliki peran penting baik dalam bidang ekonomi, politik, keamananan dan sosial budaya. Pemberdayaan pemuda dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya pembinaan pemuda dan pengelolaan potensi pendukung, pemberdayaan organisasi sosial kepemudaan seperti karang taruna maupun Non-Government Organization (NGO) pemuda yang bergerak di berbagai bidang, mengembangkan minat dan bakat masyarakat dalam bidang keolahragaan. Indeks Pembangunan Keolahragaan atau Sport Development Index (SDI) merupakan indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan dalam pembangunan olahraga yang berdasarkan empat dimensi dasar, yaitu (1) ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga, (2) sumber daya manusia atau tenaga





keolahragaan yang terlibat dalam kegiatan olahraga, (3) pertisipasi warga masyarakat untuk melakukan olahraga secara teratur dan (4) derajat kebugaran jasmani yang dicapai oleh masyarakat.

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .42 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 15

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Disdikpora	Rp 2.790.149.321	Rp 1.352.667.223	48,4%
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Disdikpora	Rp 2.000.000.000	Rp 1.450.000.000	72,5%
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Disdikpora			
	Jumlah		Rp 4.790.149.321	Rp 2.802.667.223	58,51%

Sumber data: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, 2021

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Kondisi Pandemi Covid-19 yang mengharuskan untuk tidak bertatapmuka secara langsung mengakibatkan programprogram tidak berjalan dengan maksimal
- 2) Kurangnya tenaga fungsional khusus yang membina bakat dan minat pemuda di Kabupaten Pangandaran





- 3) Kurangnya fasilitas pendukung, baik ruangan maupun organisasi yang memfasilitasi minat dan bakat pemuda di Kabupaten Pangandaran
- 4) Kepemudaan dan olahraga belum sepenuhnya menjadi fokus pembangunan
- 5) Masih rendahnya pencapaian atlet yang berprestasi Solusi untuk meningkatkan pencapaian target sasaran di masa mendatang adalah:
- 1) Melakukan berbagai inovasi dan adaptasi sistem di tengah Pandemi Covid-19, sehingga tetap dapat dilangsungkan pelatihan keolahragaan maupun pemberdayaan pemuda di Kabupaten Pangandaran
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga khusus yang membina minat dan bakat pemuda di Kabupaten Pangandaran
- 3) Meningkatkan fasilitas berupa ruangan maupun sarana lain yang dapat menunjang peningkatan kapasitas pemuda
- 4) Memberikan perhatian lebih pada urusan kepemudaan dan keolahragaan, sehingga dapat dimaksimalkan terkait pengembangannya baik melalui anggaran maupun program-program khusus daerah
- 5) Meningkatkan penjaringan minat dan bakat baru dalam keolahragaan, pembinaan bagi atlet, serta insentif bagi atlet yang berhasil menjuarai perlombaan sehingga dapat menjadi motivasi khusus





Tujuan 11:

Menurunnya tingkat kemiskinan

Tabel 3 .43 Capaian Kinerja Tujuan 11

	Сар	Capaian Kinerja 2021			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
Persentase penurunan angka miskin	0,25	-0,66	-264%	Sangat Rendah	
Persentase PPKS yang Mandiri	30	39,52	132%	Sangat Tinggi	

Sumber data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

Sasaran 16:

Menurunnya angka kemiskinan

Tabel 3 .44 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16

	Cap			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase PPKS yang Mandiri	30	39,52	132%	Sangat Baik

Sumber data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu isu strategis yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Ukuran kemiskinan didasarkan dengan membandingkan pendapatan atau pengeluaran rumah tangga dengan garis kemiskinan yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.





Capaian sasaran strategis 16 terkait dengan menurunnya angka kemiskinan menunjukkan pencapaian kinerja sebesar 132% pada indikator Persentase PPKS yang Mandiri dari target yang ditentukan sebesar 30% terealisasi sebesar 39,52%. Hal tersebut masuk dalam kategori sangat baik, sehingga dapat kinerja menunjukkan bahwa untuk menurunkan angka kemiskinan dalam indikator Persentase PPKS yang Mandiri telah berjalan optimal dan berhasil. Namun demikian, pada indikator persentase penurunan angka miskin menunjukkan kategori capaian sangat rendah. Capaian kinerja pada indikator tersebut sebesar -264%, dengan target awal sebesar 0,25 dan realisasinya sebesar 0,66.Hal ini menjadi catatan dalam upaya perbaikan Kabupaten Pangandaran, sehingga peningkatan PPKS yang mandiri dapat menurunkan angka kemiskinan yang ada.



Gambar 3 13 capaian kinerja sasaran strategis 16

Sumber data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021





Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .45 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 16

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pemberdayaan Sosial	DINSOSPMD	Rp. 131.500.000	Rp. 68.990.145	52%
2	Program Rehabilitasi Sosial	DINSOSPMD	Rp. 2.398.310.863	Rp. 928.311.150	39%
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	DINSOSPMD	Rp. 877.448.155	Rp. 461.124.239	53%
4	Program Penanganan Bencana	DINSOSPMD	Rp. 393.394.149	Rp. 191.766.966	49%
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	DINSOSPMD	Rp. 99.990.000	Rp. 31.660.000	32%
Juml	lah		Rp 3.900.643.167	Rp 1.681.852.500	43,12%

Sumber data : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

 Adanya beberapa kegiatan yang berdampak tidak langsung dalam pengurangan angka kemiskinan, sehingga pengaruh kinerja atas peningkatan PPKS yang mandiri terhadap penurunan angka kemiskinan tidak dapat langsung terlihat





- 2) Belum optimalnya perencanaan dan realisasi program dan kegiatan sehingga realisasi anggaran masih rendah dan berdampak pada pencapian indikator kinerja
- 3) Kondisi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan kondisi ekonomi secara signifikan

Solusi untuk meningkatkan pencapaian target sasaran di masa mendatang adalah:

- Optimalisasi perencanaan program kegiatan dengan memaksimalkan waktu serta pelibatan tenaga ahli dalam memberikan pertimbangan atas hasil perencanaan
- 2) Optimalisasi penyerapan anggaran dengan memaksimalkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada serta memperluas cakupan program dan kegiatan
- 3) Penambahan sumberdaya manusia pada perangkat daerah guna mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan serta memperluas jangkauan kepada masyarakat
- 4) Perlu harmonisasi antar instansi guna menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program lintas OPD





Misi 6:

Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan

Tujuan 12:

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Tabel 3 .46 Capaian Kinerja Tujuan 12

	Cap			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase pertumbuhan PDRB	4,40	1	1	1

Sumber data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,2021

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dalam pertumbuhan output perkapita yang dilihat secara jangka panjang. Untuk mengetahui kondisi ekonomi pada suatu wilayah dalam periode tertentu, salah satu indikator pengukurnya yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu wilayah dengan kurun waktu tertentu.





Sasaran 17:

Menurunnya kesenjangan antar wilayah

Tabel 3 .47 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17

	Capa			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Gini	0,33	0,35	94%	Sangat Tinggi
Indeks Desa Membangun	0,7251	0,7059	97%	Sangat Tinggi

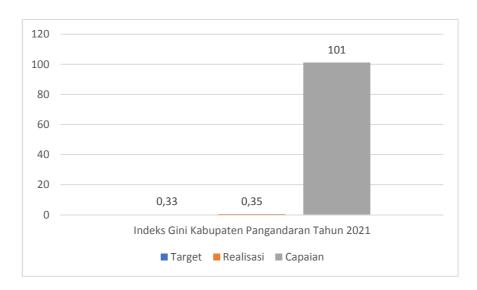
Sumber data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

Capaian sasaran strategis 17 berkaitan dengan Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan indikator Indeks Gini. Pengukuran Indikator indek gini menggunakan indikator negatif yaitu jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya. Artinya semakin besar nilai rasio indeks gini, semakin besar angka kesenjangan atau ketimpangan. Capaian Indeks Gini Kabupaten Pangandaran tahun 2021 sebesar 0,35% dengan kategori baik. Capaian tersebut, semakin baik dibandingkan dengan capaian beberapa tahun kebelakang. Pada tahun 2018 dan tahun 2020 capaiannya sebesar 0,345, dan menurun pada tahun 2021 menjadi 0,35. Hal ini merupakan perkembangan yang cukup signifikan dalam menurunkan kesenjangan antar wilayah.

Selain itu, pada indikator Indeks Desa Membangun dengan target awal 0,7251 Kabupaten Pangandaran berhasil merealisasikan pada angka 0,7059. Sehingga mencapai kategori kinerja baik. Meskipun masih belum teralisasikan secara 100%, namun pencapaian kinerja tersebut dapat dikatakan sangat baik, mengingat Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten baru yang terus membangun.

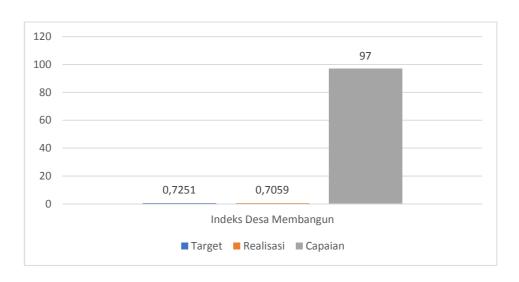






Gambar 3 .14 capaian Indeks Gini

Sumber data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021



Gambar 3 .15 capaian Indeks Desa membangun

Sumber data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021





Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .48 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 17

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Rp 56.870.000	Rp 54.070.000	95,08%
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat		Rp 2.193.817.550	Rp 1.285.935.250	58,62%
	Jumlah	1	Rp 2.250.687.550	Rp 1.340.005.250	59,54%

Sumber data : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, diantaranya yaitu:

- 1) Kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Pangandaran dapat diturunkan merupakan dampak dari akses transportasi pada wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Pangandaran semakin baik. Hal tersebut juga dapat meningkatkan pendapatan perkapita penduduk secara merata
- 2) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang terus dilakukan melalui perbaikan kualitas pendidikan,pembentukan karakter, moral dan akhlak serta perluasan jangkauan akses layanan kesehatan dasar gratis dan terjangkau





3) Adanya optimalisasi pembinaan administrasi desa melalui Program Administrasi Pemerintah Desa

Sasaran 18:

Menurunnya tingkat pengangguran

Tabel 3 49 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18

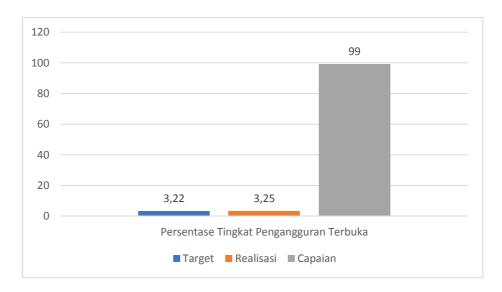
	Cap			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase Tingkat pengangguran terbuka	3,22%	3,25%	101%	Sangat Tinggi

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi, 2021

Capaian strategis 18 berkaitan dengan menurunnya tingkat pengangguran di Kabupaten Pangandaran. Realisasi capaian pada sasaran strategis dengan indikator persentase tingkat pengangguran terbuka ini pada tahun 2021 sebesar 3,25% dengan kategori capaian sangat baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020. capaian tersebut sangat signifikan ketercapaiannya. Pada tahun 2019, realisasi capaian sebesar 4,52% dan pada tahun 2020 realisasi capaiannya sebesar 5,08. Sedangkan pada tahun 2021, capaiannya meningkat signifikan pada angka 3,25%. Hal tersebut mengindikasikan, programprogram yang dijalankan telah membawa dampak perubahan dan perkembangan yang lebih baik. Namun begitu, upaya-upaya peningkatan untuk menurunkan persentase tingkat pengangguran terbuka terus diupayakan sehingga dapat mencapai visi dan misi yang telah diharapkan.







Gambar 3 16 capaian persentase Tingkat pengangguran terbuka (capaian sasaran strategis 18)

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi, 2021

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .50 Penyerapan Anggaran Penunjang Sasaran Strategis 18

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	DTKIT	Rp. 65.215.682	Rp. 59.654.000	91%
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	DTKIT	Rp. 1.202.674.050	Rp. 1.199.228.050	100%
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	DTKIT	Rp. 53.474.000	Rp. 27.374.000	51%
4	Program Hubungan Industrial	DTKIT	Rp. 22.402.675	Rp. 22.396.000	100%





No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
	Jumlah		Rp1.343.766.407	Rp 1.308.652.050	97,39%

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi, 2021

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Minat perusahaan di Kabupaten Pangandaran masih kurang dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja
- 2) Masih banyak Pencari Kerja asal Pangandaran yang belum memiliki keahlian khusus
- 3) Terdapatnya penyesuaian anggaran
- 4) Minimnya pengetahuan masyarakat terkait informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja

Solusi untuk meningkatkan pencapaian target sasaran di masa mendatang adalah:

- 1) Melaksanakan bimbingan terhadap perusahaan dalam menyusun Rencana Tenaga Kerja
- 2) Pembangunan gedung BLK untuk mengasah kemampuan pencari kerja sesuai bidang kompetensinya sehingga pencari kerja asal Kabupaten Pangandaran mempunyai daya saing
- 3) Memaksimalkan setiap kegiatan beserta anggaran sehingga didapat capaian yang maksimal pula dan memberikan kontribusi lebih terhadap capaian program.
- **4)** Menyediakan informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Kabupaten Pangandaran.





Sasaran 19:

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

Tabel 3 .51 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 19

	Capa	ian Kinerja 20)21	
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase pertumbuhan PDRB	4,40%	-	-	-
Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM	98	100	102%	Sangat Tinggi
Jumlah Koperasi yang sehat	2	0	0%	Sangat Rendah
Pola Pangan Harapan	97	93,40	96%	Sangat Tinggi
Jumlah kunjungan wisata	6.000.000	3.604.129	60%	Rendah
Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari Global Sustainable Tourism Council (GSTC)	1	0	0%	Sangat Rendah

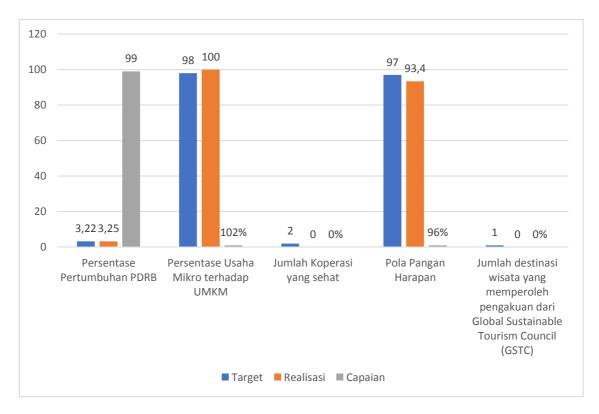
Sumber data: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi dan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pangan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Sumber data : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

Capaian pada sasaran strategis 19 berkaitan dengan Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan dengan indikator kinerja persentase pertumbuhan PDRB, Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM, Jumlah koperasi yang sehat, Pola pangan harapan, Jumlah kunjungan wisata, Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari *Global Sustainable Tourism Council* (GSTC) menunjukkan capaian kinerja rata-rata sebesar 51,65%. Indikator kinerja Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM tingkat capaiannya sebesar 102% dengan kategori sangat baik. Sedangkan untuk indikator Jumlah Koperasi yang sehat capiannya sebesar 0% dengan kategori sangat rendah.





Namun pada indikator Pola Pangan Harapan capaiannya mencapai 96% dengan kategori baik. Selanjutnya pada indikator Jumlah Kunjungan Wisata tingkat capaiannya sebesar 60% dengan kategori rendah. Pada indikator kinerja terakhir yaitu Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari Global Sustainable Tourism Council (GSTC) tingkat capaiannya sebesar 0% dengan kategori sangat rendah

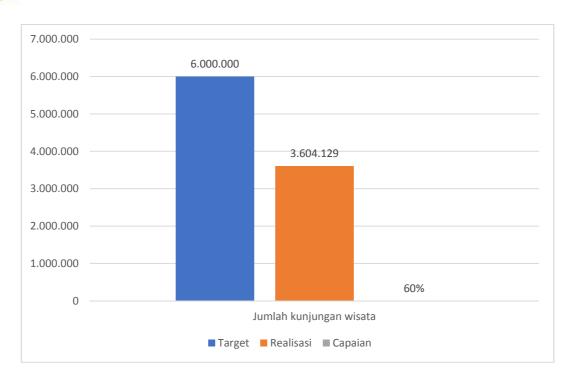


Gambar 3 .17 Capaian kinerja sasaran strategis 19

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi, 2021







Gambar 3 .18 persentase kunjungan wisatawan

Sumber data: Dinas Tenaga Pariwisata

Pencapaian kinerja sasaran didukung oleh program yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 .52 Penyerapan Anggaran Program Penunjang Sasaran Strategis 19

No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaia n (%)
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	DTKIT	Rp. 299.267.750	Rp. 272.990.350	91%
2	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	DTKIT	Rp. 5.061.800	Rp. 5.061.800	100%
3	Program Pengelolaan Perikanan	DKPKP	Rp. 1.341.699.700	Rp. 1.259.209.000	94%





No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaia n (%)
	Tangkap				
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	DKPKP	Rp. 5.205.000	Rp. 5.205.000	100%
5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKPKP	Rp. 1.788.111.800	Rp. 1.362.150.600	76%
6	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKPKP	Rp -	Rp -	0%
7	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	DKPKP	Rp. 500.000.000	Rp. 489.075.000	98%
8	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKPKP	Rp. 545.036.654	Rp. 533.662.654	98%
9	Program Penanganan Kerawanan Pangan	DKPKP	Rp. 86.843.100	Rp. 34.895.100	40%
10	Program Pengawasan Keamanan Pangan	DKPKP	Rp -	Rp -	0%
11	Program Pelayanan	DPMPTSP	Rp. 504.734.000	Rp. 240.639.051	48%





No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaia n (%)
	Penanaman Modal				
12	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Disdagkop UMKM	Rp1.447.509.000	Rp 992.563.000	69%
13	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Disdagkop UMKM	Rp 58.730.291	Rp 48.000.000	82%
14	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Disdagkop UMKM	Rp 70.145.000	Rp 52.582.480	75%
15	Program Pengembanga n UMKM	Disdagkop UMKM	Rp 264.475.350	Rp 28.477.100	11%
16	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Disdagkop UMKM	Rp 100.919.000	Rp 58.880.000	58%
17	Program Penyediaan Dan Pengembanga n Prasarana Pertanian	DISTAN	Rp 765.000.000	Rp 728.880.200	95%
18	Program Penyediaan Dan Pengembanga n Prasarana Pertanian	DISTAN	Rp3.502.954.700	Rp3.490.704.200	100%
19	Program Penyuluhan Pertanian	DISTAN	Rp1.666.941.014	Rp1.250.719.316	75%





No	Nama Program	SKPD Penanggung Jawab	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaia n (%)
Jumlah			Rp1.666.941.014	Rp1.250.719.316	75%

Sumber data: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi dan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pangan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Sumber data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2021

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran adalah:

- 1) Dokumen RPIK belum selesai disusun
- 2) Seringnya terjadi perubahan regulasi yang ada sesuai perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi terkini
- 3) Kondisi alam (iklim) yang berubah/tidak bisa diprediksi berpengaruh kepada hasil produksi pertanian
- 4) Belum maksimalnya program KUR bagi Peternak di Kabupaten pangandaran
- 5) Belum dilakukannya asesmen terhadap kriteria Destinasi GSTC Versi 0.2 tanggal 06 Desember 2021 dengan indikator kinerja dan tujuan pembangunan berkelanjutan;
- 6) Kesiapan sumber daya juga menjadi salah satu faktor ketidaktercapaian target persentase pemenuhan indikator GSTC-D 10%.
- 7) Wisawatan sebagian besar mengetahui Pangandaran sebagai destinasi wisata yang mengandalkan daya tarik wisata pantai dan bahari, padahal ada banyak daya tarik wisata lainya seperti desa wisata, wisata petualang, wisata gua dan lain sebagainya;
- 8) Pertimbangan jarak tempuh menuju pangandaran dan pilihan moda transportasi menuju Kabupaten Pangandaran dan





- destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran masih terbatas;
- 9) Belum meratanya pengembangan fasilitas wisata di destinasi wisata seperti ketersedian dan variasi akomodasi menimbulkan penumpukan wisatawan di satu destinasi wisata yaitu Pantai Pangandaran dan kurangnya ketersediaan lahan parkir yang nyaman terutama di Pantai Pangandaran menjadi salah satu penyebab kemacetan ketika volume kendaraan naik pada liburan panjang seperti libur hari raya, tahun baru dan libur sekolah;
- 10) Belum optimalnya penyelenggaraan event-event wisata yang bersifat viral dan massif baik dalam skala nasional ataupun internasional yang mampu menarik wisatawan baik pada musim liburan atapun musim sepi kunjungan;
- 11) Banyaknya informasi isu-isu bencana dan berita hoax yang belum optimal dalam penanganannya, ditambah lagi dengan kondisi alam yang tidak menentu menjadi salah satu pengaruh untuk berkunjung ke Kabupaten Pangandaran.

Solusi untuk meningkatkan pencapaian target sasaran di masa mendatang adalah:

- 1) Dokumen RPIK disusun bertahap, disesuaikan dengan anggaran yang dialokasikan
- 2) Mengadakan sosialiasi mengenai informasi SIINas baik bagi Pemerintah daerah maupun bagi pengguna yaitu Perusahaan atau IKM
- 3) Perlu adanya Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota terkait dengan perubahan regulasi yang ada
- 4) Melakukan kegiatan akselerasi dampak perubahan iklim
- 5) Penambahan anggaran untuk program KUR bagi Peternak





- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata salah satunya dengan pengembangan daya tarik wisata/atraksi, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, pembangunan fasilitas pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat.
- 7) Mempermudah pergerakan wisatawan menuju ke Kabupaten Pangandaran dan destinasi pariwisata dilakukan dengan cara peningkatan aksesibilitas berupa prasarana, sarana, dan sistem transportasi.
- 8) Meningkatkan Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi, peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat, dan peningkatan kesadaran dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- 9) Mengembangkan investasi pariwisata dengan menerapkan sejumlah strategi di antaranya memberikan insentif, kemudahan, serta melakukan promosi investasi.
- 10) Mengembangkan pasar dengan fokus pada kepuasan wisatawan, ketika harapan wisatawan terhadap destinasi dan pelayanan wisata yang diberikan sesuai, kemungkinan besar mereka akan berkunjung kembali serta akan merekomendasikan destinasi wisata kita kepada wisatawan lain (promosi dari mulut ke mulut).
- 11) Mengembangkan pengelolaan destinasi wisata musiman dengan menciptakan event-event yang bersifat viral dan massif yang dapat menarik wisatawan untuk datang pada musim sepi kunjungan dan menambah lama tinggal wisatawan pada musim libur.
- 12) Mengembangkan sistem informasi terpadu dan sistem respon cepat dalam pemberian informasi dan klarifikasi akan suatu pemberitaan terutama isu-isu negative atau hoaxs sehingga isu-isu negative dan informasi yang tidak benar dapat diminimalisir.





- 13) Pada tahun 2021 apabila dinilai secara mandiri atau ditelaah oleh setiap Bidang Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabuapaten Pangandaran dari 174 indikator ada sekitar 51 indikator atau 29,31% yang dilaksanakan atau dokumen pendukungnya ada;
- 14) Menyiapkan sumber daya dengan optimal untuk mendukung penerapan destinasi berkelanjutan di destinasi yang ada baik secara pemenuhan indikator ataupun untuk persiapan asesmen





3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2021 dilakukan untuk mengetahui trend pergerakan nilai capaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Adapun perbandingan capaian indikator kinerja utama tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3 .53 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2020

	TUJUAN/			2020			2021	
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	T.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi				60	Belum ada hasil Penilaian menpan	
2.	S1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	NA		WTP	Belum ada hasil penilaian Menpan	
3		Tingkat Kapabilitas APIP	3	3	66,67	3	2	67%
4		Tingkat Kematangan implementasi SPIP	3	3	100,00	3	2	67%
5		Nilai AKIP	В	В	100	BB	Belum ada hasil penilaian Menpan	
6		Persentase Penggunaan E- Procurement thd Belanja Pengadaan	88,00	97,30	100,85	90	95,08%	106%
7	S2. Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Indeks Profesionalitas ASN	65	38.92	59,87%	70	53	76%
8		Tingkat Kematangan E-Goverment	2,25	3,02	134 %	3	2,38	79%
9		Indeks Reformasi Birokrasi				60	Belum ada hasil Penilaian menpan	-
10	S3. Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Daerah				29,6	14,81	50%
11		Survey Kepuasan Masyarakat				80 (Sangat Baik)	84,92	106%
12	T2. Terciptanya Ruang Wilayah Kabupaten yang harmonis dan berwawasan lingkungan	Ketaatan terhadap RTRW	30	35	117%	40%	12%	30%



	TILLIAN /			2020			2021	
NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
13		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,91	65,22	103,67%	63,36%	67,58%	107%
14	S4. Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap rencana Tata Ruang Wilayah	Ketaatan terhadap RTRW	30	35	117%	40%	12%	30%
15	S5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,91	65,22	103,67%	63,36	67,58	107%
16	T3. Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur yang berkualitas	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap				95%	89%	94%
17	S6. Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas	Persentase jalan dalam kondisi mantap	85	85	100%	85%	89%	105%
18		Tingkat kecelakaan lalu lintas	0,031	0,002	155%	0,029	0,001	3%
19		Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik	65	68	104%	70%	72%	104%
20		Persentase Rumah Tangga Dengan Akses air minum	65	66	101%	75	88%	117%
21		Indeks Resiko Sanitasi	36	32	90%	34	48	141%
22	T4. Meningkatnya Mitigasi bencana dalam pembangunan.	Indeks Risiko Bencana				140	145,44	104%
23	S7. Menurunnya Resiko Bencana di daerah Rawan Bencana	Indeks Risiko Bencana				140	145,44	104%
24	T5. Terwujudnya sarana dan prasarana pusat pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi	22	11	52%	80	43	54%
25	S8. Mewujudkan pemenuhan bangunan pusat pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi	22	11	52%	80	43	54%
26	T6. Terwujudnya pelestarian seni budaya, pengamalan nilai- nilai kebangsaan dan keagamaan	Angka Konfilk Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	10	0	100%	8	3	38%
27	S9. Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan	Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal	70%	60%	85,71%	80%	60%	75%



	TUJUAN/	N/		2020			2021		
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	
28		Persentase skala sikap peserta didik yang				90	98	109%	
29	S10. Meningkatnya Kesatuan Bangsa	berkepribadian baik Angka Konfilk Suku, Agama, Ras dan				8	3	38%	
30	S11. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi	Antar Golongan Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu				82%	Tidak ada pemilu		
31	T7. Meningkatnya kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan daya beli masyarakat secara berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				68,78	68,28	99%	
32	S12. Meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				68,78	68,28	99%	
33	T8. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,57%	0,55%	103,63%	0,57	0,55	96%	
34	S13. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,57%	0,55%	103,63%	0,57	0,55	96%	
35	T9. Meningkatnya pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	66,55	69,20	103,98%	66,55	74,57	112%	
36	S14. Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	66,55	69,20	103,98%	66,55	74,57	112%	
37	T10. Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga	Indeks Pembangunan Keolahragaan	0,80	0,73	91,25	85	82,35	97%	
38	S15. Meningkatnya	Indeks Pembangunan Kepemudaan	0,26	0,55	211,54	0,27	186,27	690%	





	TUJUAN/			2020			2021	
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
	Daya Saing Pemuda & Olahraga				70			,,
39		Indeks Pembangunan Keolahragaan	0,80	0,73	91,25	0,85	82,35	97%
40	T11. Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase PPKS yang Mandiri				30	39,52	132%
41	S16. Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga	Persentase PPKS yang Mandiri				30	39,52	132%
42	T12. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Persentase pertumbuhan PDRB				4,40	-	1
43	S17. Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Indek Gini				0,33	0,35	101%
44	S18. Menurunnya tingkat pengangguran	Persentase Tingkat pengangguran terbuka	3,34	5,08	65,75	3,22%	3,25%	101%
45	S19. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Persentase pertumbuhan PDRB				4,40%	-	-
46		Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM	2	1	50%	98	100	102%
47		Jumlah Koperasi yang sehat	97	96	98,96%	2	0	0%
48		Pola Pangan Harapan	94,00	94,50	100,53%	97	93,40	96%
49		Jumlah kunjungan wisata		2.930.506		6.000.000	3.604.129	60%
50		Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari Global Sustainable Tourism Council (GSTC)				1	0	-

Sumber: Pangandaran dalam Angka 2022, Bappeda, Sekretariat Daerah.





Berdasarkan penjelasan pada tabel perbandingan capaian kinerja antara tahun 2020 dan 2021, terdapat beberapa indikator sasaran yang mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satunya adalah Persentase Penggunaan E- Procurement thd capaiannya meningkat menjadi Belanja Pengadaan, 106% dibandingkan dengan tahun 2020 dengan capaian 100.8%. selain itu Indeks Profesionalitas ASN juga mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 76% di tahun 2021 dari 59% di tahun 2020. Indikator lainnya yang mengalami peningkatan adalah indeks kualitas lingkungan hidup dengan capaian 107% pada tahun 2021 dari capaian 103% di tahun 2020. Persentase jalan dalam kondisi mantap juga mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2021 sebesar 105% dari 100% di tahun 2020. Selain itu prasarana pusat pemerintahan juga mengalami capaian yang sangat baik di tahun 2021 sebesar 54% dari 50% di tahun 2020.

Salah satu indikator dengan capaian tertinggi adalah indeks pemberdayaan gender yang mengalami peningkatan sebesar 9% yaitu dengan capaian 112% pada tahun 2021 dari 103% pada tahun 2020. Hal ini menjadi bukti nyata bahwasanya kabupaten Pangandaran sangat memberikan pemberdayaan pada wanita dan memberikan ruang untuk berkembang. Persentase PPKS yang mandiri juga mengalami pencapaian yang sangat baik hingga 132%, hal ini menunjukan bahwa perlahan kemiskinan yang ada di Kabupaten Pangandaran dapat teratasi dengan baik.





3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir RPJMD

Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan target akhir RPJMD dilakukan untuk mengetahui pergerakan nilai capaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Adapun perbandingan capaian indikator kinerja utama tahun 2021 dengan target akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3 .54 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan target Akhir RPJMD

N O	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	Belum ada hasil Penilaian menpan	60	
2.	Opini BPK terhadap LKPD	Poin	Belum ada hasil penilaian Menpan	WTP	
3	Tingkat Kapabilitas APIP	Poin	2	3	67%
4	Tingkat Kematangan implementasi SPIP	Poin	2	3	67%
5	Nilai AKIP	poin	Belum ada hasil penilaian Menpan	ВВ	
6	Persentase Penggunaan E- Procurement thd Belanja Pengadaan	%	95,08%	90%	106%
7	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	53	70	76%
8	Tingkat Kematangan E-Goverment	Poin	2,38	3	79%





N O	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN
9	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Daerah	%	14,81	29,6	50%
10	Survey Kepuasan Masyarakat	Persepsi	84,92	Sangat baik	
11	Ketaatan terhadap RTRW	%	12%	40%	30%
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	67,58	63,36%	107%
13	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	%	89%	95%	94%
14	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	89%	85%	105%
15	Tingkat kecelakaan lalu lintas	Poin	0,001	0,029	3%
16	Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik	%	72%	70%	103%
17	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses air minum	%	88%	75%	117%
18	Indeks Resiko Sanitasi	Poin	48	34	141%
19	Indeks Risiko Bencana	Poin	145,44	140	104%
20	Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi	%	43%	80	54%
21	Angka Konfilk	Angka	3	8	38%





N	INDIKATOR		REALISASI	TARGET	TINGKAT
0	KINERJA	SATUAN	2021	AKHIR	KEMAJUAN
	0.1			RPJMD	
	Suku, Agama,				
	Ras dan Antar				
	Golongan				
22	Persentase Pemajuan	%	60	80	75%
	Kebudayaan Lokal				. 0 / 0
	Persentase				
	skala sikap				
23	peserta didik	%	98%	90%	109%
	yang				10970
	berkepribadian				
	baik				
	Persentase				
24	partisipasi	Angka	Tidak ada	82%	
41	masyarakat dalam	Tiligha	pemilu	02/0	
	pemilu				
	Indeks				
25	Pembangunan	Poin	68,28	68,78	99%
	Manusia (IPM)				
	Persentase Laju				
26	Pertumbuhan	%	0,55%	0,57%	96%
	Penduduk (LPP)				
	Indeks				
27	Pemberdayaan	Poin	74,57	66,55	112%
	Gender (IPG)				
	Indeks				
28	Pembangunan	Poin	82,35	0,85	97%
	Keolahragaan				
	Indeks				
29	Pembangunan	Poin	186,27	0,27	690%
	Kepemudaan				
	Indeks				
30	Pembangunan	Poin	82,35	0,85	97%
	Keolahragaan				
	Persentase PPKS	2.1	00.75	00.7-	
31	yang mandiri	%	39,52	39,52	100%
32	Indek Gini	Poin	0,35	0,33	101%
-	Persentase Tingkat	6.1	0.0707	2.22	
33	pengangguran	%	3,25%	3,22	101%





N O	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2021	TARGET AKHIR RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN
	terbuka				
34	Persentase pertumbuhan PDRB	%		4,40	
35	Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM	%	100	98	101%
36	Jumlah Koperasi yang sehat	Angka	0	2	0%
37	Pola Pangan Harapan	Poin	93,40	97	96%
38	Jumlah kunjungan wisata	Jumlah	3.604.129	6.000.000	60%
39	Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari Global Sustainable Tourism Council (GSTC)	Jumlah	0	1	0%

Sumber data: BPS Kabupaten Pangandaran 2022, Jawa Barat dalam Angka 2022 & BPS Nasional

Berdasarkan data pada tabel 3.9 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat 15 Indikator yang realisasinya sudah mencapai target akhir RPJMD, seperti Persentase Penggunaan E- Procurement terhadap Belanja Pengadaan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Persentase jalan dalam kondisi mantap, Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik, Persentase Rumah Tangga Dengan Akses air minum, Indeks Resiko Sanitasi, Indeks Risiko Bencana, Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), Indek Gini, Persentase Tingkat pengangguran terbuka, dan Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM. Kemudian terdapat 6 indikator utama yang sudah sangat mendekati target





akhir RPJMD, karena capaian dari 6 indikator ini sudah lebih dari 90%. Sedangkan, untuk 18 indikator lainnya belum mencapai target akhir RPJMD, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut agar target akhir RPJMD selanjutnya dapat tercapai.

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Provinsi dan Standar Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021 dengan Standar Provinsi dan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3 .55 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Provinsi/ Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kabupaten Pangandaran	Realisasi Provinsi Jawa Barat	Realisasi Nasional
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	Belum ada hasil Penilaian menpan	-	-
2.	Opini BPK terhadap LKPD	Poin	Belum ada hasil penilaian Menpan	-	-
3	Tingkat Kapabilitas APIP	Poin	2	-	-
4	Tingkat Kematangan implementasi SPIP	Poin	2	-	-
5	Nilai AKIP	poin	Belum ada hasil penilaian Menpan	-	-
6	Persentase Penggunaan E- Procurement thd Belanja Pengadaan	%	95,08%	-	-
7	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	53	-	-



No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kabupaten Pangandaran	Realisasi Provinsi Jawa	Realisasi Nasional
			Pangandaran	Barat	
8	Tingkat				
	Kematangan	Poin	2,38	-	-
	E-Goverment				
9	Persentase Unit				
	Kerja yang				
	melaksanakan				
	Reformasi	%	14,81	_	
	Birokrasi dan	70	11,01		-
	Pembangunan				
	Zona Integritas				
	Daerah				
10	Survey				
	Kepuasan	Persepsi	84,92	-	-
	Masyarakat				
11	Ketaatan terhadap	%	12%	_	
	RTRW	70	12/0		-
12	Indeks Kualitas	Poin	67,58	61,59	71.40
	Lingkungan Hidup	1 0111	07,00	01,05	71,43
13	Persentase				
	infrastruktur dalam	%	89%	-	-
	kondisi mantap				
14	Persentase jalan				
	dalam kondisi	%	89%	-	-
	mantap				
15	Tingkat kecelakaan	Poin	0,001	_	
	lalu lintas	1 0111	0,001		-
16	Rasio jaringan irigasi				
	teknis dalam kondisi	%	72%	-	-
	baik				
17	Persentase Rumah				
	Tangga Dengan	%	88%	-	-
	Akses air minum				
18	Indeks Resiko	Poin	48	_	
	Sanitasi	1 0111	70	-	-
19	Indeks Risiko	Poin	145,44	145,81	
	Bencana	1 0111	170,77	1 10,01	-
20	Persentase sarana	%	43%	-	-
		•	•		





No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi	Realisasi
	, and the second		Pangandaran	Jawa Barat	Nasional
	dan prasarana pusat				
	pemerintahan yang				
	terpenuhi				
21	Angka Konfilk				
	Suku, Agama,	Angka	3	_	
	Ras dan Antar	Migha	3	_	-
	Golongan				
22	Persentase Pemajuan	%	60		
	Kebudayaan Lokal	/0	00	-	-
23	Persentase				
	skala sikap				
	peserta didik	%	98%		
	yang	/0	9676	-	-
	berkepribadian				
	baik				
24	Persentase				
	partisipasi	Angleo	Tidak ada		
	masyarakat dalam	Angka	pemilu	-	-
	pemilu				
25	Indeks				
	Pembangunan	Poin	68,28	72,45	72,3
	Manusia (IPM)				
26	Persentase Laju				
	Pertumbuhan	%	0,55%	1,41%	1,22%
	Penduduk (LPP)				
27	Indeks				
	Pemberdayaan	Poin	74,57	89,36	91,27
	Gender (IPG)				
28	Indeks				
	Pembangunan	Poin	82,35	-	-
	Keolahragaan				
29	Indeks				
	Pembangunan	Poin	186,27	-	-
	Kepemudaan				
31	Persentase PPKS	%	20.50		
	yang Mandiri	70	39,52	_	-
32	Indek Gini	Poin	0,35	-	-





No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kabupaten Pangandaran	Realisasi Provinsi Jawa Barat	Realisasi Nasional
33	Persentase Tingkat pengangguran terbuka	%	3,25%	9,82%	6,5%
34	Persentase pertumbuhan PDRB	%	-	-	3,7%
35	Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM	%	100	-	-
36	Jumlah Koperasi yang sehat	Angka	0	-	-
37	Pola Pangan Harapan	Poin	93,40	-	-
38	Jumlah kunjungan wisata	Jumlah	3.604.129	28 541 076	-
39	Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari Global Sustainable Tourism Council (GSTC)	Jumlah	0	-	-

Sumber data: Statistik Indonesia, dan Jawa Barat Dalam Angka, Pangandaran Dalam Angka, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, yakni perbandingan antara realisasi Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat dan Nasional diketahui bahwa capaian rata-rata pada setiap Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pangandaran terlihat lebih baik dibandingkan capaian indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Barat. Begitupun dengan Indikator Kinerja Utama Nasional, dimana capaian Indikator Kinerja Utama Nasional lebih rendah dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten dan Provinsi. Akan tetapi masih terdapat data Indikator capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional masih belum diketahui karena belum adanya publikasi.





3.2.5 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3 .56 Capaian Anggaran Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2021

TUJUAN/	Capaian Anggaran 2021				
SASARAN Strategis	Target	Realisasi	Capaian (%)		
T.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Rp 24.994.981.874	Rp 16.645.074.669	67%		
S1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Rp 7.367.050.029	Rp 3.347.086.840	45,43%		
S2. Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Rp 8.417.076.045	Rp 6.770.091.600	80,43%		
S3. Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas	Rp 9.210.855.800	Rp 6.527.896.229	70,87%		
T2. Terciptanya Ruang Wilayah Kabupaten yang harmonis dan berwawasan lingkungan	Rp 3.613.508.749	Rp 1.421.033.906	39,33%		
S4. Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap rencana Tata Ruang Wilayah	Rp 1.845.883.850	Rp 223.558.000	12,11%		
S5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Rp 1.767.624.899	Rp 1.197.475.906	67,74%		





TUJUAN/	Capaian Anggaran 2021					
SASARAN Strategis	Target	Realisasi	Capaian (%)			
T3. Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur yang berkualitas	Rp 123.162.191.745	Rp 92.467.953.864	75,08%			
S6. Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas	Rp 123.162.191.745	Rp 92.467.953.864	75,08%			
T4. Meningkatnya Mitigasi bencana dalam pembangunan.	Rp 5.213.787.252	Rp 3.732.613.774	71,59%			
S7. Menurunnya Resiko Bencana di daerah Rawan Bencana	Rp 5.213.787.252	Rp 3.732.613.774	71,59%			
T5. Terwujudnya sarana dan prasarana pusat pemerintahan	Rp 27.985.374.425	Rp 12.148.420.921	43,41%			
S8. Mewujudkan pemenuhan bangunan pusat pemerintahan	Rp 27.985.374.425	Rp 12.148.420.921	43,41%			
T6. Terwujudnya pelestarian seni budaya, pengamalan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan	Rp 3.440.559.000	Rp 3.198.203.000	92,96%			
S9. Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan	-	-	-			
S10. Meningkatnya Kesatuan Bangsa	Rp 1.403.850.000	Rp 1.361.494.000	96,98%			
S11. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi	Rp 2.036.709.000	Rp 1.836.709.000	90,18%			





TUJUAN/	Capaian Anggaran 2021					
SASARAN Strategis	Target	Realisasi	Capaian (%)			
T7. Meningkatnya kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan daya beli masyarakat secara berkelanjutan	Rp 462.956.043.675	Rp 283.042.932.570	61,14%			
S12. Meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat	Rp 462.956.043.675	Rp 283.042.932.570	61,14%			
T8. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Rp 4.336.852.227	Rp 4.124.768.077	95,11%			
S13. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Rp 4.336.852.227	Rp 4.124.768.077	95,11%			
T9. Meningkatnya pengarusutamaan Gender	Rp 239.897.505	Rp 232.657.505	96,98%			
S14. Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender	Rp 239.897.505	Rp 232.657.505	96,98%			
T10. Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga	Rp 4.790.149.321	Rp 2.802.667.223	58,51%			
S15. Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga	Rp 4.790.149.321	Rp 2.802.667.223	58,51%			





TII IIIAN /	Capaian Anggaran 2021				
TUJUAN/ SASARAN Strategis	Target	Realisasi	Capaian (%)		
T11. Menurunnya tingkat kemiskinan	Rp 3.900.643.167	Rp 1.681.852.500	43,12%		
S16. Menurunnya angka kemiskinan	Rp 3.900.643.167	Rp 1.681.852.500	43,12%		
T12. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Rp 11.471.128.312	Rp 9.299.463.596	81,07%		
S17. Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Rp 2.250.687.550	Rp 1.340.005.250	59,54%		
S18. Menurunnya tingkat pengangguran	Rp1.343.766.407	Rp 1.308.652.050	97,39%		
S19. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Rp 7.876.674.355	Rp 6.650.806.296	84,44%		

Sumber data : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa capaian anggaran tahun 2021 mencapai 68,55%, yang mana anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 442.298.188.445 dari total anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 450.648.095.650. Secara rinci, pada tujuan 1 capaian anggarannya mencapai 98%, yang mana anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp.16.645.074.669 dari jumlah anggaran sebesar Rp.24.994.981.874. Pada tujuan 2, capaian anggarannya adalah sebesar Rp. 1.421.033.906 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 3.613.508.749. Pada tujuan 3, capaian anggarannya adalah sebesar Rp.9.246.7953.864 dari jumlah anggaran sebesar Rp.123.162.191.745. Pada tujuan 4,





capaian anggarannya adalah sebesar 71,59%, yang mana anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 3.732.613.774 dari jumlah anggaran sebesar 5.213.787.252. Pada tujuan 5, capaian anggarannya adalah sebesar 43,41%, yang mana anggaran yang Rp.12.148.420.921 terealisasi adalah sebesar dari jumlah anggaran sebesar Rp. 27.985.374.425. Pada tujuan 6, capaian anggarannya adalah sebesar 92,96%, yang mana anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 3.198.203.000 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 3.440.559.000. Pada tujuan 7, capaian anggarannya adalah sebesar 61,14%, yang mana anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp.283.042.932.570 dari jumlah anggaran sebesar Rp.462.956.043.675. Pada tujuan 8, capaian anggarannya adalah sebesar 95,11%, yang mana anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 4.124.768.077 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 4.336.852.227.

Pada tujuan 9, capaian anggarannya adalah sebesar 96,98%, yang mana anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 232.657.505 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 239.897.505. Pada tujuan 10, capaian anggarannya adalah sebesar Sp. 2.802.667.223 dari jumlah anggaran sebesar Rp.4.790.149.321. Pada tujuan 11, capaian anggarannya adalah sebesar 43,12%, yang mana anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 1.681.852.500 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 3.900.643.167. Pada tujuan 12, capaian anggarannya adalah sebesar 81,07%, yang mana anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 9.299.463.596 dari jumlah anggaran sebesar Rp.11.471.128.312.





3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tujuan dan Sasaran

Analisis data efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3 .57 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tahun 2021

TUJUAN/ SASARAN Strategis	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Capaian Anggaran Tahun 2021 (%)	Efisiensi	Efisien/Tidak Efisien
T.1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi	-	67% (akumulasi anggaran dari sasaran dibawahnya)	-	-
S1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel	80%	45%	35%	EFISIEN
S2. Birokrasi yang Efektif dan Efisien	78%	80%	-2%	TIDAK EFISIEN
S3. Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas	78%	65,39%	13%	EFISIEN
T2. Terciptanya Ruang Wilayah Kabupaten yang harmonis dan berwawasan lingkungan	69%	39,33%	30%	EFISIEN
S4. Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap rencana Tata Ruang Wilayah	30%	12,11%	18%	EFISIEN
S5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	107%	67,74%	39%	EFISIEN





TUJUAN/ SASARAN Strategis	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Capaian Anggaran Tahun 2021 (%)	Efisiensi	Efisien/Tidak Efisien
T3. Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur yang berkualitas	94%	75,08%	19%	EFISIEN
S6. Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas	94%	75,08%	19%	EFISIEN
T4. Meningkatnya Mitigasi bencana dalam pembangunan.	104%	71,59%	32%	EFISIEN
S7. Menurunnya Resiko Bencana di daerah Rawan Bencana	104%	71,59%	32%	EFISIEN
T5. Terwujudnya sarana dan prasarana pusat pemerintahan	54%	43,41%	11%	EFISIEN
S8. Mewujudkan pemenuhan bangunan pusat pemerintahan	54%	43,41%	11%	EFISIEN
T6. Terwujudnya pelestarian seni budaya, pengamalan nilai- nilai kebangsaan dan keagamaan	57%	92,96%	-36%	TIDAK EFISIEN
S9. Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan	75%	-	-	-
S10. Meningkatnya Kesatuan Bangsa	38%	96,98%	-59%	TIDAK EFISIEN





TUJUAN/ SASARAN Strategis	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Capaian Anggaran Tahun 2021 (%)	Efisiensi	Efisien/Tidak Efisien
S11. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi	-	90,18%	-	-
T7. Meningkatnya kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan daya beli masyarakat secara berkelanjutan	99%	61,14%	38%	EFISIEN
S12. Meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat	99%	61,14%	38%	EFISIEN
T8. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	96%	95,11%	1%	EFISIEN
S13. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	96%	95,11%	1%	EFISIEN
T9. Meningkatnya pengarusutamaan Gender	100%	96,98%	3%	EFISIEN
S14. Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender	100%	96,98%	3%	EFISIEN
T10. Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga	690%	58,51%	631%	EFISIEN





TUJUAN/ SASARAN Strategis	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Capaian Anggaran Tahun 2021 (%)	Efisiensi	Efisien/Tidak Efisien
S15. Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga	132%	43,12%	89%	EFISIEN
T11. Menurunnya tingkat kemiskinan	132%	43,12%	89%	EFISIEN
S16. Menurunnya angka kemiskinan	132%	43,12%	89%	EFISIEN
T12. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	96%	81,07%	15%	EFISIEN
S17. Menurunnya kesenjangan antar wilayah	101%	59,54%	41%	EFISIEN
S18. Menurunnya tingkat pengangguran	101%	97,39%	4%	EFISIEN
S19. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	86%	84,44%	2%	EFISIEN

Sumber: Bappeda, Sekretariat Daerah, Capaian IKU Kabupaten Pangandaran







BAB IV PENUTUP

4.1 PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pangandaran disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan ini menggambarkan hasil evaluasi kinerja dengan fokus pada sasaran yang ditetapkan pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Kabupaten Pangandaran yang berupa analisis dan pengukuran kinerja terhadap Pencapaian Indikator, Sasaran Strategis, dan Capaian Misi. Penyusunan LKjIP juga merupakan sebuah pertanggungjawaban pencapaian Visi Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran yaitu "Kabupaten Pangandaran sebagai Tujuan Wisata Termaju di Pulau Jawa" sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 34.A Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran 2016-2021. Visi tersebut kemudian dirumuskan ke dalam 6 misi yakni :

Pertama Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

akuntabel, bersih dan melayani.

Kedua Mewujudkan penataan ruang yang

harmonis dan pengendalian pemanfaatan

ruang yang berwawasan lingkungan.

Ketiga Menyediakan infrastruktur dan fasilitas

yang berkualitas.

Keempat Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan

lokal.





Kelima

Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.

Keenam

Membangun perekonomian yang Tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

Realisasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah dilakukan secara sistematis melalui penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Demikian pula pada tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah **RKPD** berisi usulan menyusun yang strategi dan program/kegiatan dengan mengacu pada indikator dan target mengacu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dengan mengacu pada IKU Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan pengukuran terhadap kinerja 50 Indikator Kinerja Utama (IKU) disimpulkan bahwa 28 Indikator atau sebesar 56% dari seluruh IKU memiliki capaian dengan kategori sangat Tinggi, indikator dengan kategori Tinggi sebanyak 3 indikator atau sebesar 6%. Sedangkan pada kategori sedang terdapat 2 indikator atau 4%. kemudian terdapat 5 indikator atau 10% dengan kategori rendah dan terdapat 5 indikator dengan capaian sangat rendah atau 10% dari total keseluruhan indikator. Selanjutnya masih terdapat 7 Indikator yang belum terdapat data dan capaiannya.

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran 2021, Pemerintah Kabupaten Pangandaran akan terus selalu mengupayakan terjadinya percepatan pembangunan dengan melakukan monitoring dan evaluasi agar target akhir RPJMD di 2021 dapat tercapai. Dengan tercapainya target akhir di RPJMD nantinya, diharapkan dapat menjawab dan menuntaskan visi dan misi yang telah tertuang pada periode tersebut. Koordinasi





dan sinkronisasi akan terus dilakukan dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paangandaran dalam rangka menerapkan SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Selain itu, seluruh SKPD harus dapat bersinergi dengan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Pangandaran, Maret 2022 BUPATI PANGANDARAN,

H. JEJE WIRADINATA



